

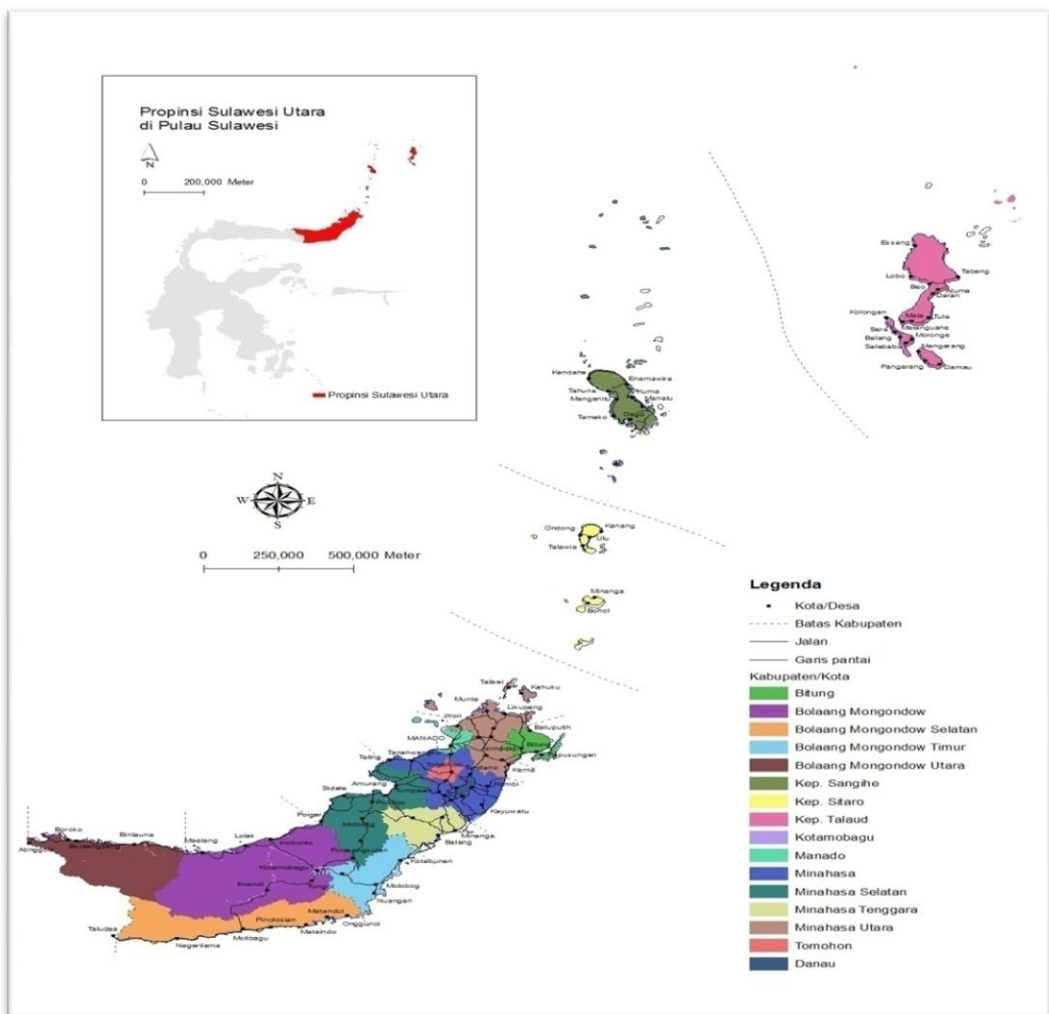
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Provinsi Sulawesi Utara dengan Ibukota Manado terletak pada $0^{\circ}15'-5^{\circ}34'$ Lintang Utara dan $123^{\circ}07'-27^{\circ}10'$ Bujur Timur. Selanjutnya peta Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1.
Peta Provinsi Sulawesi Utara, 2009



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2010.

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Sulawesi Utara mempunyai batas-batas:

Utara : Laut Sulawesi, Republik Filipina, dan Lautan Pasifik

Timur : Laut Maluku

Selatan: Teluk Tomini

Barat : Provinsi Gorontalo

Wilayah Sulawesi Utara seluas 15.273,560 km² dengan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai kabupaten terluas, yaitu 3.547,49 km² atau 23,22%. Luas wilayah hanya sebesar 0,72% dari luas wilayah Indonesia. Jumlah pulau sebanyak 286 pulau. Jumlah desa yang terletak di daerah pesisir sebanyak 627 desa dan bukan wilayah pesisir jumlahnya sebanyak 867 desa.

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Sulawesi Utara memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan kawasan Asia Timur (Cina, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, ASEAN) dan Pasifik yang menjadi pusat perdagangan dan pertumbuhan ekonomi regional. Kondisi ini menciptakan iklim yang menarik bagi para wisatawan, pelaku bisnis, dan para investor domestik dan internasional untuk berkunjung di Sulawesi Utara.

Gambar 2.2.
Peta Posisi Provinsi Sulawesi Utara Sebagai Gerbang Utara Indonesia



Sumber: BP. KAPET Manado-Bitung, 2010.

Posisi semenanjung wilayah Sulawesi Utara yang terletak di tepian Samudra Pasifik, diapit oleh 2 (dua) Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II) yang melewati Selat Makassar antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, dan ALKI III yang melewati Laut Maluku antara Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku Utara dan Maluku. Posisi strategis ini menciptakan keunikan dan keunggulan khusus bagi Sulawesi Utara karena sangat dekat dengan pasar Asia Timur dan Pasifik.

Tabel 2.1.
Perbandingan Jarak Antara Pelabuhan Bitung
Terhadap Pelabuhan Negara Tujuan, 2007

Pelabuhan Bitung	Pelabuhan Negara Tujuan					
	Kaohsiung (Taiwan)	Hong Kong (Cina)	Shanghai (Cina)	Busan (Korea)	Tokyo (Jepang)	Los Angeles (Amerika)
Via Tanjung Priok & Singapura (Mil Laut)	3.526	3.365	4.142	4.408	3.429	9.574
Bitung Direct (Mil Laut)	1.346	1.423	1.901	2.113	2.220	6.651
Beda Jarak (Mil Laut)	2.180	1.942	2.241	2.295	1.209	2.923
Beda Jam (Jam)	346,46	336,11	349,11	351,46	364,24	378,76
Beda Hari (Hari)	14,44	14,00	14,55	14,64	15,18	15,78
Selisih Biaya Charter Kapal (US\$)	2.887.137,68	2.800.905,80	2.909.239,13	2.928.804,35	3.035.326,09	3.156.340,58

Sumber: Badan Pengelola (BP KAPET) Manado-Bitung, 2008.

Catatan: Asumsi kecepatan Kapal Ocean going 23 knot. Asumsi kecepatan kapal feeder domestik 10 knot. Waktu transit tiga hari pada setiap pelabuhan (Priok dan Singapura).

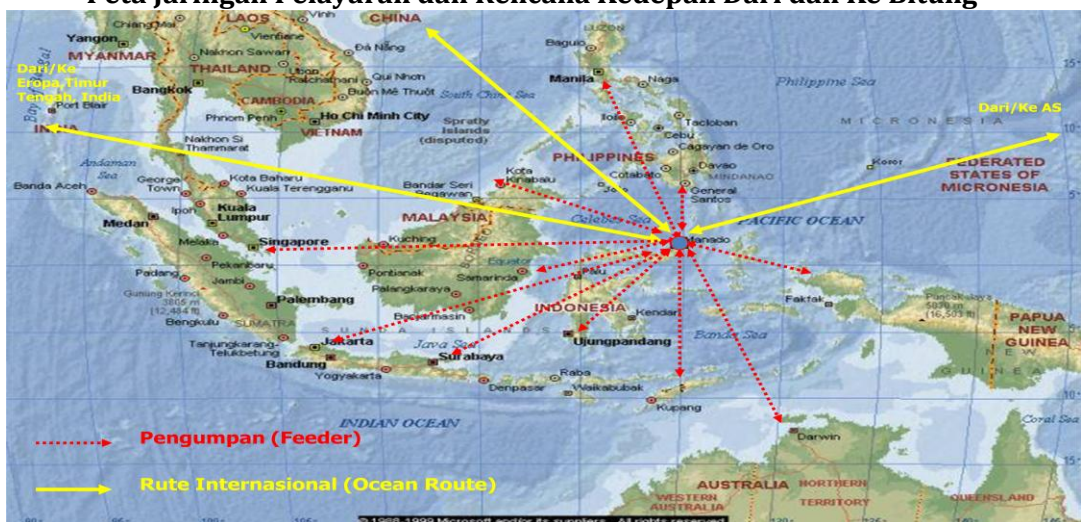
Posisi strategis dan keunggulan pelabuhan Bitung di kawasan Pasifik (pada Tabel 2.1) memperlihatkan adaperbedaan dari aspek jarak, jam, hari, dan biaya antara pelabuhan Bitung dibandingkan dengan Pelabuhan Tanjung Priok dan Singapura untuk pelabuhan tujuan Kaohsiung (Taiwan), Hongkong, Shanghai, Busan (Korsel), Tokyo, dan Los Angeles. Dilihat dari aspek jarak dan waktu, pelabuhan Bitung jauh lebih dekat dan lebih pendek waktunya untuk akses ke beberapa pelabuhan utama di Asia Timur dan Pasifik. Demikian juga dilihat dari aspek biaya kapal, jauh lebih murah dari pelabuhan Bitung dibandingkan dari pelabuhan Tanjung Priok dan Singapura. Jadi pelabuhan Bitung jauh lebih efisien untuk menjangkau beberapa pelabuhan utama di Asia Timur dan Pasifik. Sulawesi Utara memiliki jaringan logistik laut dari pelabuhan Bitung yang efisien untuk menjangkau pasar dikawasan Pasifik dan Asia Timur, dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global dengan pelayaran langsung dari pelabuhan Bitung ke pelabuhan luar wilayah Indonesia. Walaupun sampai saat ini, pelayaran dari pelabuhan Bitung ke negara tujuan ekspor masih dalam bentuk tidak terjadwal.

Gambar 2.3 memperlihatkan pelayaran reguler kontainer dan penumpang dari pelabuhan Bitung yang tersedia saat ini, untuk pelabuhan tujuan Jakarta, Surabaya, Makassar, Ternate,

Sorong, Jayapura, Luwuk, Kendari, Pantoloan, dan Balikpapan. Belum berkembangnya pelayaran langsung internasional dari pelabuhan Bitung, disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan *Ocean Going Container*, Main Line Operator (MLO), dan kemampuan PT. Pelindo IV untuk membangun pelayaran langsung internasional dari Bitung.

Umumnya yang menggunakan jasa pelayaran langsung ke Singapura adalah exportir kelas menengah dan kecil. Biaya pengiriman per kontainer bisa lebih murah antara US\$250-US\$300, dibandingkan dengan pengiriman melalui Jakarta atau Surabaya. Untuk memudahkan perusahaan pelayaran *Swire* beroperasi di pelabuhan Bitung, PT. Pelindo memberikan keringanan untuk pembayaran sewa *container yard*. Hanya saja insentif ini tidak berlangsung lama, hanya sekitar 3 bulan. Insentif yang diberikan tidak sebanding dengan biaya untuk mereposisi *ocean going container* dari Singapura ke Bitung. Pelayaran langsung ini akhirnya hanya berlangsung kurang dari 3 tahun, disebabkan pelayanan dan insentif yang diberikan pelabuhan Bitung kalah bersaing dengan pelabuhan Madang (PNG), dimana jalur pelayaran ini berawal dari Madang-Bitung-Singapura. Selain diberikan insentif yang memadai, jumlah kontainer berkembang semakin pesat dan ruang kosong yang tersedia dalam kapal semakin berkurang untuk menampung kontainer yang dimuat dari pelabuhan Bitung.

Gambar 2.3.
Peta Jaringan Pelayaran dan Rencana Kedepan Dari dan Ke Bitung



Sumber: BP. KAPET Manado-Bitung, 2010.

Indonesia melakukan pembangunan ekonomi dengan pendekatan *growth centre* di mulai dari Jakarta dan berkembang di pulau Jawa, sebagian besar komoditas ekspor tradisional dari Indonesia Timur harus melalui pelabuhan Tanjung Perak dan Tanjung Priok yang sudah terbatas daya dukungnya, sehingga terjadi penumpukan dan kemacetan (*congested*).

Jadi komoditas ekspor dari luar Jawa seperti harus melewati jaringan pipa kecil yang sudah mengecil dan kadang-kadang tersumbat (*bottleneck*).

Era Pasifik, Sulawesi Utara dan beberapa provinsi di Kawasan Timur bagian utara bukan lagi berada di wilayah pinggiran (*periphery*) Jakarta, tetapi kawasan timur bagian utara Indonesia berada di centrum peredaran perdagangan dunia dan pertumbuhan ekonomi dunia, ketika peta Indonesia diperluas pada peta dunia. Peluang ini membuktikan bahwa "Sulawesi Utara Sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Timur dan Pasifik" bukan sebuah impian, melainkan sebuah solusi bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Sulawesi Utara pada khususnya dan Indonesia pada umumnya seperti yang telah diprediksi Dr. Sam Ratulangi (1936) pada beberapa puluh tahun lalu. Peningkatan peran aktif dalam perdagangan dunia, oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Utara secara langsung maupun tidak langsung melalui kerjasama regional yang terintegrasi dan terpadu seperti BIMP-EAGA, ASEAN, EAST ASIA, dan APEC perlu dioptimalkan. Singkatnya, Sulawesi Utara berada pada posisi sangat strategis untuk mengoptimalkan perdagangan bebas di kawasan Asia Timur dan Pasifik.

2.1.1.3. Topografi

a. Gunung-gunung

Sebagian besar wilayah dataran Sulawesi Utara terdiri dari pegunungan dan bukit-bukit diselingi oleh lembah yang membentuk dataran. Gunung-gunung terletak berantai dengan ketinggian di atas 1000m dari permukaan laut. Beberapa gunung di Sulawesi Utara yaitu, Gunung Klabat (1895m), Gunung Lokon (1579m), Gunung Mahawu (1331m), Gunung Soputan (1789m), Gunung Dua Saudara (1468m) (wilayah Bitung), Gunung Awu (1784m), Gunung Ruang (1245m), Gunung Karangetan (1320m), Gunung Dalage (1165m), Gunung Ambang (1689m), Gunung Gambula (1954m), dan Gunung Batu-Balawan (1970m).

b. Dataran Rendah dan Dataran Tinggi

Dataran rendah dan dataran tinggi secara potensial mempunyai nilai ekonomi bagi daerah. Beberapa dataran yang terdapat di daerah ini antara lain: Tondano (2.850Ha), Langowan (2.381Ha), Modoinding (2.350Ha), Tompaso Baru (2.587Ha) di Kabupaten Minahasa serta beberapa wilayah di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud.

2.1.1.4. Geologi

Kawasan cagar alam geologi di Provinsi Sulawesi Utara terletak di Kota Tomohon (Lahendong dan sekitarnya); Kabupaten Minahasa (Leilem, Bukit Kasih Kanonang dan sekitarnya). Kawasan cagar alam geologi di wilayah Sulawesi Utara berupa kawasan yang memiliki keunikan proses geologi, yakni dengan kemunculan solfatara dan fumarola, air atau uap panas (fluida). Para ahli keilmu-bumih menyatakan bahwa kekayaan geologi yang sangat unik di miliki Indonesia utamanya di daerah Sulawesi Utara yaitu keberadaan tumbukan antara 2 (dua) *island arc* (Sangihe dan Halmahera) yang menumpang diatas lempeng laut Maluku, sementara di tempat-tempat lain dibagian dunia ini: lempeng benua bertumbukan dengan lempeng samudera. Hal ini menjadikan Sulawesi Utara memiliki keunggulan geologi yang unik untuk dijadikan dayatarik wisata tetapi juga sebagai pusat studi keilmu-bumih dibandingkan dengan daerah lainnya.

2.1.1.5. Hidrologi

Danau-danau di Sulawesi Utara secara potensial mempunyai nilai ekonomi bagi pengembangan bidang-bidang kepariwisataan, pengairan, dan energi. Danau-danau tersebut adalah Danau Tondano luas 4.278Ha di Kabupaten Minahasa, Danau Moat seluas 617ha di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Pada umumnya sungai-sungai dimanfaatkan untuk berbagai keperluan antara lain irigasi, sumber tenaga listrik, dan sumber air minum. Sungai-sungai tersebut terletak di Kabupaten Minahasa yaitu: Sungai Tondano (40Km), Sungai Poigar (54,2Km), Sungai Ranoyapo (51,9Km), Sungai Talawaan (34,8Km). Sungai besar lainnya terdapat di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu Sungai Dumoga (87,2Km), Sungai Sangkup (53,6Km), Sungai Ongkaw (42,1Km), dan lainnya.

2.1.1.6. Klimatologi

Iklim daerah Sulawesi Utara termasuk tropis yang dipengaruhi oleh angin muson. Pada bulan November sampai dengan April bertiup angin barat yang membawa hujan di pantai utara, pada bulan Mei sampai Oktober terjadi perubahan angin selatan yang kering. Curah hujan tidak merata dengan angka tahunan berkisar antara 2000-3000mm, dan jumlah hari hujan antara 90-139 hari. Suhu udara berbeda pada setiap tingkat ketinggian, makin ke atas makin sejuk seperti daerah Kota Tomohon, Langowan di Kabupaten Minahasa, Modinding di Kabupaten Minahasa Selatan, Modayag di Kota Kotamobagu, dan Pasi di Kabupaten Bolaang Mongondow. Daerah yang paling banyak menerima curah hujan adalah Kabupaten Minahasa. Suhu udara rata-rata 25°C. Suhu udara maksimum rata-rata tercatat 30°C dan suhu udara minimum rata-rata 22,1°C dan kelembaban udara tercatat 73,4%.

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

a. Kawasan Lindung

Kawasan lindung di wilayah Sulawesi Utara meliputi kawasan hutan dengan kriteria: lereng lapangan 40% atau lebih, memiliki tanah peka erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15%, merupakan daerah resapan air dan daerah perlindungan pantai.

b. Kawasan Budidaya

Penetapan kawasan ini dititik beratkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan potensi sumber daya yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan:

2.1.2.1. Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi

Kawasan Hutan, seperti pertanian dan perkebunan, tanaman-tanaman yang dapat berfungsi ganda, misalkan: sebagai penghasil buah, penghasil kayu, dan lain-lain yang

sekaligus juga berfungsi ekologis. Saat ini, kawasan hutan rakyat telah dikembangkan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan bantuan dari instansi kehutanan seperti Dinas Kehutanan dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS).

Banyaknya kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, dan perkebunan. Di Sulawesi Utara, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi berada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara seluas 14.643,40Ha.

2.1.2.2. Kawasan Pertanian

Pengembangan pertanian dapat dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Utara meliputi: Kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan air tawar, perikanan laut, dan peternakan.

2.1.2.3. Kawasan Pertanian Lahan Basah

Pertanian lahan basah adalah usaha budidaya tanaman pangan lahan basah khususnya padi sawah berpotensi yang berlokasi di:

- 1) Daerah Dumoga, Lolayan, dan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow
- 2) Daerah Bintauna/Bolangitang di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- 3) Beberapa lokasi di Kabupaten dan Kota yang juga memiliki lahan yang berpotensi untuk pengembangan budidaya tanaman pangan lahan basah (padi sawah).

2.1.2.4. Kawasan Perkebunan

Data perkebunan kelapa sebagai salah satu produk unggulan Sulawesi Utara dengan total area 274.874Ha terdiri atas *Privately-owned Company* 8.556Ha dan *Locally-Owned* 266.318Ha. Kelapa yang produktif 265.240Ton/tahun, *productive coconut* 255.027Ha, *Old Coconut* (kelapa tua) 21.041Ha, *local coconut* (kelapa dalam) 259.98Ha, *Hybrid Coconut* (Kelapa Hibrida) 4.804Ha. Selain kelapa, ada beberapa potensi tanaman rempah yang sudah mendunia seperti cengkih, pala, dan vanila. Oleh karena itu perlu ada perlindungan lewat HaKI dan *geografic indication* untuk wilayah produk unggulan daerah. Beberapa daerah yang juga berpotensi, yaitu:

- 1) Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, dan Kota Bitung.
- 2) Kawasan sepanjang jalur Jalan Trans Sulawesi.
- 3) Kecamatan Bolangitan dan Kecamatan Bolaang Uki di sepanjang Pantai Utara dan Selatan di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- 4) Pulau Tagulandang, Biaro, Sangihe, Siau, Karakelang, Salibabu, dan Mangarang di Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Sitaro.

Khusus Kabupaten Minahasa Utara, tanaman kelapa mendominasi distribusi tanaman perkebunan lainnya serta dilengkapi dengan Balai Penelitian Kelapa dan Tanaman Palma

lainnya sehingga daerah ini dijadikan percontohan dalam bentuk *Agro Techno Park* berbasis Kelapa.

2.1.2.5. Kawasan Perikanan

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, berpotensi dikembangkan hampir di semua kabupaten/kota kecuali: Kota Tomohon, Kota Kotamobagu, Kabupaten Minahasa, dan Kabupaten Minahasa Utara.

2.1.2.6. Kawasan Integrasi

Pentingnya untuk menciptakan *New Growth Center* di Kawasan Indonesia Timur dan Kawasan Asia Pasifik, yang mencerminkan bagaimana keadaan Sulawesi Utara di usia 50 Tahun atau *Golden year* (50 Tahun) perlu didukung dengan adanya Infrastruktur koridor Manado-Bitung (meliputi daerah integrasi infrastruktur Manado-Wori-Likupang-Airport Samrat, Global Hub Bitung, KEK Tanjung Merah Bitung, *Regional Processing* Akhir Persampahan (di Wori) serta IPAL (instalasi pengelolaan air limbah) di Bitung. Rencana pembangunan Rel Kereta Api Manado-Bitung-Gorontalo yang akan menjadi poros konektivitas dengan daerah lain di Sulawesi, serta pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung. Kawasan ini didukung juga dengan Sektor/Bidang seperti: pariwisata bahari, kelembagaan KEK Tanjung Merah Bitung, Perikanan Kelautan (Minopolitan Bitung). Permukiman, *e-government*, dan *ASEAN Connectivity*.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

2.1.3.1. Kawasan Rawan Tanah Longsor

Kawasan Rawan Tanah Longsor Sulawesi Utara tersebar di wilayah kabupaten dan kota, sebagai berikut: 1) Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Siau-Tagulandang-Biaro: Manganitu, Tamako, dan Siau Timur. 2) Kota Manado: Kecamatan Wanea, Singkil, Tuminting, Tikala, Mapanget, Bunaken, Malalayang, dan Wenang. 3) Jalur jalan Manado-Amurang. 4) Jalur jalan Manado-Tomohon. 5) Jalur jalan Noongan-Ratahan-Belang, dan daerah Torosik.

Bencana tanah longsor dan banjir terjadi di beberapa daerah antara lain di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kota Manado, dan beberapa daerah lainnya, serta letusan gunung berapi di Kabupaten Kepulauan Siau-Tagulandang-Biaro (Gunung Karangetang).

2.1.3.2. Kawasan Rawan Gelombang Pasang

Kawasan rawan gelombang pasang di Sulawesi Utara meliputi pesisir pantai utara dan selatan yang memiliki elevasi rendah.

2.1.3.3. Kawasan Rawan Banjir

Kawasan Rawan Banjir di Provinsi Sulawesi Utara meliputi daerah muara sungai, dataran banjir, dan dataran aluvial terutama di sepanjang sungai.

2.1.4. Demografi

2.1.4.1. Jumlah Penduduk

Penduduk Sulawesi Utara 2010 berjumlah 2.270.596 jiwa. Dikaitkan dengan luas wilayah yang ada, terlihat adanya ketimpangan penyebaran penduduk di mana Kota Manado sekitar 19,5% dari jumlah penduduk Sulawesi Utara hanya memiliki 1,04% luas wilayah Sulawesi Utara. Di sisi lain, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang memiliki penduduk sebesar 2,3%, mendiami 11,68% wilayah Sulawesi Utara.

Kota Manado merupakan wilayah yang terbanyak penduduknya dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Utara dengan jumlah penduduk sebanyak 410.481 orang, disusul oleh Kabupaten Minahasa sebanyak 310.384 orang, dan Kabupaten Bolaang Mongondow sebanyak 213.438 orang.

Tabel 2.2.
Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Utara, 2005-2010

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Kabupaten:						
01	Bolaang Mongondow	474,908	485,222	298,271	302,393	196,263	213 484
02	Minahasa	288,539	293,081	296,142	298,179	300,226	310 384
03	Kepulauan Sangihe	191,102	191,631	130,129	130,290	130,449	126 100
04	Kepulauan Talaud	74,512	74,660	74,786	74,892	74,997	83 434
05	Minahasa Selatan	275,997	276,928	182,017	182,292	182,818	195 553
06	Minahasa Utara	165,758	170,340	172,690	174,455	176,480	188 904
07	Bolaang Mongondow Utara	n.a	n.a	79,042	80,134	80,508	70 693
08	Kepulauan Sitaro	n.a	n.a	61,576	61,652	61,781	63 801
09	Minahasa Tenggara	n.a	n.a	95,002	95,145	95,525	100 443
10	Bolaang Mongondow Selatan	n.a	n.a	n.a	n.a	52,122	57 001
11	Bolaang Mongondow	n.a	n.a	n.a	n.a	59,401	63 654

	Timur						
	Kota:						
12	Manado	405,715	417,654	424,111	429,149	434,845	410 481
13	Bitung	163,837	169,243	174,003	178,266	180,618	187 652
14	Tomohon	80,649	81,882	82,684	83,200	83,718	91 553
15	Kotamobagu	n.a	n.a	116,357	117,965	119,105	107 459
	Sulawesi Utara	2,121,01 7	2,160,64 1	2,186,81 0	2,208,01 2	2,228,85 6	2 270 596

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2010.

Tabel 2.3 juga memperlihatkan Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan wilayah yang paling sedikit jumlah penduduknya dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Sulawesi Utara yaitu sebanyak 56.546 orang. *Sex Ratio* Penduduk Sulawesi Utara sebesar 104 yang artinya jumlah penduduk laki-laki 4% lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan. Jika dilihat per kabupaten/kota, *sex ratio* terbesar berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang 109,6. Hal ini berarti penduduk laki-laki lebih banyak 10% daripada penduduk perempuan.

Tabel 2.3.
Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan *Sex Ratio*, 2010

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan	<i>Sex Ratio</i>
1	Kabupaten Bolaang Mongondow	111.013	102.210	213.223	108.6
2	Kabupaten Minahasa	128.759	151.117	309.876	105.1
3	Kabupaten Kepulauan Sangihe	63.859	62.274	126.133	102.5
4	Kabupaten Kepulauan Talaud	42.681	40.760	83.441	104.7
5	Kabupaten Minahasa Selatan	100.886	94.201	195.087	107.1
6	Kabupaten Minahasa Utara	95.879	92.588	188.467	103.6
7	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	36.155	34.474	70.629	104.9
8	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	31.428	32.115	63.543	97.9
9	Kabupaten Minahasa Tenggara	51981	48.324	100.305	107.6

10	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	29.493	27.053	56.546	109.0
11	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	33.246	30.347	63.593	109.6
12	Kota Manado	205.095	203.259	408.354	100.9
13	Kota Bitung	96.167	91.765	187.932	104.8
14	Kota Tomohon	46.212	45.380	91.592	101.8
15	Kota Kotamobagu	54.705	52.511	107.216	104.2
Sulawesi Utara		1.157.559	1.108.378	2.265.937	104.4

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2010.

2.1.4.2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan penduduk Sulawesi Utara Tahun 2008 sebesar 50,75%, dan Tahun 2009 sebesar 50,88%. Dimana 100 penduduk berusia kerja (produktif) menanggung 51 orang penduduk yang belum produktif dan tidak produktif. Tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 50,32%. Dimana 100 penduduk berusia kerja (produktif) menanggung 50 penduduk. Menurut kabupaten/kota rasio ketergantungan Tahun 2010 yang paling tinggi adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar 58,56%. Kemudian menyusul Kabupaten Minahasa Selatan sebesar 58,15 dan yang terendah Kota Manado sebesar 43,99%.

2.1.4.3. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Tahun 2000-2010 sebesar 1,41%. Kota Bitung yang tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Sulawesi Utara yakni sebesar 2,99%, sedangkan yang terendah Kabupaten Sangihe dengan pertumbuhan minus 0,09%. Kota Bitung memiliki karakteristik ekonomi industri serta merupakan sasaran migrasi masuk, terlebih dengan ketersediaan lahan yang masih memungkinkan untuk permukiman. Hal ini menyebabkan pengembangan area permukiman di Kota Bitung maju dengan sangat pesat. Sebaliknya Kota Manado yang merupakan pusat pertumbuhan penduduk di Sulawesi Utara mengalami kejenuhan pertumbuhan penduduk yakni hanya 0,92% yang disebabkan oleh keterbatasan lahan. Pertumbuhan penduduk ke arah *suburban* menyebabkan daerah Kabupaten Minahasa Utara sebagai daerah pertumbuhan tertinggi kedua setelah Kota Bitung yakni sebesar 2,49%.

2.1.4.4. Struktur Ketenagakerjaan

Tahun 2010 menunjukkan fakta bahwa penduduk yang termasuk angkatan kerja masih lebih banyak dari bukan angkatan kerja. Demikian juga untuk penduduk yang termasuk angkatan kerja yaitu penduduk yang bekerja masih lebih banyak dari yang menganggur. Sedangkan struktur penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja yaitu penduduk yang mengurus rumah tangga masih menduduki tempat teratas, kemudian bersekolah dan lainnya (kegiatan selain mengurus rumah tangga maupun bersekolah).

Tabel 2.4.
Tenaga Kerja Menurut Sektor Lapangan Pekerjaan Utama,
Provinsi Sulawesi Utara, Februari 2006-Februari 2010

Sektor Ekonomi	2006		2007		2008		2009		2010
	Feb	Agust	Feb	Agust	Feb	Agust	Feb	Agust	Feb
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pternakan, dan Perikanan	403,17 9	341,34 7	378,63 1	373,32 9	363,77 1	362,61 5	386,87 3	345,59 5	332,98 1
Pertambanga n dan Penggalian	4,756	10,402	18,229	8,703	14,806	12,804	19,048	18,301	31,052
Industri Pengolahan	49,813	42,273	65,290	44,497	61,270	43,846	57,094	57,520	57,452
Listrik, Gas, dan Air Minum	3,123	3,888	2,872	1,338	3,223	3,915	4,312	4,048	4,747
Konstruksi	40,168	65,268	54,819	61,209	56,406	67,121	53,091	68,843	57,296
Perdagangan, Hotel dan Restoran	154,95 2	131,61 4	174,12 7	164,71 8	144,15 5	163,69 3	175,01 2	173,43 2	178,34 1
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	73,350	111,38 5	89,220	86,287	136,04 7	90,561	102,11 5	93,012	97,458
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	12,254	12,021	12,900	15,627	10,127	13,850	14,496	16,546	19,300
Jasa Kemasyaraka tan, Sosial dan Perorangan	113,70 5	110,35 2	148,54 7	152,79 5	127,55 8	153,75 7	150,58 6	162,87 6	183,02 1
Total	855,3 00	828,5 50	944,6 35	908,5 03	917,3 63	912,1 98	962,6 27	940,1 73	961,6 48

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2011.

Penduduk usia kerja pada Tahun 2010 yang termasuk angkatan kerja sekitar 63,31% dan sisanya sekitar 36,69% adalah bukan angkatan kerja. Dari total penduduk yang termasuk angkatan kerja sekitar 90,39% merupakan penduduk bekerja, dan 9,61% adalah pengangguran. Komposisi penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja sebesar 61,26% mengurus rumah tangga, sekolah 23,10%, dan lainnya 15,64%.

Jumlah tenaga kerja di Sulawesi Utara meningkat dari tahun ke tahun. Pada bulan Februari Tahun 2006 tenaga kerja di seluruh sektor ekonomi sebanyak 855.300 orang, meningkat menjadi 961.648 orang pada bulan Februari Tahun 2010 atau meningkat rata-rata 1,47% per semester (Tabel 2.4). Tenaga kerja tersebut sebagian besar berada pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Namun demikian, tenaga kerja di sektor tersebut cenderung menurun rata-rata 2,36% per semester.

Penurunan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan mempengaruhi komposisi tenaga kerja menurut sektor ekonomi. Pada bulan Februari 2006, sektor tersebut menyerap 47,14% dari tenaga kerja di Sulawesi Utara dan menurun secara persisten hingga mencapai 34,63% pada bulan Februari Tahun 2010 atau menurun 3,78% per semester.

Selain sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan, tenaga kerja di sektor lain mengalami pertumbuhan, baik jumlah maupun porsi tenaga kerja mereka terhadap tenaga kerja secara keseluruhan. Sektor yang mengalami pertumbuhan tenaga kerja tertinggi adalah sektor pertambangan dan penggalian yang jumlahnya meningkat rata-rata 26,43% per semester.

2.1.4.5. Status Pekerjaan

Penduduk Sulawesi Utara Tahun 2009 masih didominasi oleh status pekerjaan usaha sendiri sebanyak 286.716 orang (30,50%) dan pekerja sebanyak 284.798 orang (30,39%). Status pekerjaan penduduk yang bekerja di daerah perkotaan terbanyak adalah sebagai pekerja sebesar 167.838 orang (45,33%) dan usaha sendiri sebesar 115.573 orang (31,22%). Sebaliknya, untuk daerah perdesaan, pekerjaan penduduk sebagian besar adalah usaha sendiri yaitu, sebesar 171.143 (30,03%) dan pekerja sebanyak 116.960 orang (20,52%).

Penduduk laki-laki yang bekerja paling banyak berstatus usaha sendiri yaitu, sebanyak 209.072 orang (31,09%) dan pekerja sebanyak 192.248 orang (28,58%), sedangkan penduduk perempuan paling banyak berstatus pekerja yaitu, sebesar 92.550 orang (34,58%) dan usaha sendiri sebanyak 77.644 orang (29,01%). Dari perspektif gender, situasi ini menunjukkan bahwa laki-laki masih mendominasi lapangan kerja formal. Namun demikian, tidak terdapat diskriminasi gender dalam mendapatkan lapangan kerja di Sulawesi Utara.

2.1.4.6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tahun 2010, TPAK sebesar 63,31%. Angka ini mengalami kenaikan dibanding keadaan Tahun 2009 sebesar 1,27%. TPAK Tahun 2010 di daerah perkotaan dan perdesaan masing-masing sebanyak 62,95% dan 63,52%. Sedangkan untuk *year on year*, TPAK untuk daerah perkotaan mengalami penurunan 0,99% dan perdesaan mengalami kenaikan sebesar 2,7%. TPAK untuk penduduk laki-laki pada 2010 sebesar 82,90% mengalami penurunan sebesar 0,61%. Jumlah pengangguran Tahun 2010 sebesar 99.635 orang, mengalami penurunan sebanyak 11.322 orang dari Tahun 2009. Jumlah penduduk yang menganggur di daerah perkotaan sebesar 44.166 orang (11,43%) dan di daerah perdesaan sebesar 55.469 orang (8,53%). Penduduk laki-laki yang menganggur 37.311 orang (5,41%) dan perempuan sebesar 62.324 orang (17,98%).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Utara selama tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan, yaitu 10,65% 2008, turun menjadi 10,56% Tahun 2009, dan menjadi 9,61% Tahun 2010. Namun bila dibandingkan dengan TPT nasional (7,14%), TPT Sulawesi Utara Tahun 2010 termasuk tinggi dan berada di urutan ke enam tertinggi di antara provinsi lainnya di Indonesia. Struktur Status pekerjaan penduduk Tahun 2010 masih mengikuti polanya di periode sebelumnya. Status pekerjaan penduduk yang mendominasi adalah buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 332.660 orang (35,50%). Status pekerjaan penduduk yang bekerja terkecil adalah pekerja bebas di non pertanian sebanyak 40.377 orang (4,31%).

Status pekerjaan penduduk yang bekerja di daerah perkotaan terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai sebesar 178.309 orang (52,10%) dan berusaha sendiri sebesar 86.061 orang (25,15%). Sedangkan untuk daerah perdesaan, status pekerjaan penduduk yang bekerja sebagian besar adalah berusaha sendiri yaitu sebesar 156.792 (26,36%) dan buruh/karyawan/pegawai sebesar 154.351 orang (25,95%). Penduduk laki-laki yang bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 217.171 orang (33,28%) dan berusaha sendiri sebesar 177.307 orang (27,17%), sama halnya dengan penduduk laki-laki, penduduk perempuan yang bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 115.489 orang (40,61%) dan berusaha sendiri sebanyak 23,05% atau 65.546 orang.

Pengangguran tertinggi terjadi di Kota Manado yang merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Pada Tahun 2007, tingkat pengangguran terbuka Kota Manado sebesar 13,68% dan meningkat menjadi 15,38% Tahun 2009. Peningkatan ini terutama terjadi karena arus urbanisasi penduduk Sulawesi Utara dan juga migrasi pencari kerja dari provinsi lain yang tertarik dengan tingginya Upah Minimum Provinsi (UMP) dan perkembangan bisnis di Sulawesi Utara.

Meningkatnya jumlah pengangguran di kota membawa implikasi perlunya percepatan pembangunan pada kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Utara. Ini dimaksudkan untuk mereduksi tingkat pengangguran di kota dan kabupaten itu sendiri. Pembangunan yang dilakukan di kabupaten terutama diarahkan pada sektor pertanian, perkebunan,

peternakan, kehutanan, dan perikanan yang merupakan sektor yang banyak dimasuki oleh tenaga kerja di kabupaten.

2.1.5. Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam di Sulawesi Utara relatif besar namun pengelolaannya belum sepenuhnya memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, baik sumber daya hutan, sumber daya kelautan dan perikanan, sumber daya air, dan sebagainya. Di lain pihak sumber daya panas bumi/geothermal relatif besar namun belum dimanfaatkan secara optimal, hanya pada beberapa lokasi saja.

Fenomena perubahan iklim memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap berbagai sektor kehidupan, seperti lingkungan hidup, kelautan perikanan, pertanian, kehutanan, infrastruktur, dan kesehatan. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain mitigasi dan adaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim tersebut, termasuk pengembangan kerjasama, penguatan kelembagaan dan penetapan peraturan perundang-undangan. Dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, sektor kehutanan melakukan upaya-upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta pengamanan kawasan hutan.

Upaya-upaya tersebut dilakukan secara terpadu melibatkan instansi terkait, seperti Dinas Kehutanan, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan, Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah, dan masyarakat setempat. Namun upaya-upaya tersebut masih perlu ditingkatkan dengan langkah strategis pembentukan tim terpadu pengamanan hutan Sulawesi Utara, tim Pembina Rehabilitasi Hutan dan Lahan Sulawesi Utara, penyediaan sarana-prasarana pengamanan hutan dan penambahan personil polisi kehutanan.

2.1.6. Kerjasama Antar Daerah

2.1.6.1. Kerjasama Teluk Tomini

Kawasan Teluk Tomini merupakan kawasan yang mempunyai nilai ekonomi, sosial, dan ekologis/lingkungan yang sangat berarti bagi kelangsungan kehidupan masyarakat. Teluk Tomini merupakan kawasan andalan nasional, tetapi juga menjadi perhatian dunia internasional karena tipe ekosistem khas yang beranekaragaman, seperti mangrove, padang lamun, rumput laut, estuaria, delta, dan rawa pantai non bakau. Ekosistem-ekosistem tersebut sebagai penyangga kehidupan yang perlu dilindungi. Selain itu, ekosistem terumbu karang yang ada di Teluk Tomini merupakan bagian dari "Segitiga Terumbu Karang" (*Coral Triangle*) yang memiliki keragaman karang tertinggi di dunia. Secara wilayah administrasi, Teluk Tomini merupakan teluk terbesar di daerah Khatulistiwa, dimana perairan Teluk Tomini meliputi tiga provinsi yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Kesepakatan bersama 3 Gubernur (Gubernur Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo) Nomor 660/05/blhd-g-st/2009, Nomor 100/1186/sekr-blh, dan Nomor 06/hkm-nk/v/2009 Tanggal 13 Mei 2009, menjadi acuan dalam pengelolaan kawasan Teluk Tomini yang memuat empat kesepakatan yaitu:

1. Rencana strategis pengelolaan Teluk Tomini secara terpadu dan berkelanjutan sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah.
2. Pelaksanaan pengelolaan Teluk Tomini secara terpadu dan berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan strategi pengelolaan secara konsisten dan konsekuen.
3. Pelaksanaan pengelolaan Teluk Tomini secara terpadu dan berkelanjutan untuk melaksanakan koordinasi, integrasi, sinergitas program/kegiatan, dan evaluasi bersama.
4. Peningkatan alokasi anggaran untuk pengelolaan Teluk Tomini secara terpadu dan berkelanjutan melalui APBD ketiga provinsi, APBD kabupaten/kota, dukungan APBN, penganggaran dunia usaha, masyarakat serta kerjasama internasional.
5. Hal-hal yang lebih teknis akan disusun kesepakatan bersama oleh badan/dinas terkait dan perguruan tinggi di ketiga provinsi.

2.1.6.2. Kerjasama Provinsi-Provinsi se-Sulawesi

Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) didirikan oleh 4 (empat) Gubernur se-Sulawesi Tahun 2000, dimana isu keamanan menjadi fokus utama program pembangunan ekonomi di wilayah Sulawesi. Salah satu program utama BKPRS adalah memfasilitasi kerjasama regional, nasional, internasional dalam menopang pembangunan ekonomi wilayah Sulawesi sebagai bagian dari pengembangan ekonomi nasional. Kedepan diharapkan BKPRS menjadi *one stop agency* untuk mengurangi terjadinya tumpang tindih sejumlah regulasi yang dibuat baik ditingkat kabupaten/kota sampai ke tingkat provinsi dalam rangka meningkatkan investasi.

2.1.6.3. Kerjasama Regional

a. Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)

Kerjasama *Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area* (BIMP-EAGA) dibentuk secara resmi pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ke-1 di Davao City, Filipina pada Tanggal 26 Maret 1994. BIMP-EAGA adalah kerjasama sub-regional yang bertujuan untuk meningkatkan *Trade Tourism and Investment (TTI)*. Pertemuan tertinggi BIMP-EAGA adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) kemudian Pertemuan Tingkat Menteri, Pertemuan Tingkat Pejabat Senior, dan pertemuan teknis di bawah SOM. Pertemuan teknis di bawah SOM terdiri atas *cluster* dan *task force*, yaitu: (a) *Cluster on Natural Resources Development*, diketuai oleh Indonesia (b) *Cluster on Transport, Infrastructure, and Information, Communication, and Technology Development (TIICTD)*, diketuai oleh Brunei Darussalam (c) *Cluster on Joint Tourism Development (JTD)*, diketuai Malaysia (d) *Cluster on Small and Medium Enterprises Development (SMED)*, diketuai oleh Filipina. (e) *Task Force on Customs, Immigration, Quarantine, and Security*, diketuai oleh Filipina.

b. Coral Triangle Initiative (CTI)

CTI merupakan tindak lanjut dari gagasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan di sela-sela *Convention on Biological Diversity (CBD)* ke-8 di Brazil Tahun 2006 didasari kenyataan bahwa perairan Indonesia dan kawasan di sekitarnya merupakan

habitat bagi *highest level of coral diversity* (setidaknya terdapat 5000 lebih jenis coral), sehingga dengan sendirinya memiliki kekayaan sumber daya hayati yang besar. CTI dikembangkan untuk membentuk mekanisme kerjasama antar negara-negara yang memiliki tujuan dan pandangan yang sama mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan mempertahankan kesinambungan sumberdaya alam laut di kawasan *Coral Triangle* yang mencakup 6 negara: Indonesia, Filipina, Malaysia, Timor Laste, PNG, dan Kepulauan Solomon.

2.1.6.4. Kerjasama Provinsi-Provinsi Kepulauan

Provinsi-provinsi kepulauan memiliki lembaga kerjasama yaitu Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan dimana terdiri dari Provinsi: Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku Utara, dan Maluku. Sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Ternate Tahun 2008 tentang masalah yang berkaitan dengan Kerjasama Antar Daerah, maka disepakati hal-hal yang meliputi peningkatan dan pengembangan komoditas rumput laut, percepatan pembentukan Dewan, dan Badan Pengelola Pelabuhan di masing-masing pelabuhan di daerah untuk efisiensi pengelolaan pelabuhan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, pengembangan industri pariwisata (wisata bahari, *community based ecotourism*, keunggulan lokal), dan penyiapan paket wisata bersama, pengembangan, dan pengelolaan kawasan konservasi laut daerah (KKLD) dan ekosistem laut lainnya, penyusunan rencana zonasi dan aksi masing-masing daerah, sertakomitmen melaksanakan program dan pembiayaan yang telah disepakati bersama.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah dapat ditunjukkan dengan Indikator Pendapatan Perkapita.

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Sulawesi Utara pada periode 2006-2010 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hasil analisis pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan disajikan dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB, 2006-2010
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi Sulawesi Utara (dalam jutaan)

Sektor	2006		2007		2008		2009		2010	
	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
Pertanian	2.936.917,91	21,15	3.159.200,48	21,37	3.243.371,70	20,40	3.310.516,45	19,30	3.694.440,51	20,11
Pertambangan & penggali	716.509,51	5,16	779.050,46	5,27	852.228,48	5,36	899.070,28	5,24	927.366,62	5,05

an										
Industri pengolahan	1.099.802,06	7,92	1.169.323,16	7,91	1.241.766,07	7,81	1.328.958,78	7,75	1.415.109,94	7,70
Listrik, gas & air bersih	105.231,72	0,76	111.181,60	0,75	119.550,89	0,75	137.345,85	0,80	144.245,88	0,79
Konstruksi	2.188.319,09	15,76	2.354.366,10	15,92	2.607.061,25	16,39	2.766.025,90	16,13	2.824.275,70	15,37
Perdagangan, hotel & restoran	2.050.083,53	14,76	2.211.281,50	14,96	2.451.885,96	15,42	2.753.649,43	16,06	2.995.130,16	16,30
Pengangkutan & komunikasi	1.620.920,72	11,67	1.717.734,10	11,62	1.907.022,00	11,99	2.229.104,35	13,00	2.408.151,48	13,11
Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan	924.081,73	6,65	976.954,21	6,61	1.048.649,81	6,59	1.128.037,44	6,58	1.205.337,88	6,56
Jasa-jasa	2.244.868,56	16,17	2.305.576,23	15,59	2.430.537,10	15,28	2.596.916,02	15,14	2.757.142,95	15,01
PD RB	13.886.734,82	100,00	14.784.667,83	100,00	15.902.073,26	100,00	17.149.624,49	100,00	18.371.201,12	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2010.

PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2000 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2006, capaian PDRB tercatat sebesar Rp.13,886 triliun dan meningkat menjadi Rp.18,371 triliun Tahun 2010. Sektor yang memberi kontribusi terbesar PDRB atas dasar harga konstan Sulawesi Utara adalah sektor pertanian. Rata-rata kontribusi sektor pertanian dalam kurun waktu Tahun 2006-2010 adalah 20,47%. Demikian juga dengan nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB atas dasar harga berlaku Sulawesi Utara pada periode 2006-2010 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hasil analisis pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku disajikan dalam Tabel 2.6.

Tabel 2.6.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB, 2006-2010
Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sulawesi Utara (dalam jutaan)

Sektor	2006		2007		2008		2009		2010	
	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
Pertanian	4.460.899,01	20,40	4.920.681,43	19,83	5.673.669,52	19,77	6.231.927,74	18,87	7.184.579,03	19,50
Pertambangan & penggalian	968.264,07	4,43	1.090.207,76	4,39	1.290.981,87	4,50	1.409.736,85	4,27	1.483.379,20	4,03
Industri pengolahan	1.915.048,64	8,76	2.126.127,40	8,57	2.318.114,74	8,08	2.664.225,23	8,07	2.972.700,68	8,07
Listrik, gas, & air bersih	194.809,76	0,89	207.040,31	0,83	232.171,38	0,81	270.826,60	0,82	287.980,74	0,78
Konstruksi	3.372.026,53	15,42	4.307.857,36	17,36	5.217.819,59	18,18	5.824.720,62	17,63	6.079.577,42	16,50
Perdagangan, hotel, & restoran	3.279.607,28	15,00	3.862.029,88	15,56	4.660.926,57	16,24	5.505.248,25	16,67	6.248.751,11	16,96
Pengangkutan & komunikasi	2.695.982,58	12,33	2.906.650,41	11,71	3.287.285,31	11,45	3.792.046,43	11,48	4.232.408,76	11,49
Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan	1.302.223,62	5,95	1.431.588,93	5,77	1.611.053,52	5,61	1.900.698,08	5,75	2.247.611,84	6,10
Jasa-jasa	3.678.9	16,8	3.968.23	15,9	4.405.7	15,	5.434.1	16,	6.097.8	16,

	67,98	2	2,59	9	33,74	35	80,01	45	03,86	55
PD RB	21.867. 829,47	100, 00	24.820. 416,07	100 ,00	28.697. 756,23	100 ,00	33.033. 609,80	100 ,00	36.834. 792,63	10 0,0 0

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2010.

Nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2006, capaian PDRB atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp.21,867 triliun dan meningkat menjadi Rp.36,834 triliun Tahun 2010.

Tabel 2.7.

**Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB, 2006-2011
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Provinsi Sulawesi Utara**

No	Sektor	2006		2007		2008		2009		2010	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian	96,9 7	100, 54	94,2 4	101, 58	93,9 8	96,9 6	89,6 8	91,7 7	92,7 2	95,6 0
2	Pertambangan & penggalian	59,5 7	69,4 2	59,0 9	70,8 9	60,5 2	72,1 0	57,4 2	70,5 3	54,1 8	67,9 1
3	Industri pengolahan	106, 46	96,2 7	104, 13	96,1 4	98,1 9	94,9 3	98,0 4	94,2 0	98,1 1	93,6 4
4	Listrik, gas & air bersih	126, 28	107, 42	118, 25	106, 60	114, 68	106, 57	116, 22	113, 53	110, 83	111, 30
5	Konstruksi	112, 82	115, 29	126, 98	116, 51	133, 03	119, 95	129, 01	118, 00	120, 76	112, 48
6	Perdagangan, hotel, & restoran	113, 50	111, 72	117, 75	113, 19	122, 91	116, 68	126, 12	121, 51	128, 38	123, 38
7	Pengangkutan & komunikasi	117, 85	111, 58	111, 95	111, 06	109, 50	114, 64	109, 73	124, 25	109, 84	125, 31
8	Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan	72,4 7	80,9 8	70,1 9	80,4 2	68,3 2	80,2 5	70,0 2	80,0 5	74,2 6	79,8 5
9	Jasa-jasa	98,7 3	94,8 7	93,8 3	91,5 2	90,1 0	89,7 0	96,5 4	88,8 7	97,1 5	88,0 8

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2011.

Perkembangan kontribusi sektor dalam PDRB untuk harga berlaku yang tertinggi terjadi Tahun 2008 yaitu sektor konstruksi dan bangunan sebesar 133,03% dan pada harga

konstan yang tertinggi terjadi Tahun 2010 yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 125,31%.

Selanjutnya perkembangan kontribusi sektor untuk harga berlaku yang terendah terjadi Tahun 2010 yaitu sektor pertambangan dan penggalian sebesar 54,18% dan pada harga konstan yang terendah juga terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar 67,91%. Sektor-sektor lainnya selang Tahun 2006-2010 perkembangan kontribusinya berkisar antara 70%-100%. Perkembangan kontribusi sektor dalam PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan Sulawesi Utara Tahun 2006-2010 dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Pertumbuhan kontribusi sektor dalam PDRB untuk harga berlaku yang tertinggi terjadi Tahun 2007 yaitu sektor konstruksi dan bangunan sebesar 12,50% dan pada harga konstan yang tertinggi terjadi Tahun 2009 yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 8,38%. Selanjutnya perkembangan kontribusi sektor untuk harga berlaku yang terendah terjadi pada Tahun 2010 yaitu sektor konstruksi sebesar -6,40% dan pada harga konstan yang terendah juga terjadi pada sektor jasa-jasa sebesar 5,51%.

Tabel 2.8.
Pertumbuhan Kontribusi Sektor dalam PDRB, 2006-2010
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk), Provinsi Sulawesi Utara

No	Sektor	2006		2007		2008		2009		2010	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian	- 0,63	- 2,20	-2,81	1,03	- 0,27	- 4,54	- 4,57	- 5,35	3,39	4,18
2	Pertambangan & penggalian	3,17	1,80	-0,79	2,12	2,40	1,70	- 5,13	- 2,17	- 5,63	- 3,71
3	Industri pengolahan	- 4,89	0,52	-2,18	- 0,13	- 5,70	- 1,26	0,15	- 0,76	0,06	- 0,60
4	Listrik, gas & air bersih	0,17	0,81	-6,36	- 0,76	- 3,01	0,02	1,33	6,52	- 4,64	- 1,96
5	Konstruksi	- 4,82	0,36	12,50	1,05	4,75	2,95	- 3,02	- 1,62	- 6,40	- 4,68
6	Perdagangan, hotel & restoran	1,40	1,32	3,75	1,31	4,38	3,08	2,61	4,13	1,79	1,54
7	Pengangkutan & komunikasi	- 0,64	0,69	-5,01	- 0,46	- 2,18	3,21	0,21	8,38	0,09	0,85
8	Keuangan, sewa & jasa Perusahaan	6,53	3,99	-3,14	- 0,69	- 2,66	- 0,20	2,45	- 0,25	6,05	1,54
9	Jasa-jasa	4,53	- 5,51	-4,96	- 3,53	- 3,97	- 1,98	7,15	- 0,92	0,63	- 0,25
	PDRB	-	-	-2,81	1,03	-	-	-	-	3,39	4,18

		0,63	2,20			0,27	4,54	4,57	5,35		
--	--	------	------	--	--	------	------	------	------	--	--

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2011.

Matriks kontribusi terhadap PDRB total pertumbuhan ekonomi sub sektoral Sulawesi Utara, Tahun 2005-2009 dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4.
Matriks Kontribusi Terhadap PDRB Total Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektoral
Provinsi Sulawesi Utara, 2005-2009

		Kontribusi terhadap PDRB Total (%)		
Pertumbuhan Ekonomi (%)	Tinggi	Rendah	Tinggi	
		Kuadran I	Kuadran II	6.86
		Penggalian (3.78:7.74)	Bangunan (15.98:7.29)	
		Listrik (0.60:10.80)	Perdagangan Besar & Eceran (12.22:8.46)	
		Hotel (1.52:16.47)	Pengangkutan (10.62:9.23)	
		Restoran (1.44:6.86)		
		Komunikasi (1.40:13.64)		
		Bank (3.33:7.55)		
		Lembaga Keuangan tanpa Bank (0.34:8.77)		
		Jasa Perusahaan (0.86:8.87)		
	Rendah	Kuadran IV	Kuadran III	
		Peternakan dan Hasil-hasilnya (2.06:6.67)	Perikanan (4.50:4.60)	4.50
		Kehutanan (0.32:-0.59)	Industri Tanpa Migas (7.82:6.18)	
		Pertambangan tanpa Migas (1.3:-0.28)	Tanaman Bahan Makanan (6.36:4.99)	
		Air Bersih (0.16:4.52)	Tanaman Perkebunan (7.61:2.85)	
		Sewa Bangunan (2.04:6.09)	Pemerintahan Umum (10.02:3.49)	
			Swasta (4.71:6.79)	

Sumber: Diolah dari Data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2010.

Keterangan :Angka pertama dalam kurung adalah kontribusi terhadap PDRB (%), angka kedua adalah pertumbuhan ekonomi (%)

Pada Gambar 2.4 terdapat empat kuadran, yaitu: (1) kuadran I memuat sub-sub sektor dengan pertumbuhan di atas rata-rata namun kontribusinya terhadap total PDRB atas dasar harga konstan di bawah rata-rata; (2) kuadran II memuat sub-sub sektor dengan pertumbuhan dan kontribusi terhadap total PDRB atas dasar harga konstan di atas rata-rata; (3) kuadran III memuat sub-sub sektor yang pertumbuhannya rendah namun kontribusinya terhadap total PDRB atas dasar harga konstan di atas rata-rata; dan (4) kuadran IV merupakan kuadran yang memuat sub-sub sektor dengan pertumbuhan ekonomi dan kontribusi terhadap total PDRB atas dasar harga konstan di bawah rata-rata.

Matriks kontribusi PDRB ini memperlihatkan, bahwa sub sektor bangunan, perdagangan besar dan eceran, serta pengangkutan yang berada pada kuadran II merupakan sub-sub sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB atas dasar harga konstan Sulawesi Utara secara keseluruhan. Di sisi lain, sub-sub sektor yang ditekuni kebanyakan masyarakat Sulawesi Utara, yaitu sub sektor tanaman bahan makanan, perkebunan, dan perikanan masih berada di kuadran III dengan kontribusi relatif besar terhadap PDRB namun pertumbuhannya rendah. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara ke tingkat lebih tinggi, sub-sub sektor ini perlu lebih diberdayakan lewat suatu kesatuan dengan pengembangan agroindustri.

Pada Tahun 2008 Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan daerah dengan PDRB atas dasar harga konstan per kapita terendah dan yang tertinggi adalah Kota Bitung. Selanjutnya Tahun 2009, Kota Kotamobagu merupakan daerah dengan PDRB atas dasar harga konstan terendah dan yang tertinggi adalah Kota Manado. Gambaran PDRB atas dasar harga konstan per kapita dari kabupaten/kota di Sulawesi Utara. Perbedaan PDRB atas dasar harga konstan per kapita yang cukup tajam antar daerah di Sulawesi Utara menunjukkan masih adanya kesenjangan pembangunan antar kabupaten/kota. PDRB atas dasar harga konstan per kapita terendah terjadi pada daerah-daerah yang didominasi oleh sektor pertanian, sedangkan yang tertinggi terjadi di daerah perkotaan.

2.2.1.2. Laju Inflasi

Salah satu indikator utama keberhasilan pemerintah dalam mengatur perekonomiannya dapat terlihat dari kemampuan pemerintah dalam mengendalikan kenaikan harga barang dan jasa di wilayahnya. Tabel 2.9 memperlihatkan perkembangan laju Inflasi di Sulawesi Utara menunjukkan pola yang dinamis dan fluktuatif dari Tahun 2005-2010, dengan angka inflasi tertinggi terjadi Tahun 2005 sebesar 18,73%, hal ini terjadi karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak sehingga memicu kenaikan harga-harga barang dan jasa di pasar. Selanjutnya, Tahun 2006 angka inflasi turun menjadi 5,09% dan Tahun 2007 mengalami peningkatan menjadi 10,13% kemudian turun kembali menjadi 9,71% Tahun 2008. Tahun 2009 angka inflasi menyentuh level terendahnya pada angka 2,31%. Namun, Tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi 6,28%.

Tabel 2.9
Inflasi Provinsi Sulawesi Utara, 2005-2010

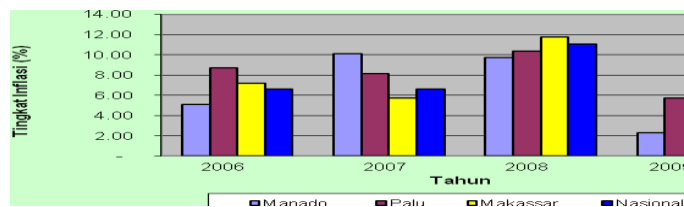
Tahun	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Inflasi	18.73	5.09	10.13	9.71	2.31	6.28

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2011.

Periode Tahun 2006-2009, tingkat inflasi Sulawesi Utara relatif lebih rendah dibanding Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan nasional, kecuali untuk Tahun 2007. Secara rata-rata, tingkat inflasi Sulawesi Utara selama empat tahun tersebut tercatat 6,81%, sedangkan Sulawesi Tengah sebesar 8,24%, Sulawesi Selatan sebesar 7,03 %, dan nasional sebesar 6,76%. selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Relatif rendahnya inflasi di Kota Manado mengindikasikan adanya kestabilan harga yang relatif lebih baik dibanding dua kota lainnya, dan bahkan nasional. Kestabilan harga terutama disebabkan semakin banyaknya pelaku bisnis dalam bidang perdagangan di Sulawesi Utara, yang memicu persaingan harga sehingga harga bisa terkendali. Selain itu, perbaikan dan penambahan infrastruktur perhubungan telah memperlancar distribusi barang dan jasa.

Gambar 2.5.
Tingkat Inflasi Sulawesi Utara,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nasional, 2006-2009



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2010.

Rendahnya inflasi di Sulawesi Utara menyebabkan inflasi tidak terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat setempat. Namun, tantangan yang akan dihadapi oleh Sulawesi Utara di masa depan adalah bagaimana menekan harga barang dan jasa di wilayah kepulauan terkait, serta masih adanya masalah infrastruktur perhubungan di daerah-daerah terpencil.

2.2.1.3. Perkembangan Investasi

Perkembangan investasi di Sulawesi Utara dapat dilihat dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada Tahun 2006 sebesar 4,12 triliun dan meningkat menjadi 9,45 triliun pada Tahun 2010 atau meningkat sebesar 56,40%.

Tabel 2.10.
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Provinsi Sulawesi Utara, 2006-2010

Tahun	2006	2007	2008	2009	2010
PMTB (triliun)	4.12	5.52	7.46	8.69	9.45

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2011.

2.2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara dari Tahun 2005-2010 menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun dimana Tahun 2005, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara berada pada kisaran angka 4,9%, yang kemudian naik menjadi 6,18% Tahun 2006. Selanjutnya Tahun 2007 kembali terjadi kenaikan mencapai angka 6,47% dan kenaikan yang cukup tinggi terjadi Tahun 2008 dan 2009 yang menyentuh angka masing-masing 7,56% dan 7,85%, jauh melebihi rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5%. Kemudian Tahun 2010 sedikit mengalami penurunan menjadi 7,12%.

Tabel 2.11.
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara, 2005-2010

Tahun	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Pertumbuhan Ekonomi	4.90	6.18	6.47	7.56	7.85	7.12

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2011.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang relatif tinggi pada beberapa tahun terakhir ini terutama dipicu oleh bertambahnya infrastruktur dasar dari pemerintah dan infrastruktur perdagangan dari kalangan swasta. Bertambahnya infrastruktur-infrastruktur tadi setidaknya merupakan dampak dari pemekaran wilayah administrasi pemerintahan dan terselenggaranya even internasional seperti *World Ocean Conference* dan *Coral Triangle Summit* di Sulawesi Utara Tahun 2009.

Pertumbuhan infrastruktur dasar dan perdagangan yang cukup signifikan menjadi modal utama untuk pembangunan ekonomi Sulawesi Utara lebih lanjut karena menjadi daya tarik investasi Sulawesi Utara di masa mendatang. Namun demikian, tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur adalah penyediaan listrik secara memadai untuk mengantisipasi peningkatan investasi di masa mendatang. Tantangan lainnya muncul sebagai konsekuensi Sulawesi Utara sebagai provinsi kepulauan, yaitu pembangunan infrastruktur di pulau terpencil sulit untuk mencapai skala ekonomi yang diharapkan.

2.2.1.5. Ketimpangan Kemakmuran dan Pemerataan Pendapatan

Proses distribusi perlu dicermati mengingat kegagalan proses ini akan berdampak pada gejala sosial karena ketimpangan tersebut akan direspon sebagai ketidakadilan pada masyarakat golongan bawah. Untuk melihat ketimpangan/pemerataan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang sering dipakai adalah koefisien gini. Nilai koefisien ini berkisar antara 0(nol) hingga 1(satu). Semakin mendekati angka nol maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin merata atau sebaliknya. Koefisien gini penduduk Sulawesi Utara Tahun 2005-2010 terlihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12.
Koefisien Gini Provinsi Sulawesi Utara, 2005-2010

Tahun	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Koefisien Gini	0.32	0.32	0.32	0.35	0.35	0.32

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, 2010.

Berdasarkan Tabel 2.12 koefisien gini Sulawesi Utara dari Tahun 2005-2010 berada pada kisaran angka 0,32–0,35. Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan penduduk berfluktuatif di rentang angka indeks yang tidak jauh. Tahun 2005-2007 angka indeks koefisien gini relatif tidak berubah dan tetap di angka 0,32. Namun, di Tahun 2008-2009 sedikit mengalami peningkatan ketimpangan pendapatan yang berada pada angka 0,35. Selanjutnya Tahun 2010 angka indeks ini mengalami sedikit perbaikan kembali pada angka 0,32.

2.2.1.6. Ketimpangan Regional

Tingkat pemerataan/ketimpangan antara kabupaten/kota menggunakan nilai Indeks Williamson (IW). Nilai Indeks Williamson berkisar antara 0(nol) hingga 1(satu). Semakin mendekati angka satu artinya distribusi antar kabupaten/kota semakin tidak merata/semakin timpang atau sebaliknya.

Tabel 2.13.
Indeks Williamson Provinsi Sulawesi Utara, 2005-2009

Tahun	2005	2006	2007	2008	2009
Indeks Williamson	0.7523	0.7538	0.7561	0.7592	0.7613

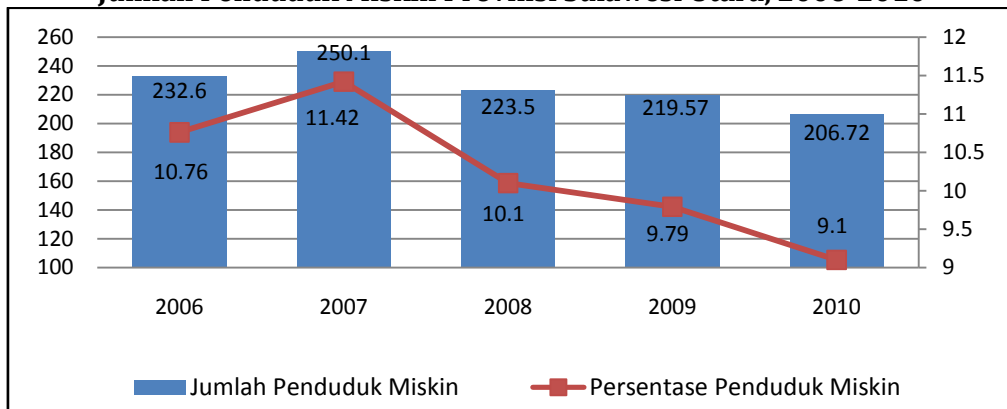
Sumber: BI Manado, 2010.

Berdasarkan Tabel 2.13 tampak bahwa nilai indeks Williamson berkisar pada angka indeks sebesar 0,7. Hal ini memperlihatkan bahwa ketimpangan antar daerah di Sulawesi Utara cukup tinggi. Tahun 2005 angka indeks menunjukkan 0,7523 dan Tahun 2006 naik menjadi 0,7538, di Tahun 2007 meningkat menjadi 0,7561. Selanjutnya pada Tahun 2008 juga meningkat menjadi 0,7592 dan Tahun 2009 terus mengalami peningkatan menjadi 0,7613. Secara keseluruhan selama periode Tahun 2005-2009 terlihat indeks Williamson meningkat secara perlahan sehingga dapat dikatakan bahwa ketimpangan antar daerah juga cenderung semakin membesar tiap tahunnya. Hal ini perlu diperhatikan agar pembangunan antar daerah perlu disinergikan, sehingga dapat menekan dan mengurangi ketimpangan antar daerah dimasa yang akan datang.

2.2.1.7. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin Tahun 2009 sebesar 219,57 ribu (9,79%). Terjadi penurunan jumlah maupun persentase penduduk miskin dibandingkan Tahun 2008 yang berjumlah 223,5 ribu (10,10%). Perkembangan angka kemiskinan ini selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 2.6. Penurunan ini lebih disebabkan oleh turunnya jumlah penduduk miskin di kawasan perdesaan. Jika pada posisi Tahun 2008 jumlah penduduk miskin di perdesaan berjumlah Rp.150,9 (12,04%), Tahun 2009 jumlah berkurang cukup signifikan menjadi Rp.140,31 (11,05%). Sebaliknya, di perkotaan jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan, jika pada Tahun 2008 jumlahnya tercatat Rp.72,7 ribu (7,56%), pada periode Tahun 2009 jumlahnya meningkat mencapai Rp.79,25 (8,14%). Namun, tingkat kemiskinan Sulawesi Utara selalu dibawah angka nasional.

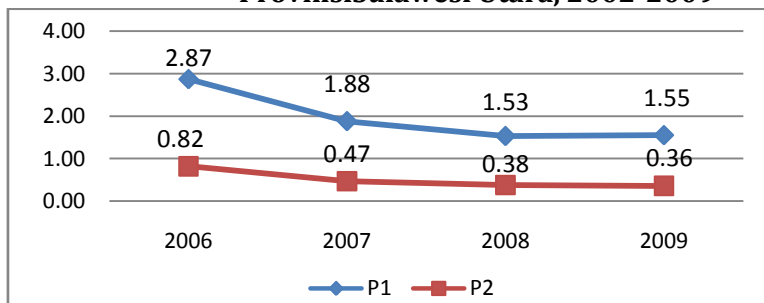
Gambar 2.6.
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Utara, 2006-2010



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2011.

Selain itu, berdasarkan pada Gambar 2.7 terlihat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) pada periode 2006–2009 mengalami kecenderungan fluktuasi. Pada periode Tahun 2006–2009, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) mengalami penurunan dari posisi 2,87 menjadi 1,55 di Tahun 2008 dan naik Tahun 2009 menjadi 1,55. Keadaan penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin mengecil, yang artinya semakin rendah nilai indeks, maka semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Begitu pula dengan indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) periode 2006–2009 dapat dilihat pada Gambar 2.7 mengalami penurunan.

Gambar 2.7.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Provinsi Sulawesi Utara, 2002-2009



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2010.

Pada periode 2006–2009, Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) mengalami penurunan secara perlahan juga turun dari 0,82 menjadi 0,36 di Tahun 2009. Kecenderungan menurun dari waktu ke waktu ini merupakan indikasi bahwa dalam periode tersebut ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin secara umum semakin berkurang. Ini menunjukkan

telah terjadi perbaikan dalam pengentasan kemiskinan dan tingkat kemiskinan bisa saja tidak turun tapi tingkat keparahannya berkurang. Namun pada Tahun 2009 dan Tahun 2008, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) cenderung tidak berubah. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung sama dengan kondisi periode yang lalu mendekati garis kemiskinan. Begitu pula dengan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskinnya. Hal ini menunjukkan program penanggulangan kemiskinan daerah yang ada belum mampu secara signifikan menurunkan angka indeks ini sehingga perlu adanya perbaikan kebijakan.

Perlu adanya kebijakan berkelanjutan untuk mengurangi angka kemiskinan, melalui pendekatan dari sisi keluarga miskin dengan pemetaan sosial (*social mapping*). Pemetaan dilakukan di wilayah pemerintahan yang paling rendah minimal di tingkat kecamatan, sehingga akan mendapatkan data riil keadaan keluarga miskin. Informasi yang diperoleh menjadi dasar penentuan program-program penanggulangan kemiskinan.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Keberhasilan di bidang pendidikan dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu Angka Melek Huruf, Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar SD, SMP, dan SMA serta Angka Partisipasi Murni SD, SMP, dan SMA. Angka melek huruf di Sulawesi Utara Tahun 2009 sebesar 99,40%, yang berarti bahwa proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang tidak bisa baca tulis, hanya sebesar 0,60%.

Tabel 2.14.
Komponen Penyusun IPM Provinsi Sulawesi Utara, 2008

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup	Angka Melek Huruf	Rata-rata Lama sekolah	Pengeluaran per Kapita (000 Rp)
Kab.Bolaang Mongondow	71.19	98.22	7.39	608.55
Kab.Minahasa	72.18	99.52	8.80	619.74
Kab.Kep.Sangihe	72.50	98.50	7.70	628.55
Kab.Kep.Talaud	71.29	99.30	8.47	623.35
Kab.Minahasa Selatan	71.89	99.40	8.54	610.86
Kab.Minahasa Utara	72.20	99.68	9.07	622.71
Kab.Bolaang Mongondow Utara	69.45	98.30	7.10	620.13
Kab.Kep.Siau Tagulandang Biaro	69.77	99.38	8.08	605.77
Kab.Minahasa Tenggara	68.31	99.61	8.24	623.27
Kota Manado	72.37	99.83	10.58	631.88
Kota Bitung	70.20	99.03	9.20	628.47
Kota Tomohon	72.16	99.83	9.60	621.61
Kota Kotamobagu	71.35	99.49	8.85	620.26
Sulawesi Utara	72.01	99.31	8.80	625.58

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2009.

Berdasarkan Tabel 2.14 komponen penyusun IPM, angka harapan hidup rata-rata masyarakat Sulawesi Utara Tahun 2008 adalah 72,01 tahun, angka melek huruf rata-rata

adalah 99,31%, angka rata-rata lama sekolah adalah 8,80 tahun, dan pengeluaran per kapita rata-rata adalah Rp.625.580. Secara keseluruhan, IPM Sulawesi Utara Tahun 2009 menyentuh point 75,16 menempati rangking kedua nasional sesudah DKI Jakarta, dan jauh lebih tinggi dari angka nasional yang menempati point 71,17.

Selanjutnya berkaitan dengan IPM, jika dilihat prestasi kinerja perempuan dan laki-laki, maka dapat dilihat bahwa perempuan masih tertinggal. Hal ini dapat dilihat dari indeks Pembangunan Gender (IPG), dimana IPG Sulawesi Utara pada tahun 2009 adalah 67,91. Jika dilihat komponen IPG, rata-rata lamanya sekolah pada laki-laki adalah 9,06 tahun sedangkan perempuan adalah 8,68 tahun. Sementara itu sumbangan pendapatan keluarga dari laki-laki 73,15% sedangkan perempuan adalah 26,85%.

2.2.2.2. Kepemilikan Tanah

Kepemilikan tanah dalam kurun waktu Tahun 1960-2010 diperlihatkan melalui Rekapitulasi Tanah Terdaftar di Sulawesi Utara seperti dalam Tabel 2.15.

Tabel 2.15.
Rekapitulasi Tanah Terdaftar, 2011

No.	Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota	Jumlah Semua		Tanah Terdaftar		Tanah Belum Terdaftar	
		Bidang	Luas (Ha)	Bidang	Luas (Ha)	Bidang	Luas (Ha)
1.	Kota Manado	200,000	14,876.00	90,422	1,808.70	109,578	13,067.30
2.	Kota Bitung	91,000	18,202.00	43,078	7,281.00	47,922	10,921.00
3.	Kota Tomohon	41,218	14,710.80	8,376	1,897.20	32,842	12,813.60
4.	Kota Kotamobagu	24,394	2,949.00	18,761	2,268.78	5,633	680.22
5.	Kab. Bolaang Mongondow	303,798	146,266.00	36,252	17,756.76	267,546	128,509.24
6.	Kab. Bolaang Mongondow Utara	64,906	34,754.00	7,739	4,147.87	57,167	30,606.13
7.	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	31,982	43,027.00	4,811	6,337.26	27,171	36,689.74
8.	Kab. Bolaang Mongondow Timur	96,216	43,806.00	7,004	3,675.09	89,212	40,130.91
9.	Kab. Minahasa**	96,460	116,299.12	-	-	96,460	116,299.12
10.	Kab. Minahasa Utara	79,906	99,883.00	20,357	58,795.50	59,549	41,087.50
11.	Kab. Minahasa Selatan	75,262	148,943.86	300	69,081.37	74,962	79,862.49
12.	Kab. Minahasa Tenggara**	52,117	73,062.88	-	-	52,117	73,062.88
13.	Kab. Kepulauan Talaud	52,946	125,092.00	198	4,675.87	52,748	120,416.13
14.	Kab. Kepulauan Sangihe	47,686	73,697.00	688	47,943.50	46,998	25,753.50

15.	Kab. Kepulauan Siau-Tagulandang-Biaro*						
	Sulawesi Utara	1,257,891	955,568.66	237,986	225,668.90	1,019,905	729,899.76

Sumber : Kantor BPN Provinsi Sulawesi Utara, Tahun 2011.

Ket: * Masih tergabung dengan Kab. Kepl. Sangihe

** Data belum masuk (tanah terdaftar)

- Dari Tabel 2.15 tampak bahwa luas tanah yang belum terdaftar (bersertifikat) jauh lebih luas.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.2.3.1. Seni Budaya

Budaya masyarakat Sulawesi Utara sangat dipengaruhi oleh karakter masyarakat yang terdiri dari: Suku Minahasa, Suku Sangihe, Suku Talaud, Suku Bolaang, dan Suku Mongondow. Masing-masing kelompok etnis tersebut masih terbagi pula dalam sub etnis yang memiliki bahasa daerah, tradisi, dan norma-norma kemasyarakatan yang khas serta diperkuat semangat Mapalus, Mapaluse, dan Moposad.

Dilihat dari unsur budaya bahasa, maka Sulawesi Utara memiliki tiga jenis bahasa daerah yaitu:

- Bahasa Minahasa (Toulour, Tombulu, Tonsea, Tontemboan, Tonsawang, Pasan, Ponosakan, dan Bantik).
- Bahasa Sangihe dan Talaud (Sangir Besar, Siau, dan Talaud).
- Bahasa Bolaang dan Mongondow (Boroko, Bolangitang, Bolaang, Mongondow, Bintauna, Kaidipang, Bolango, dan Bantik Mongondow).

Namun demikian Bahasa Indonesia adalah Bahasa Nasional yang digunakan dan dimengerti dengan baik oleh sebagian besar penduduk Sulawesi Utara. Agama yang dianut oleh penduduk di Provinsi Sulawesi Utara adalah Protestan, Katolik, Islam, Hindu, Budha, dan Konghucu. Seni Budaya di Sulawesi Utara cukup berkembang yang tersebar di masyarakat luas. Hal ini dikembangkan melalui program menggali, menginventarisasi keunggulan, dan keragaman seni budaya yang dikemas dalam pelaksanaan festival seni budaya berskala nasional dan internasional. Dikembangkan dengan kerjasama sektor terkait dan organisasi masyarakat. Indikator dari perkembangan seni budaya diperlihatkan pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16.

Indikator Perkembangan Seni dan Budaya Provinsi Sulawesi Utara, 2006-2009

Indikator	2006	2007	2008	2009
Benda Cagar Budaya	52	52	52	52
Juru Pelihara	57	57	57	57
Museum	1	1	1	1
Organisasi	105	120	120	120

Kesenian				
Seniman	232	310	310	310
Jenis Kesenian	14	20	20	20

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, 2010.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI telah menetapkan Sulawesi Utara sebagai salah satu dari lima destinasi wisata unggulan di Indonesia. Salah satu yang menjadi unggulan Sulawesi Utara adalah keunikan seni dan budaya daerah yang dimiliki, seperti Musik Kolintang, Musik Bambu, Tari Maengket, Tari Kabasaran, Tari Tuitan, Tari Wella, Tulude, Masamper, dsb. Dalam rangka melestarikan seni budaya daerah dan mengembangkannya sebagai daya tarik wisata, maka pemerintah membuat paket-paket wisata ataupun pertunjukan-pertunjukan seni budaya, seperti Festival Bunaken, pemilihan Nyong-Noni Sulawesi Utara, dll. Pelestarian seni budaya dan pengembangannya dilakukan bekerjasama dengan pihak-pihak swasta atau organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kepariwisataan. Selain itu, dilakukan perencanaan dan pembangunan museum atau pusat seni budaya daerah. Demikian pula peran tenaga-tenaga ahli dan kaum profesional di bidang kebudayaan dan pariwisata sangat diperlukan dimana mereka membutuhkan peningkatan kemampuan SDM dan penguasaan IPTEK. Hal ini akan menjadi sangat penting untuk pelestarian, pengembangan, dan promosi seni budaya daerah.

Adapun beberapa upaya pemerintah dalam mempromosikan pariwisata daerah Sulawesi Utara meliputi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah pada 2009, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, kerjasama berupa *Memorandum of Understanding* dengan Provinsi Bali (paket wisata, promosi pariwisata), pembuatan paket-paket wisata lokal, promosi seni budaya ke mancanegara berupa pertunjukan-pertunjukan lokal daerah yang dibawa ke pentas internasional, dan pembuatan *Branding* Sulawesi Utara yang representatif untuk diusung ke dunia Internasional.

2.2.3.2. Olah Raga

Salah satu bagian dari Pembinaan Pemuda yaitu melalui olahraga. Prestasi olahraga dalam berbagai even sudah cukup baik, namun masih perlu peningkatan kesadaran berolahraga dikalangan masyarakat luas, pembibitan olahraga, dan peningkatan jumlah ruang publik untuk olahraga yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan dan masyarakat luas. Diharapkan dengan peningkatan ruang publik untuk olahraga, pembibitan, dan penemuan bibit unggul daerah di bidang olahraga bisa membudayakan olah raga di masyarakat. Adapun permasalahan yang masih dihadapi di bidang olahraga adalah masih rendahnya budaya berolahraga di kalangan masyarakat, serta kurangnya pembibitan olahraga dan penyediaan ruang publik untuk berolahraga.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1. Pendidikan

Pendidikan tertinggi masyarakat Sulawesi Utara yang ditamatkan menurut tingkat pendidikan sampai Tahun 2008 terdiri dari tamatan SD sebesar 24,88%, diikuti oleh tamatan SMP sebesar 10,21% dan SMA sebesar 18,97%, dan yang terendah adalah tamatan S2/S3 sebesar 0,28%. Untuk meningkatkan angka-angka ini maka perlunya satu pemikiran bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak meski secara khusus pemerintah mendapatkan mandat untuk menyelenggarakan pendidikan. Oleh karenanya, peran institusi swasta baik BUMN, pihak swasta, maupun organisasi sosial sangat dibutuhkan untuk memajukan pendidikan di Sulawesi Utara. Dengan peran serta lembaga-lembaga terkait, diharapkan dapat membantu meringankan beban pemerintah guna memajukan pendidikan di wilayah ini. Saat ini, tidak sedikit institusi yang berperan aktif memajukan pendidikan melalui kegiatan *corporate social responsibility (CSR)*. Sebagai contoh: pihak Pertamina telah membangun satu unit gedung di Universitas Sam Ratulangi untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pihak pengembangan properti PT.Citraland yang membangun Sekolah Citra Kasih Citraland, dan Pengusaha Sulawesi Utara yang mendirikan Sekolah Internasional Lokon di Tomohon dan *Manado Internasional School*.

Kemampuan berbahasa Inggris di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi di hampir semua sekolah pada dasarnya masih perlu dikembangkan. Hal ini diakibatkan oleh beberapa hal diantaranya kemampuan guru yang seringkali kurang memadai untuk memenuhi tuntutan siswa terutama siswa-siswa yang punya kemampuan tinggi dalam berbahasa dan punya sarana belajar yang lebih canggih dari pada gurunya sendiri. Sistem belajar mengajar sering bersifat monoton, kurang variasi, dan kurang menarik sehingga siswa menjadi bosan, tidak tertarik untuk belajar. Di kelas, siswa seringkali hanya diberi teori-teori, kaidah-kaidah dan hukum-hukum bahasa, bukannya aplikasi kaidah-kaidah dan hukum-hukum itu dalam penggunaan praktisnya sehingga siswa tidak merasakan manfaatnya belajar bahasa Inggris. Beberapa sekolah bertaraf internasional seperti Sekolah Citra Kasih Citraland-Manado, SMA Lokon Tomohon dan *Manado International School* sudah menunjukkan standar internasional dalam hal kemampuan berbahasa Inggris. Sebagian guru pengajar di sekolah ini adalah *native speaker* yang didatangkan dari Inggris, Amerika, dan Australia.

Selanjutnya, pola perilaku anak yang mencerminkan karakter masyarakat yang berbudaya pada dasarnya dibangun dari dalam keluarga sebagai lingkungan pertama yang mendapat kesempatan membentuk karakter anak. Dalam hal ini diantaranya melalui perhatian, kasih sayang serta penerapan budi pekerti yang baik dari orang tua terhadap anaknya. Peran sekolah sebagai sarana pengajaran dan pendidikan turut mempengaruhi pula tingkat perkembangan budi pekerti seorang anak. Namun pengajaran budi pekerti di hampir semua sekolah di Sulawesi Utara belum diberikan secara mandiri, dalam arti masih terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Mata pelajaran yang dimaksud adalah Pendidikan Agama ataupun Pendidikan Pancasila, namun pada umumnya para pendidik jarang sekali

menyentuh mengenai pendidikan budi pekertinya, karena dalam mata pelajaran tersebut yang lebih sering diajarkan pada materi yang sifatnya kontekstual saja. Tahun 2011, kurikulum di tingkat sekolah dasar seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Utara mengadopsi program membangun tanpa korupsi sebagai bagian dari upaya membangun budi pekerti yang jujur, disiplin dan transparan. Program ini sudah mulai dilaksanakan di beberapa sekolah dalam bentuk *kantin kejujuran*.

Tenaga pendidik dan kependidikan seperti guru merupakan ujung tombak untuk hal tersebut, ironisnya nasib para guru kurang mendapat perhatian dari penyelenggara negara secara signifikan khususnya tenaga guru yang ditempatkan di daerah terpencil, daerah kepulauan, dan daerah perbatasan. Hal tersebut dapat diamati dari rendahnya kesejahteraan guru dan keluarganya. Di lain pihak, untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui pendidikan formal saat ini relatif sulit karena biaya pendidikan yang kian mahal.

a. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Kualitas pendidikan suatu daerah dapat dilihat salah satunya dari tingkat buta huruf atau melek huruf penduduk daerah tersebut. Data menunjukkan, di Sulawesi Utara terdapat beberapa kabupaten dan kota yang memiliki tingkat buta huruf di atas angka provinsi (Gambar 2.8), diantaranya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Tahun 2010 Angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang pendidikan SD/MI mencapai 116,15%, jenjang pendidikan SMP/MTs mencapai 99%, jenjang pendidikan MA/MA/ sederajat mencapai 99,15%. Sedangkan untuk Angka partisipasi Murni (APM) Tahun 2010 bagi jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat mencapai 99,15%, jenjang pendidikan SMP/MTs mencapai 93%, jenjang pendidikan SMA/MA/ sederajat mencapai 50%. sementara untuk APK SMP/MTs Tahun 2009 sebesar 91,01% untuk APK SMA/MA/SMK Tahun 2009 adalah sebesar 44,59%.

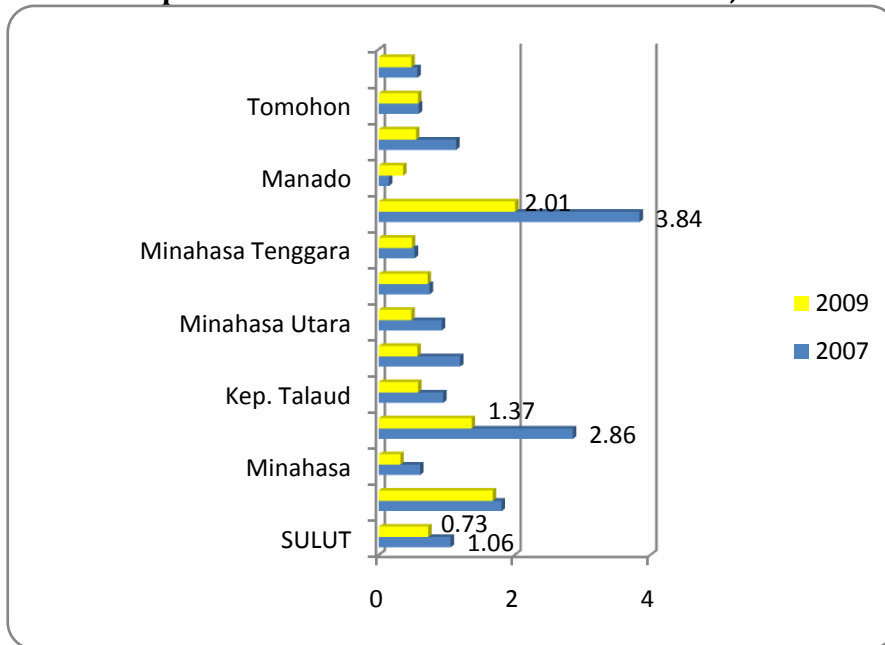
Tabel 2.17. Indikator Pembangunan Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, 2005-2010

Indikator	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Angka Partisipasi Kasar SD (%)	105.60	106.98	108.80	110.25	116.5	116.15
Angka Partisipasi Kasar SMP (%)	93.73	93.75	94.8	95	98.70	99
Angka Partisipasi Kasar SMA (%)	59.96	60.00	63.10	65.23	70.16	83
Angka Partisipasi Murni SD (%)	89.18	89.20	89.48	89.52	95.67	99.15
Angka Partisipasi Murni SMP	68.33	72.00	81.00	85.00	91.01	93
Angka Partisipasi Murni SMA	44.00	44.20	44.22	44.25	44.59	50.00

Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, 2011.

Bila dibandingkan dengan beberapa daerah lainnya di Kawasan Timur Indonesia, Sulawesi Utara memiliki angka literacy atau angka melek huruf yang paling tinggi (Gambar 2.8). Kualitas pendidikan juga dapat dilihat dari angka partisipasi sekolah (APS). Data menunjukkan Sulawesi Utara memiliki APS di atas angka nasional dan Sulawesi Selatan (Gambar 2.8).

Gambar 2.8.
Tingkat Buta Huruf Penduduk 10 Tahun Ke atas
Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sulawesi Utara, 2010



Sumber: Susenas , 2007 dan 2009.

Meskipun demikian, pemerintah melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, antara lain adanya rintisan sekolah standar nasional (SSN) dengan jumlah 245 sekolah dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dengan jumlah 22 sekolah. Saat ini Sulawesi Utara telah memiliki 4 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bersertifikasi ISO (9001:2000) dan 1 SMK bersertifikasi ISO (9001:2008). Demikian juga dengan Politeknik Negeri Manado yang telah bersertifikasi ISO (9001:2001), Politeknik Kesehatan di Manado, dan Politeknik Nusa Utara yang bertempat di KabupatenSangihe.

Tabel 2.18.
Banyak Siswa Putus Sekolah Provinsi Sulawesi Utara, 2011

Tahun	SD	SMP	SMU	Kejuruan	Madrasah Ibtidaiyah	Madrasah Tsanawiyah	Madrasah Aliyah
2003/2004	1.246	1.876	1.156	5	4	72	34
2004/2005	881	1.561	847	761	104	36	39
2005/2006	556	1.344	746	615	15	81	1
2006/2007	584	1.016	989	568	12	60	28

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, 2011.

Peningkatan kualitas pendidikan menunjukkan kemajuan seiring dengan naiknya belanja pendidikan Sulawesi Utara Tahun 2005-2009, seperti pada Tabel 2.19 mengenai penurunan angka buta huruf.

Data menunjukkan bahwa tingkat buta huruf di tingkat provinsi menurun dari 0,82 pada Tahun 2006 menjadi 0,73 Tahun 2009. Diantara 15 Kabupaten/Kota tampak bahwa tingkat buta huruf tertinggi Tahun 2009 terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (2,01) dan terendah di Kota Manado (0,36).

Tabel 2.19.
**Tingkat Buta Huruf Penduduk 10 Tahun Keatas
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, 2006-2009**

No.	Daerah/Nasional	2006	2007	2008	2009
1.	Provinsi Sulawesi Utara	0,82	1,06	0,83	0,73
2.	Kabupaten Bolaang Mongondow	1,67	1,81	1,51	1,68
3.	Kabupaten Minahasa	0,75	0,61	0,78	0,32
4.	Kabupaten Kepulauan Sangihe	1,79	2,86	1,65	1,37
5.	Kabupaten Kepulauan Talaud	2,52	0,95	0,82	0,58
6.	Kabupaten Minahasa Selatan	0,70	1,20	0,57	0,57
7.	Kabupaten Minahasa Utara	0,28	0,93	0,44	0,48
8.	Kabupaten Kepulauan Sitaro	*)	0,75	1,00	0,72
9.	Kabupaten Minahasa Tenggara	*)	0,53	0,34	0,49
10.	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	*)	3,84	2,00	2,01
11.	Kota Manado	0,37	0,15	0,43	0,36
12.	Kota Bitung	1,14	1,14	0,86	0,55
13.	Kota Tomohon	0,15	0,59	0,48	0,58
14.	Kota Kotamobagu	-	0,57	0,47	0,48

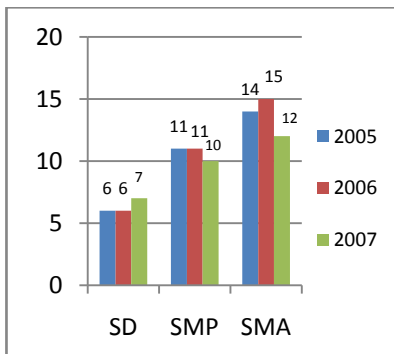
Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, 2011

Keterangan: *) Tidak Tersedia

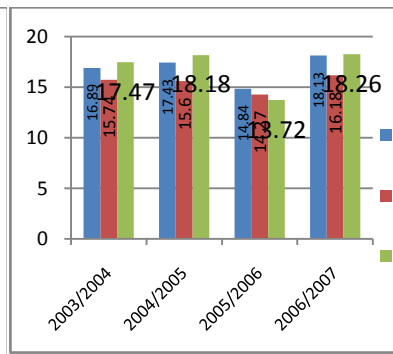
b. Rasio Siswa, Guru, dan Sekolah

Rasio guru terhadap siswa tidak melebihi 1:20, demikian pula dengan rasio guru terhadap sekolah dan rasio siswa terhadap sekolah yang masih tergolong ideal.

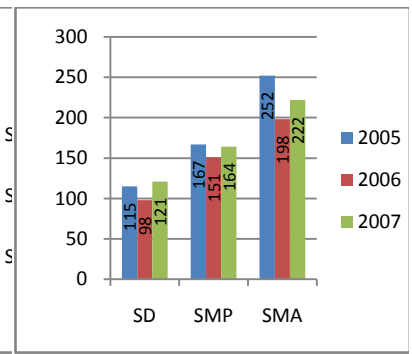
Gambar 2.9. Rasio Guru dan Jumlah Sekolah, 2005-2007



Gambar 2.10. Rasio Guru dan Siswa, 2004-2007



Gambar 2.11. Rasio Siswa dan Sekolah, 2005-2007



Sumber: Susenas Sulawesi Utara, 2008.

Gambar 2.9 menunjukkan bahwa rasio guru dan jumlah sekolah baik untuk SD, SMP dan SMA selang Tahun 2005-2007 masih di bawah 1:20. Gambar 2.10 juga menunjukkan bahwa rasio guru dan siswa selang Tahun 2004-2007 untuk tingkat SD, SLTP dan SLTA masih dibawah 1:20. Ini berarti kondisi pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara masih ideal.

Rasio Murid terhadap Guru untuk masing-masing jenjang pendidikan disajikan pada Tabel 2.20 berikut ini.

Tabel 2.20.

Rasio Murid Terhadap Guru Provinsi Sulawesi Utara, 2006/2007 dan 2007/2008

Tahun	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK
2006/2007	18,13 / 20,81	16,18 / 19,01	18,26 / 9,57	20,16
2007/2008	19,17 / 23,79	17,72 / 13,16	17,45 / 8,64	21,67

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2009.

Untuk kualifikasi guru berdasarkan latar pendidikan sampai tahun 2009 terdiri atas pendidikan SMA, Diploma, dan Sarjana, sementara untuk latar pendidikan Magister dan Doktor masih kurang (Tabel 2.21).

Tabel 2.21.
Kualifikasi Pendidikan Guru Provinsi Sulawesi Utara, 2009

No.	Daerah/Nasional	SMA	Diploma	S1	S2	S3
1	Sulawesi Utara	13.792	9.814	11.592	192	1
2	Kabupaten Bolaang Mongondow	1.542	1.276	820	10	-
3	Kabupaten Minahasa	2.176	1.508	1.884	22	-
4	Kabupaten Kepulauan Sangihe	782	848	533	5	-
5	Kabupaten Kepulauan Talaud	714	898	431	1	-
6	Kabupaten Minahasa Selatan	1.832	855	1.239	8	-
7	Kabupaten Minahasa Utara	1.305	617	743	16	-
8	Kabupaten Kepulauan Sitaro	3.76	413	224	-	-
9	Kabupaten Minahasa Tenggara	650	572	408	3	-
10	KabupBolaang Mongondow Utara	381	345	164	-	-
11	Kota Manado	2.203	1.029	2.968	87	-
12	Kota Bitung	772	582	912	17	-
13	Kota Tomohon	558	410	558	14	1
14	Kota Kotamobagu	501	462	708	9	-

Sumber: Susenas Sulawesi Utara, 2009.

Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki Kualifikasi Guru bergelar S2 sebanyak 1 guru, dibandingkan Kabupaten Kepulauan Sitaro dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang tidak ada, hal ini disebabkan karena kurangnya minat dan kesejahteraan untuk mengabdikan di daerah kepulauan.

2.3.1.2. Kesehatan

a. Imunisasi

Indikator kesehatan (cakupan imunisasi bayi dan persentase kelahiran yang dibantu tenaga medis profesional) di Sulawesi Utara lebih baik dari beberapa daerah di Kawasan Timur Indonesia bahkan di atas angka rata-rata Nasional.

Tabel 2.22.
**Cakupan Imunisasi Bayi dan Persentase Kelahiran yang Dibantu
Tenaga Medis Profesional Provinsi Sulawesi Utara dan Beberapa Daerah
di Kawasan Timur Indonesia, 2007**

PROVINSI	Cakupan Imunisasi Bayi (%)	Persen Kelahiran Yang Dibantu Tenaga Medis Profesional (%)
Gorontalo	77	30
Sulawesi Utara	79	75
Sulawesi Selatan	73	51
Kawasan Timur Indonesia	73	42
Indonesia	78	73

Sumber: Estimasi Bank Dunia dari Susenas, 2007.

b. Penularan HIV/AIDS

Meskipun menunjukkan tren yang menurun tetapi penularan AIDS meningkat dengan pesat dan ini menjadi masalah tersendiri bagi provinsi Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Asia Timur dan Pasifik. Data menunjukkan adanya peningkatan kasus AIDS sebanyak 55 kasus pada periode Tahun 2006-2008 sementara HIV mengalami penurunan namun masih menunjukkan angka yang memprihatinkan yaitu sebanyak 55 kasus Tahun 2008.

c. Jumlah Tenaga Medis

Jumlah Dokter di Manado lebih banyak dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Utara. Sebaliknya jumlah bidan lebih banyak di beberapa daerah kabupaten/kota diluar Kota Manado.

Tabel 2.23.
Ada Ketimpangan Akses Terhadap Tenaga Medis Provinsi Sulawesi Utara, 2008

Kabupaten/Kota	Rasio Dokter/10.000 pddk	Rasio Bidan/10.000 pddk	Jumlah Dokter	Jumlah Bidan
Kota Manado	13.32	3.36	579	146
Kota Bitung	3.43	4.43	62	80
Kota Tomohon	7.76	9.79	65	82
Kota Kotamobagu	4.20	8.14	50	97
Kabupaten Minahasa	4.13	6.96	124	209
Kabupaten Minahasa Utara	6.46	7.48	114	132
Kabupaten Minahas Selatan	2.41	8.10	44	148
Kabupaten Kepulauan Talaud	4.40	10.67	33	80
Kabupaten Kepulauan Sangihe	3.22	6.59	42	86
Kabupaten Kepulauan Sitaro	2.43	9.23	15	57

Kabupaten Bolaang Mongondow*	0.91	6.08	28	187
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	1.37	4.60	11	37
Kabupaten Minahasa Tenggara	2.41	5.55	23	53
Terendah	0.91	3.36	11.00	37.00
Tertinggi	13.32	10.67	579.00	209.00
Rata-rata	4.34	7.00	91.54	107.23

Sumber: Diolah berdasarkan Indikator Sosial dari PODES, 2008 di Indonesia.

*Kab. Boltim dan Kab. Bolsel masih bagian Kab. Bolmong

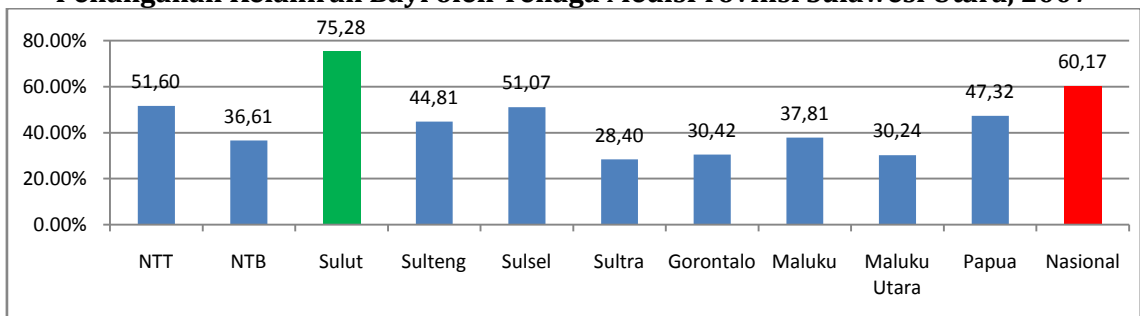
d. Akses terhadap Jasa Kesehatan

Pelayanan kesehatan publik gratis di Provinsi Sulawesi Utara rendah dibandingkan beberapa daerah di beberapa provinsi se-Sulawesi. Jasa kesehatan gratis dalam hal ini adalah penyediaan asuransi untuk yang miskin (Askeskin). Pada Tahun 2007 (Gambar 2.12), kurang lebih 13,6% dari populasi Sulawesi Utara mendapatkan fasilitas Askeskin jasa kesehatan publik tanpa biaya. Porsi ini jauh lebih rendah dari Provinsi Gorontalo (23,7%) dan Sulawesi Tenggara (25,5%). Pada tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Kepulauan Sangihe (18,9%) memiliki persentase terbesar keluarga penerima Askeskin. Hampir 80% kelahiran bayi di Sulawesi Utara ditangani oleh tenaga profesional, demikian pula dengan cakupan Imunisasi Dasar (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) di provinsi beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara sangat tinggi.

e. Penanganan Kelahiran Bayi

penanganan kelahiran bayi oleh tenaga kesehatan profesional di Sulawesi Utara menunjukkan bahwa daerah ini lebih baik bila dibandingkan dengan beberapa daerah lainnya di KTI, dan di atas dari angka nasional (Gambar 2.12).

Gambar 2.12.
Penanganan Kelahiran Bayi oleh Tenaga Medis Provinsi Sulawesi Utara, 2007



Sumber: Susenas, 2007.

f. Gizi

Dalam mengevaluasi program sektor kesehatan, indikator yang digunakan adalah status kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia yang diukur dari Angka Harapan Hidup (*Life Expectancy Rate*), Angka Kematian Ibu Yang Melahirkan (*Maternal Mortality Rate*), Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate*), dan Prevalensi Kekurangan Gizi Pada Balita. Tahun 2009, rata-rata Angka Harapan Hidup mencapai 72,1 tahun. Angka Kematian Ibu mencapai 39/100.000 dan Angka Kematian Bayi mencapai 25 bayi/1000 kelahiran hidup. Prevalensi Angka Bayi Kurang Gizi mencapai 0,18% atau mengalami perbaikan secara signifikan dibandingkan Tahun 2008 yang mencapai 11,6%.

g. Angka Kesakitan dan Kematian

Beberapa penyakit yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, antara lain, Demam Berdarah Dengue (DBD), Diare sebanyak 19.286 kasus, Malaria sebanyak 6348 kasus, *Tuberculosis* (TB) sebanyak 7257 kasus, hipertensi sebanyak 24.461 kasus serta *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) sebanyak 168 kasus. Di samping itu, penyakit *zoonotik* dalam beberapa tahun terakhir muncul menjadi masalah kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan pandemik, seperti flu burung dan *influenza* tipe A baru (virus H1N1).

Tabel 2.24.

Indikator Pembangunan Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, 2005-2009

Indikator	2005	2006	2007	2008	2009
Usia Harapan Hidup	70,9	70	71	72.01	74.4
Angka Kematian Ibu	232	232	182	174	150
Angka Kematian Bayi	25	25	35	35	28

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, 2010.

Masih tingginya Angka Kesakitan dan Kematian disebabkan belum optimalnya kondisi kesehatan lingkungan dan upaya-upaya penanggulangan penyakit. Belum optimalnya kondisi kesehatan lingkungan ditandai dengan rumah tangga yang memiliki akses kepada air bersih baru mencapai 57,2% dan rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak sebesar 69,3% (Laporan *MDGs*, 2007). Sampai Tahun 2009 terdapat 10 rumah sakit umum, 16 rumah sakit swasta dan 5 rumah sakit TNI/Polri dengan total ketersediaan sarana rumah sakit sebanyak 31 rumah sakit. Jumlah puskesmas sebanyak 149 unit, puskesmas rawat inap sebanyak 66 unit, poskesdes sebanyak 442 unit, dan posyandu sebanyak 2178 unit.

h. Penyakit Menular dan Tidak Menular

Berdasarkan laporan hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2007, penyakit menular untuk wilayah Sulawesi Utara dalam satu bulan terakhir, berdasarkan diagnose dan gejala berturut-turut untuk: penyakit malaria, penyakit ini ditemukan di semua kabupaten/kota dengan prevalensi sangat bervariasi antara 0,3%-11,2%. Dalam 12 bulan terakhir, berdasarkan diagnose dan gejala penyakit DBD, penyakit ini juga ditemukan di semua kabupaten/kota dengan prevalensi 0,1%-0,7%. Filariasis ditemukan di 5 kabupaten/kota. Dalam 1 bulan terakhir, berdasarkan diagnose dan gejala penyakit ISPA

diketemukan di semua kabupaten/kota dengan prevalensi 20,5% penduduk, sementara dalam 12 bulan terakhir, prevalensi TBC sebesar 0,6%, lebih rendah ketimbang angka nasional. Prevalensi diare dalam satu bulan terakhir 5,4%, dan tertinggi di Kabupaten Kepulauan Talaud (8,8%). Sebagai negara tropis, Indonesia termasuk di dalamnya Sulawesi Utara menghadapi permasalahan penyakit menular, diantaranya Tuberkulosis (TB), Malaria, dan Demam Berdarah Dengue (DBD) selain HIV/AIDS dan beberapa penyakit lainnya.

Penyakit tidak menular prevalensi hipertensi berdasarkan pengukuran cukup tinggi (31,2%), dan ditemukan dua kabupaten dengan prevalensi >40% yakni Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon. Prevalensi penyakit sendi juga cukup tinggi (25%), dengan prevalensi tertinggi 34% ditemukan di Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam satu tahun terakhir, berdasarkan diagnose dan gejala penyakit jantung, prevalensi jantung 8,2%, dan prevalensi asma 2,7%. Secara rerata di Provinsi Sulawesi Utara hampir 1 di antara 10 penduduk (8,97%) menderita gangguan mental emosional, dan tertinggi di Kabupaten Kepulauan Talaud (20%). Prevalensi *low vision* dan kebutaan penduduk umur ≥5 tahun dalam 5 tahun terakhir 3,4% dan 0,5%. Di Sulawesi Utara, berdasarkan diagnose dan gejala akatarak, prevalensi katarak penduduk umur ≥30 tahun sebesar 20%, dengan prevalensi tertinggi 34% di Kabupaten Kepulauan Talaud. Hampir satu di antara tiga penduduk di Provinsi Sulawesi Utara mempunyai masalah gigi-mulut namun persentase yang menerima perawatan gigi baru satu di antara empat.

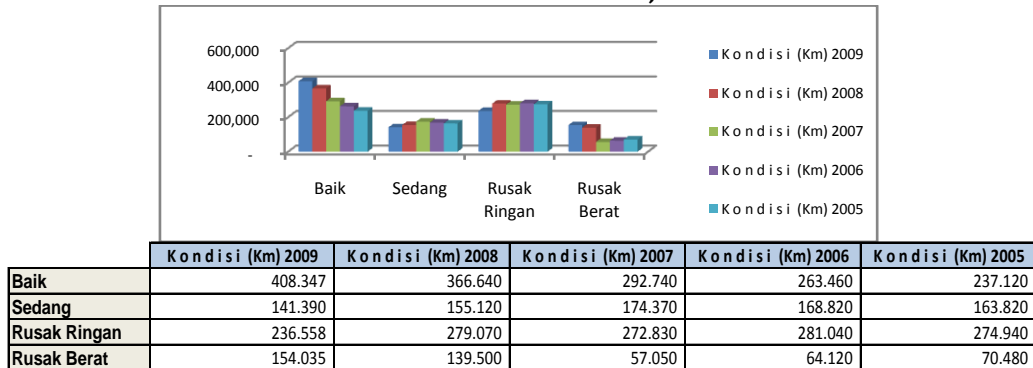
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan diwujudkan dalam bentuk promosi kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Manusia (UKBM) seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Upaya ini ditujukan untuk memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu melaksanakan upaya pemeliharaan kesehatan secara mandiri.

2.3.1.3. Pekerjaan Umum

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Pada Tahun 2009 tingkat pelayanan Jalan Provinsi sepanjang 940,33km adalah dengan kondisi jalan Mantap 408,347km (44,26%), Sedang 141,390km (15,33%), Rusak Ringan 236,558km (24,83%) dan Rusak Berat 154,035km (15,58%). Perkembangan lima tahun terakhir ini dapat dilihat pada Gambar 2.13.

**Gambar 2.13. Perkembangan Kondisi Jalan Lima Tahun Terakhir
Provinsi Sulawesi Utara, 2005-2009**



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara, 2010.

b. Jaringan Irigasi

Luas Daerah Irigasi potensial sesuai kewenangan provinsi adalah 19.428Ha, diantaranya 14.183Ha (72,80%) merupakan lahan fungsional. Ditargetkan jumlah produksi padi dari lahan fungsional adalah 85.000Ton/tahun.

c. Aksesibilitas Daerah

Panjang jalan Nasional di Sulawesi Utara selang lima tahun terakhir ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 360/KPTS/Men-PU/2007 adalah sepanjang 1.319,231km dan panjang jalan Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara adalah sepanjang 940,33km, sementara jumlah kendaraan pada lima tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang sangat tinggi pada tahun 2009 sebesar 37%. Dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan ke pusat-pusat kegiatan, diadakan pembangunan jalan baru dan peningkatan jalan yang ada ke sentra-sentra produksi dan pusat kegiatan.

2.3.1.4. Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkekuatan hukum serta berfungsi utama sebagai arahan investasi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kenyataan selama ini yang terjadi, penggunaan RTRW terbatas digunakan sebagai media dan acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antara sektor dan wilayah. Mengantisipasi pembangunan Sulawesi Utara kedepan, perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi syarat mutlak dalam penyusunan setiap kegiatan perencanaan pembangunan dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, lingkungan, fisik, dan RTRW seluruh kabupaten dan kota, serta RTRW pulau Sulawesi dan nasional. Pengembangan wilayah provinsi perbatasan Sulawesi Utara menjadi perhatian khusus dalam strategi pembangunan daerah Sulawesi Utara di era globalisasi. Sebagian wilayah Sulawesi Utara dikategorikan sebagai wilayah tertinggal atau

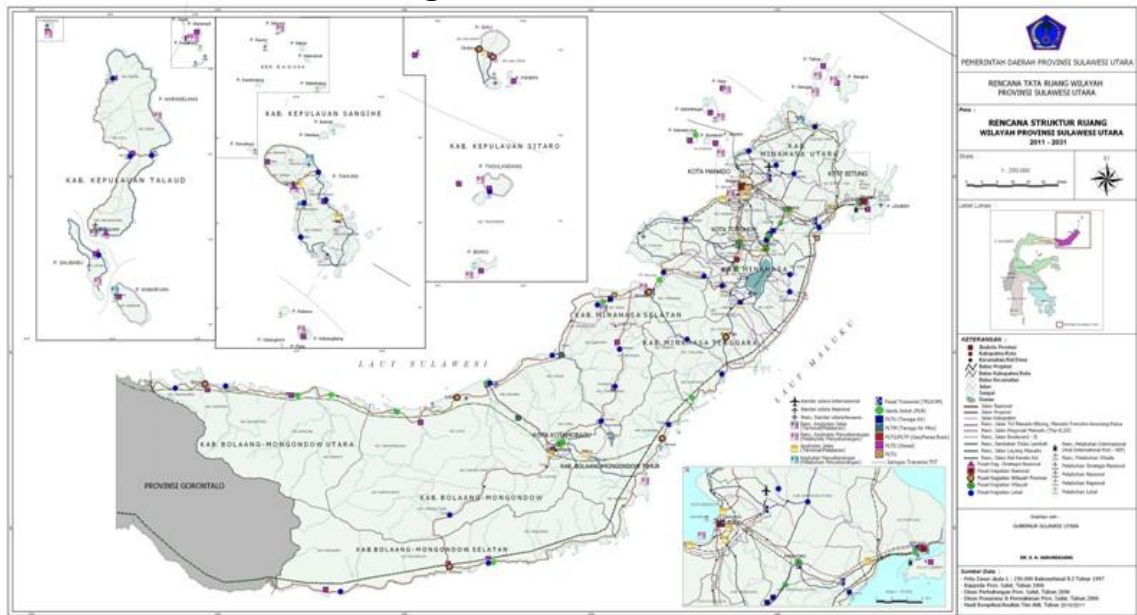
terkebelakang khususnya pada daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau kecil yang terbatas aksesibilitas prasarana dan sarana transportasi. Walaupun sebagian wilayah-wilayah tersebut menyimpan sumberdaya alam sangat potensial untuk dikembangkan. Pada sisi yang lain, terdapat juga wilayah-wilayah strategi dan cepat tumbuh yang didukung dengan ketersediaan sumber daya alam yang belum dikembangkan secara optimal.

Ketidakseimbangan pembangunan daerah direfleksikan juga oleh berkembangnya pembangunan wilayah perkotaan, secara fisik dan perluasan wilayah perkotaan tanpa terkendali. Semangat desentralisasi mendorong juga wilayah perkotaan berkembang secara mandiri dengan memiliki pemerintahan kota sendiri. Kota tidak dapat berkembang tanpa didukung dengan wilayah *hinterland* (kabupaten) sebagai pemasok utama bahan baku untuk industri manufaktur di perkotaan dan bahan makanan untuk penduduk kota. Sebaliknya, wilayah perkotaan menjadi target utama untuk memasarkan produk-produk pertanian, perkebunan, dan perikanan dari wilayah kabupaten. Masing-masing wilayah antar kabupaten dan kota tidak dapat berkembang sendiri-sendiri, sebab masing-masing wilayah memiliki sumberdaya yang berbeda dan harus saling melengkapi. Namun dalam kenyataan, keterkaitan desa kota dan sebaliknya belum terjalin dengan baik.

Tersedianya rencana tata ruang wilayah provinsi sebagai acuan pengembangan wilayah, harus diikuti dengan tersedianya informasi dan pengelolaan pertanahan berdasarkan tata pemerintahan yang baik dan peraturan-peraturan yang berlaku. Kenyataan, masalah pertanahan sebagai pemicu utama sulit terlaksananya program-program pemerintah dan kegiatan investasi swasta. Untuk merealisasikan wilayah Sulawesi Utara sebagai salah satu tujuan investasi nasional dan internasional, komitmen dan perhatian khusus pada pengaturan penguasaan dan pemilikan lahan, serta peruntukan dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat, swasta, dan pemerintah tidak dapat diabaikan lagi.

Kedepan, posisi strategis provinsi perbatasan Sulawesi Utara menjadi syarat mutlak untuk dioptimalkan meraih peluang geo-posisi Sulawesi Utara di kawasan Asia Pacific. Pengembangan wilayah kabupaten dan kota saatnya diarahkan dengan pendekatan *bio-regionalism* menuju pembangunan provinsi perbatasan Sulawesi Utara *incorporated* dan berkelanjutan. Selanjutnya pola ruang Sulawesi Utara dapat dilihat pada Gambar 2.14.

Gambar 2.14.
Pola Ruang Provinsi Sulawesi Utara, 2011



Sumber: Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara, 2011.

2.3.1.5. Perencanaan pembangunan

Perencanaan Pembangunan dalam rangka ketersediaan infrastruktur dasar seperti sumber daya air, prasarana jalan, jembatan, transportasi darat, angkutan sungai danau, dan penyeberangan, transportasi udara, ketenagalistrikan, telekomunikasi, perumahan dan permukiman, air bersih, air limbah, drainase, persampahan, dan fasilitas-fasilitas sarana penunjang lainnya di wilayah Provinsi Sulawesi Utara menjadi syarat utama untuk memacu pembangunan daerah dalam menarik investor melakukan bisnis di daerah. Selama ini sebagian besar penyediaan infrastruktur dasar, infrastruktur utama, dan sarana pendukungnya dibiayai oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh pihak swasta.

Pengembangan infrastruktur seperti: pengembangan pelabuhan Bitung menjadi Pelabuhan Internasional Hub Bitung; pengembangan Bandara Internasional Sam Ratulangi; pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung; pembangunan Jalan Lingkar Manado Tahap II Dan III; pembangunan Boulevard II; pembangunan Jembatan Lembeh; pembangunan Jalan Lingkar Lembeh; pembangunan Waduk Multifungsi Sawangan/Kuwil dan pembangunan PLTP Lahendong V dan VI. Ketersediaan infrastruktur dasar dan fasilitas penunjang akan menjadi penggerak utama berkembangnya sektor ril dan sekitar lainnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kemudahan untuk memproduksi barang dan melakukan ekspor langsung ke negara tujuan dari Bitung, akan dapat mengurangi biaya produksi dan transportasi

sehingga pelaku sektor rill akan memiliki kemampuan untuk bersaing dengan produk yang sama dari provinsi lainnya di Kawasan Barat Indonesia (KBI). Kondisi seperti ini akan mempercepat sektor rill di KTI dapat meningkatkan daya saing, dan secara makro akan dapat bersama-sama meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

2.3.1.6. Perhubungan

a. Perhubungan Darat

Jalan Nasional di Sulawesi Utara menempati posisi strategis sebagai urat nadi pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya karena fungsinya menghubungkan wilayah daratan Sulawesi Utara dengan wilayah daratan provinsi lainnya di pulau Sulawesi. Pengembangan Investasi untuk Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Koridor IV wilayah Sulawesi perlu didukung dengan aksesibilitas konektivitas melalui pembangunan *trainrail* regional dan akses antar kota.

Sebagai upaya memberikan dan meningkatkan pelayanan angkutan darat yang lancar, tertib, dan aman di Sulawesi Utara maka tersedia 9 buah terminal dan 17 buah pelataran. Pengujian kendaraan bermotor secara mekanik terdapat di lokasi Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Kairagi Kota Manado untuk menguji kelaikan kendaraan bermotor yang berdomisili di Kota Manado, Kota Bitung, dan Kabupaten Minahasa. Pengujian kendaraan bermotor yang ditempatkan di Tahuna untuk menguji kelayakan kendaraan bermotor yang berdomisili di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud. Untuk daerah lainnya, pengujian kendaraan bermotor dilakukan secara manual yang kurang terjamin keandalannya. Unit Pelaksana Penimbangan (Jembatan Timbang) yang terdapat di Sulawesi Utara sebanyak 3(tiga) unit. Jembatan timbang tersebut terletak di Wangurer (Kota Bitung), Pineleng (Kabupaten Minahasa), dan Inobonto (Kabupaten Bolaang Mongondow).

Perusahaan angkutan penumpang (bus) yang ada di Sulawesi Utara sampai akhir Tahun 2008 sebanyak 73 perusahaan. Untuk armada angkutantaksi pada akhir Tahun 2009 yang beroperasi di Provinsi Sulawesi Utara sejumlah 270 unit terdiri dari Taksi Trust 52 unit, Celebrity 48 unit, Kokapura 50 unit, Blue Bird 100 unit, dan Dian Taxi 20 Unit. Jumlah kendaraan yang terdaftar pada trayek AKDP sebanyak 1.330 unit dan trayek AKAP sebanyak 106 unit.

Angkutan Penyeberangan di Sulawesi Utara baru terlaksana Tahun 1993, sampai saat ini telah memiliki empat Pelabuhan Penyeberangan di Bitung, Pananaru, Melonguane, dan Ulu Siau untuk melayani lintas penyeberangan Bitung – Pananaru (Kabupaten Kepulauan Sangihe), Bitung – Ulu Siau (Kabupaten Kepulauan Siau-Tagulandang-Biaro), Bitung – Melonguane (Kabupaten Kepulauan Talaud) serta dua dermaga plengsengan yaitu di Bitung dan Pulau Lembeh yang melayani lintas Bitung – Pulau Lembeh. Untuk melayani jasa angkutan penyeberangan Tahun 2008 telah tersedia sarana angkutan penyeberangan sebanyak 4 unit Kapal Motor Penyeberangan (KMP), yaitu:

1. KMP. Pulau Sagori untuk melayani Lintas Penyeberangan Bitung – Pananaru (Kabupaten Kepulauan Sangihe) ukuran 500 GRT, kapasitas muat penumpang 400 orang, kendaraan roda 4 sebanyak 23 unit.
2. KMP. Pulau Sagori untuk melayani lintas penyeberangan Bitung – Siau (Kabupaten Kepulauan Siau-Tagulandang-Biaro), ukuran 500 GRT penumpang 352 orang, kendaraan roda 4 sebanyak 14 unit.
3. KMP. Porodisa untuk melayani lintas penyeberangan Bitung – Melonguane (Kabupaten Kepulauan Talaud), ukuran 750 GRT, kapasitas muat penumpang 500 orang, kendaraan roda 4 sebanyak 35 unit.
4. KMP. Bawal melayani lintas Bitung-Ternate KMP. Pulau Sagori, KMP Bawal, KMP. Lokong Banua dan KMP. Porodisa adalah kapal motor penyeberangan milik pemerintah yang dioperasikan oleh PT.Indonesia Ferry (Persero).

Produksi angkutan penyeberangan, volume produksi angkutan penyeberangan di Sulawesi Utara Tahun 2008 untuk kunjungan kapal di pelabuhan penyeberangan Kota Bitung sebanyak 233 unit, bila dibandingkan dengan tahun lalu mengalami peningkatan sebesar 62,93%, penumpang yang diangkut sebanyak 12.338 orang jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami peningkatan sebesar 30,80%. Angkutan barang sebanyak 7.047 ton bila dibandingkan dengan tahun lalu mengalami peningkatan sebesar 19,65%. Untuk angkutan kendaraan roda 2 sebanyak 311 unit bila dibandingkan dengan tahun lalu mengalami peningkatan sebesar 41,36 % dan roda 4 sebanyak 788 unit dibandingkan dengan tahun lalu mengalami peningkatan sebesar 114,13%.

b. Perhubungan Laut

Dalam tatanan kepelabuhan nasional di Provinsi Sulawesi Utara terdapat 1 pelabuhan internasional, 8 pelabuhan nasional dan 18 pelabuhan lokal. Tahun 2008, kunjungan kapal luar negeri di Pelabuhan Bitung, sebanyak 111 unit. Kunjungan kapal dalam negeri pada 7 pelabuhan sebanyak 9.854 unit. Dibandingkan dengan tahun 2007, kunjungan kapal mengalami penurunan sebesar 33,39%.

Untuk menunjang jaringan perhubungan darat, dan akses konektivitas perhubungan laut berdasarkan Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Koridor IV wilayah Sulawesi, maka perlu didukung dengan pembangunan fasilitas jembatan laut (*seabridge*) untuk kapal *rollon-rolloff* antar pelabuhan terdekat di daerah seperti (Tahuna) di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kota (Davao) di negara tetangga Filipina, bagian dari kawasan Regional BIMP-EAGA.

Angkutan penumpang Tahun 2008 jumlah yang diangkut pada 7 pelabuhan sebanyak 920.149 orang yang terdiri dari penumpang turun sebanyak 436.856 orang dan penumpang naik sebanyak 483.293 orang bila dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan sebesar 5,85%. Bongkar muat Tahun 2008 volume bongkar muat barang pada 7 pelabuhan sebanyak 3.952.852,81 ton yang terdiri dari volume bongkar sebanyak 3.313.885,84 ton dan volume muat sebanyak 6.38.966,97 ton. Tahun 2008 volume impor

dan ekspor barang sebanyak 591.084ton, yang terdiri dari volume impor sebanyak 461.097ton dan volume ekspor sebanyak 129.987ton.

Angkutan peti kemas Tahun 2008 volume bongkar muat barang sebanyak 1.163.374box yang terdiri dari volume bongkar sebanyak 763.738box dan volume muat sebanyak 399.636box bila dibandingkan dengan tahun yang lalu mengalami peningkatan sebesar 827,02%. Tahun 2008, pelayaran kapal perintis di Sulawesi Utara mengoperasikan 3 unit kapal yaitu 2 unit berpangkalan di Pelabuhan Bitung dan 1 unit lainnya berpangkalan di Pelabuhan Tahuna. Kapal-kapal perintis tersebut melayani angkutan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud yang selama ini belum ada angkutan yang melayani secara komersial. Dengan demikian kapal perintis merupakan satu-satunya alat transportasi yang melayani Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud.

c. Perhubungan Udara

Program pembangunan transportasi udara meliputi Rencana pembangunan air strip di Miangas, pembangunan bandara di Sitaro, peningkatan bandara Melonguane dan Tahuna serta peningkatan kapasitas dan perpanjangan *Runway* Bandara Sam Ratulangi.

Prasarana Bandar Udara sebanyak 3 (tiga) buah terdiri dari Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado yang merupakan pusat penyebaran dengan panjang landasan 2.650m, Bandar udara Naha yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Bandar Udara Melonguane yang berada di Kabupaten Kepulauan Talaud yang bukan merupakan pusat penyebaran dengan panjang landasan masing-masing 1.200m dan 1.400m. Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado merupakan Bandar Udara yang pengusahaannya dilaksanakan oleh PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Manado. Sedangkan Bandar Udara Naha dan Melonguane merupakan unit Pelaksana Teknis Dirjen Perhubungan Udara Departemen Perhubungan. Pengembangan bandar udara perlu ditunjang dengan aksesibilitas internasional khususnya wilayah Asia Timur dan Pasifik untuk memperkuat terwujudnya *ASEAN Connectivity*.

Sarana Fasilitas sisi darat bandar udara, fasilitas landasan, fasilitas bangunan operasional, fasilitas navigasi udara, fasilitas listrik, fasilitas komunikasi, dan fasilitas *security equipment* dan audio visual telah tersedia dalam kondisi cukup memadai untuk menunjang operasional penerbangan pada masing-masing bandar udara, namun perlu penambahan dan peningkatan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Adapun perusahaan angkutan udara yang beroperasi di Sulawesi Utara untuk melayani penerbangan dalam negeri adalah PT. Garuda Indonesia Airlines, PT. Merpati Nusantara Airlines, PT. Batavia Air, PT. Lion Air, PT. Wings, Express, Kartika, dan Sriwijaya. Sedangkan untuk penerbangan Luar Negeri berjadwal dilayani oleh Silk Air ke Singapura dan Air Asia ke Kuala Lumpur.

Jumlah pergerakan pesawat pada 3 bandar udara Tahun 2009 sebanyak 14.502 unit pada penerbangan dalam negeri dan jika dibandingkan Tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 2,77%. Sedangkan pergerakan pesawat luar negeri sebanyak 841 unit, dibandingkan dengan tahun lalu mengalami peningkatan sebesar 24,04%. Angkutan penumpang dalam negeri Tahun 2009 sebanyak 1.238.672 orang yang terdiri dari penumpang turun sejumlah 620.948 orang dan penumpang naik sejumlah 617.724 orang, dibandingkan dengan Tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 10,43%. Sedangkan angkutan penerbangan luar negeri sebanyak 75.985 orang yang terdiri dari penumpang turun sejumlah 38.842 orang dan penumpang naik sejumlah 37.143 orang, dibandingkan tahun lalu mengalami peningkatan sebesar 44,78%.

Angkutan cargo/barang pada penerbangan dalam negeri Tahun 2009 sebanyak 9.905.420Kg yang terdiri dari bongkar barang sebanyak 6.432.760Kg dan muat barang sebanyak 3.472.660Kg, bila dibandingkan dengan tahun lalu mengalami peningkatan sebesar 1,31% sedangkan angkutan barang penerbangan luar negeri sebanyak 459.530Kg yang terdiri dari bongkar barang sebanyak 93.745Kg dan muat barang sebanyak 365.785Kg, mengalami peningkatan sebesar 87,03%.

Angkutan bagasi pada penerbangan dalam negeri Tahun 2009 sebanyak 13.487.001Kg yang terdiri dari bongkar sebanyak 6.787.527Kg dan muat sebanyak 6.699.474Kg, jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan sebesar 1,70%, sedangkan angkutan bagasi penerbangan luar negeri sebanyak 1.245.903Kg yang terdiri dari bongkar sebanyak 644.460Kg dan muat sebanyak 601.443Kg, bila dibandingkan dengan tahun lalu mengalami peningkatan sebesar 20,15%. Angkutan pos Tahun 2009 hanya melalui Bandara Sam Ratulangi Manado untuk penerbangan dalam negeri sebanyak 323.609Kg yang terdiri dari bongkar sejumlah 231.076Kg dan muat sebanyak 92.533Kg, dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan sebesar 26,86%.

Memperhatikan daya dukung serta pelayanan perhubungan udara yang cenderung terus meningkat, maka sejalan dengan RTRW Provinsi Sulawesi Utara telah direncanakan Pembangunan Bandar Udara Internasional di Kawasan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan.

2.3.1.7. Lingkungan Hidup

Dalam konteks pembangunan negara dan pemberdayaan masyarakat, segala aktivitas dan kegiatan tidak dapat mengenyampingkan eksistensi lingkungan pada titik dan batas tertentu. Karenanya, pembangunan dan pemberdayaan yang tidak memberikan perhatian serius terhadap lingkungan, sebaliknya justru akan menghasilkan anti-pembangunan dan anti-pemberdayaan, bahkan dapat berakibat pada kemerosotan kesejahteraan masyarakat sehingga meningkatkan angka kemiskinan.

Permasalahan lingkungan hidup pada Tahun 2010-2015, masih akan diperhadapkan pada pencemaran air, udara, tanah, persampahan, dan limbah B3 serta kerusakan lingkungan baik darat, pesisir, dan laut. Sebagian besar masalah lingkungan ini bersumber dari

kegiatan domestik, industri agro, industri manufaktur, industri pertambangan, industri jasa, dari sektor transportasi serta lemahnya *lawenforcement* yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan serta penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah salah satu upaya dalam meminimalisasi permasalahan lingkungan tersebut.

Target Indonesia untuk secara sukarela menurunkan emisi GRK sebesar 26% pada tahun 2020 merupakan komitmen yang harus ditindaklanjuti dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Tahun 2010-2015, diantaranya melalui pengendalian sumber-sumber pencemaran dan perusakan SDA, peningkatan kualitas lingkungan DAS, pengendalian kemerosotan KEHATI, peningkatan peran serta masyarakat serta menahan laju *deforestasi*.

Posisi geografis Sulawesi Utara yang terletak di daerah tropis dan kepulauan rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak perubahan iklim yang terjadi seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau, dan kenaikan muka air laut sehingga perlunyaantisipasi dalam melestarikan lingkungan hidup.

Dalam mengevaluasi program sektor Lingkungan Hidup, indikator yang digunakan adalah Persentase Penanganan Sampah, Penduduk yang berakses Air Minum serta Luas Permukiman yang tertata. Sampai dengan Tahun 2009, persentase penanganan sampah baru mencapai $\pm 30\%$. Hal ini antara lain disebabkan oleh karena masih kurangnya infrastruktur penanganan sampah mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Untuk penduduk yang berakses Air Minum melalui Pelayanan air minum dengan sistem perpipaan di daerah perkotaan Tahun 2009 mencapai 31% dan perdesaan 18%, sampai dengan Tahun 2015 tingkat pelayanan pada daerah perkotaan dapat mencapai 70% dan pada daerah perdesaan 30%.

Pentingnya untuk meningkatkan jumlah masyarakat untuk mendapat akses layanan air minum, kesehatan dan sanitasi, mengurangi jumlah kejadian penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan, menjaga cakupan pelayanan air minum sanitasi yang rendah yang berdampak pada kesehatan masyarakat sehingga perlu penambahan jaringan infrastruktur air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dalam rangka program percepatan sanitasi permukiman. Upaya untuk pencegahan terjangkitnya dan penularan penyakit melalui penyediaan dan pemeliharaan sumber-sumber air bersih serta dalam pengelolaannya sampai dengan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi yang masih rendah karena itu penyediaan sarana dan prasarana air bersih/limbah difokuskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kawasan Rusuna, kawasan strategis nasional, pengembangan prasarana kawasan perbatasan, pengembangan SPAM di desa rawan air dan pesisir serta kawasan yang belum memiliki SPAM tersebar di kabupaten/kota Pemekaran.

2.3.1.8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seiring dengan perkembangan wilayah administrasi di Sulawesi Utara, Tahun 2010 telah terjadi penyesuaian data wilayah administrasi sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah baik kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel.2.25.
Data Wilayah Administrasi Provinsi Sulawesi Utara, 2010

No.	Kabupaten Kota	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Desa/Kelurahan
1.	Kabupaten Minahasa	22	194	43	237
2.	Kabupaten Minahasa Tenggara	12	135	9	144
3.	Kabupaten Minahasa Utara	10	118	6	124
4.	Kabupaten Minahasa Selatan	17	160	10	170
5.	Kabupaten Bolaang Mongondow	12	150	2	152
6.	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	5	51	-	51
7.	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	6	90	1	91
8.	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	5	59	-	59
9.	Kota Manado	9	-	87	87
10.	Kota Tomohon	5	-	44	44
11.	Kota Kotamobagu	4	14	18	32
12.	Kota Bitung	8	-	69	69
13.	Kabupaten Kepulauan Talaud	19	142	11	153
14.	Kabupaten Kepulauan Sitaro	10	80	4	84
15.	Kabupaten Kepulauan Sangihe	15	145	22	167
	J U M L A H	159	1.338	326	1.664

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa, 2011.

2.3.1.9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional menyatakan bahwa seluruh departemen maupun lembaga pemerintah non departemen di pemerintahan nasional, provinsi, kabupaten/kota harus memasukkan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pada kebijakan program dalam pembangunan. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai salah satu tujuan MDGs (*Millennium Development Goals*) Tahun 2015 yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Upaya untuk mencapai pembangunan yang berwawasan gender memerlukan gambaran kondisi jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Utara. Sensus penduduk Tahun 2010 oleh Badan Pusat Statistik jumlah penduduk di Sulawesi Utara tercatat $\pm 2.265.937$ jiwa, 542.988 kepala keluarga. Tercatat

penduduk miskin ±170.821 kepala keluarga serta mata pencaharian pokok yaitu bergerak di sektor pertanian dan perikanan.

Klasifikasi jenis kelamin penduduk di Sulawesi Utara yang terdiri dari laki-laki berjumlah 1.157.559 orang atau 51,09% sedangkan perempuan berjumlah 1.108.378 orang atau 48,91%, populasi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan berimbang. Namun dari segi kualitas kehidupan masih terjadi kesenjangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan baik secara nasional maupun daerah. Penyebabnya antara lain pembangunan belum mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil antara laki-laki dan perempuan. Hal ini memberi kontribusi timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang termanifestasi dalam persoalan marginalisasi, subordinasi, beban ganda, stereotype, kekerasan, diskriminasi, dan kemiskinan. Selain itu dampak dari berbagai produk peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan bias gender turut memberi andil terpuruknya kualitas hidup kaum perempuan. Rendahnya kualitas hidup perempuan berimbas pada kesejahteraan dan perlindungan anak yang masih jauh dari harapan.

Partisipasi perempuan Sulawesi Utara di lembaga politik Tahun 2005 sebesar 24% dan Tahun 2010 sebesar 25%. Dari 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Utara sebanyak 11 perempuan duduk sebagai anggota dewan, dan keterwakilan di tingkat nasional sebesar 50% karena dari 6 orang utusan Sulawesi Utara di DPR RI, sebanyak 3 orang perempuan. Hal itu menunjukkan cukup signifikannya partisipasi perempuan di lembaga politik.

Peran partai politik berkaitan dengan pemihakan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat akan terlihat pada mekanisme pencalonan anggota legislatif. Ketentuan kuota seperti termuat dalam undang-undang mesti disikapi hati-hati. Kuota 30% bagi perempuan tidak bersifat mutlak dan mengikat sehingga tetap terbuka peluang bagi partai politik menempatkan calon perempuan sekadar pengumpul suara (*vote getter*) atau alat legitimasi. Selain itu, partai politik juga mungkin secara sepihak menempatkan wakil-wakil perempuan yang tidak memiliki perspektif dan keberpihakan terhadap nilai, prinsip, dan aspirasi masyarakat.

Perempuan Sulawesi Utara pada kenyataannya menjadi penentu kebijakan dan kini saatnya perempuan diperhitungkan di politik. DPRD Sulawesi Utara yang dipimpin perempuan termasuk 11 anggota dewan perempuan dari total 45 anggota DPRD Sulawesi Utara. Dewan provinsi yang dihuni banyak legislator perempuan menjadi bukti kapasitas perempuan di dunia politik. Di lembaga pemerintah sekitar 15% perempuan menduduki posisi strategis sebagai pemimpin daerah di kabupaten/kota dimana 2 Bupati perempuan, 1 Wakil Bupati perempuan dan 1 Wakil Walikota perempuan.

Diantara berbagai keberhasilan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus diakui bahwa Pemerintah Sulawesi Utara masih perlu memberikan perlindungan terhadap anggota masyarakat yang berusia 60 tahun keatas, karena adalah

tanggung jawab dan kewajiban bagi pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Berdasarkan Data Dinas Sosial Tahun 2011 jumlah penduduk lanjut usia Tahun 2006–2011 sebanyak 24.742 orang dan yang saat ini ditangani oleh pemerintah Sulawesi Utara sepanjang Tahun 2006-2011 adalah sebanyak 300 orang lanjut usia.

Di bidang pendidikan perempuan masih tertinggal, dapat dilihat dari rata-rata lamanya sekolah dimana laki-laki adalah 9,06 tahun sedangkan perempuan adalah 8,68 tahun. Di bidang ekonomi, usaha mikro dan kecil 49% dikelola oleh perempuan dan lebih dari 60% pelaku usaha mikro adalah perempuan yang jika dikembangkan lebih jauh akan dapat membuka lapangan kerja, terutama di tingkat perdesaan. Sementara dukungan untuk mereka masih terbatas, program pembangunan dapat mendorong perkembangan lebih jauh untuk membentuk wiraswasta-wiraswasta baru yang mendukung perekonomian di Sulawesi Utara.

2.3.1.10. Ketenagakerjaan

Jumlah tenaga kerja di Sulawesi Utara meningkat dari tahun ke tahun. Pada Februari Tahun 2006 jumlah tenaga kerja di seluruh sektor ekonomi sebanyak 855.300 orang kemudian meningkat menjadi 940.173 orang pada Agustus Tahun 2009. Struktur ketenagakerjaan Tahun 2009 memperlihatkan bahwa penduduk yang termasuk angkatan kerja sebesar (62,05%) dan lebih banyak dari bukan angkatan kerja yang hanya sebesar (37,96%). Penduduk yang bekerja sebesar 89,44% dari jumlah angkatan kerja. Selanjutnya, kelompok bukan angkatan kerja didominasi oleh penduduk yang mengurus rumah tangga, yaitu sebanyak 64,71% serta yang bersekolah sebanyak 22,07%.

Untuk menjamin hak-hak tenaga kerja, setiap perusahaan di daerah Sulawesi Utara diwajibkan mengikuti Asuransi Jamsostek, dan tunduk pada peraturan pemerintah daerah termasuk penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP). Upah minimum provinsi adalah standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di Sulawesi Utara. Tahun 2005 UMP Sulawesi Utara sebesar Rp.600.000,- yang meningkat menjadi Rp.1.000.000 Tahun 2010, dan pada Tahun 2011 dinaikkan menjadi Rp.1.080.000 sehingga menjadi provinsi yang UMPnya tertinggi di wilayah kepulauan Sulawesi.

2.3.1.11. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Jumlah koperasi di Sulawesi Utara terus meningkat periode Tahun 2005-2009. Tahun 2005, jumlah koperasi tercatat sebanyak 4.329 unit dan meningkat menjadi 5.574 unit Tahun 2009. Namun demikian, sebagian besar koperasi tersebut tidak lagi melakukan aktivitas, hal ini menunjukkan bahwa kinerja koperasi di Sulawesi Utara belum optimal. Di sisi lain, pada periode 2007-2009 jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Sulawesi Utara mengalami perkembangan setiap tahunnya. Tahun 2007, jumlah UMKM sebanyak 43.545 unit dan Tahun 2009 sebanyak 52.964 unit. Pada dasarnya, perkembangan kuantitas UMKM belum dibarengi dengan perkembangan kualitas yang dapat memberi nilai tambah yang besar bagi Sulawesi Utara.

Hal ini disebabkan UMKM Sulawesi Utara belum didukung sepenuhnya dengan permodalan yang memadai, teknologi tepat guna, dan promosi produk untuk pemasaran yang efektif serta belum adanya kemitraan dalam bentuk inti-plasma, subkontrak, waralaba (*franchise*), distribusi dan keagenan, perdagangan umum, dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya, seperti usaha patungan (*joint venture*), bagi hasil, dan penyumberluaran (*outsourcing*), pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Disamping itu masih kurangnya minat wiraswasta muda lokal (*local and young entrepreneur*). Adapun fungsi kelembagaan koperasi masih belum optimal karena banyak permasalahan internal. Salah satu upaya untuk mengembangkan perekonomian daerah adalah ekonomi kreatif lokal yang sampai saat ini masih sangat terbatas pengembangannya.

Dalam membantu pelaku-pelaku ekonomi di daerah (termasuk UMKM) mempromosikan produk-produk mereka kepada pihak-pihak investor baik di dalam maupun di luar negeri maka perusahaan daerah memegang peran yang sangat penting. Untuk itu pemerintah provinsi harus mendorong adanya peningkatan peran dan fungsi perusahaan daerah yang telah ada. Perkembangan perusahaan daerah tidak mengalami peningkatan baik pengelolaan organisasi maupun usaha-usaha yang dijalankan selama ini di sektor jasa dan perdagangan. Selain itu untuk menarik minat investor menanamkan modalnya diberbagai bidang, maka perlu adanya data base dan pusat informasi bisnis yang memadai dan *up to date*, karena sampai saat ini belum tersedia.

2.3.1.12. Kebudayaan

Masyarakat Sulawesi Utara dikenal oleh orang luar dengan masyarakat yang terbuka (*open minded*), mudah menerima dan menyapa siapa saja yang datang ke daerah. Di Sulawesi Utara tidak mengenal perbedaan warna kulit, ras, suku, etnik, dan agama, semua diperlakukan sama. Perbedaan yang beragam dari segala aspek yang dimiliki Sulawesi Utara dijadikan kekayaan dan pemersatu yang tak ternilai dan modal dasar untuk membangun daerah kedepan yang lebih cemerlang dan sejahtera.

Semua agama (Islam, Kristen, Budha, Hindu, Konghuchu, dan aliran kepercayaan lainnya) yang ada di Indonesia berkembang dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Semua masyarakat hidup berdampingan tanpa memperdulikan agama yang dianut. Hidup bersama dalam falsafah hidup orang Sulawesi Utara adalah "*Torang Samua Basudara*" atau "*Semua Bersaudara*". Jadi kehidupan semua umat beragama di Sulawesi Utara, hidup dan berkembang dalam suatu suasana yang harmonis dan tidak mengenal perbedaan.

Kondisi itulah yang banyak dibicarakan orang dari luar bahwa bagaimana dapat tercipta kehidupan yang damai dan aman walaupun dengan banyak perbedaan. Kehidupan harmonis seperti ini telah berkembang ratusan tahun di Sulawesi Utara sejak masuknya Kyai Modjo dan pengikutnya tinggal dan menetap di Tondano Minahasa bersama dengan masyarakat setempat. Kemudian keturunan mereka berkembang dan menyebar ke seluruh wilayah Sulawesi Utara yang dikenal dengan "*Orang Kampung Jawa Tondano*". Inilah suatu contoh yang berkembang di Sulawesi Utara bahwa masyarakat hidup berdampingan dalam suasana harmoni walaupun berbeda agama.

Kehidupan harmonis, aman, dan damai inilah yang dijadikan modal dasar lain untuk membangun daerah. Bagi pelaku bisnis, investor, dan wisatawan, keamanan, dan kenyamanan menjadi syarat mutlak yang harus disiapkan daerah bagi mereka. Hal ini menjadi pendorong bagi pemerintah daerah untuk tetap menciptakan daerah yang aman dan damai. Keamanan menjadi fokus utama bagi pemda dan petugas keamanan untuk tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Kerjasama dan komunikasi yang dibangun institusi terkait bidang keamanan dan tokoh agama yang tergabung dalam Muspida dan Badan Kerjasama Antar Umat Beragama menjadi kunci utama membangun perdamaian melalui dialog-dialog terbuka antar institusi.

2.3.1.13. Kepemudaan dan Olah Raga

Kondisi yang ada sekarang lapangan Olah Raga Sparta Tikala, lapangan Koni Sario, Stadion Maesa Tondano serta beberapa stadion kecil belum memadai untuk menunjang rencana penyiapan Sulawesi Utara sebagai tempat penyelenggaraan kejuaraan nasional maupun internasional sehingga perlu peningkatan fasilitas dan kualitas berstandar nasional dan internasional.

2.3.1.14. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

Pemantapan sinkronisasi aparat penegak hukum dan jajarannya berkaitan dengan posisi berbatasan langsung dengan Filipina yang rawan terhadap infiltrasi/penyusupan teroris, masih adanya kriminalitas. Dalam rangka memantapkan kerukunan umat beragama, maka dibentuk Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) ditingkat provinsi maupun di kabupaten/kota, selain itu pemerintah juga membentuk Forum Kerja Sama Umat Beragama (FKUB).

2.3.1.15. Ketahanan Pangan

Neraca Bahan Makanan (NBM) Tahun 2010 menunjukkan total energi yang tersedia untuk dikonsumsi rumah tangga mencapai 4.102 kkal/kapita/hari dan protein 97,62 gram/kap/hari. Keadaan ini telah melebihi Standar ketersediaan kalori yang direkomendasikan yaitu 2.200 kkal/kap/hari dan 57 gram/kap/hari untuk protein. Selanjutnya berdasarkan survey konsumsi pangan Tahun 2010 tingkat konsumsi energi masyarakat mencapai 1.910 kkal/kapita/hari atau 95,50% dari total kecukupan energi/gizi ideal yaitu sebesar 2.000 kkal/kapita/hari (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi).

Kondisi distribusi pangan di Sulawesi Utara cukup stabil dan terkendali, walaupun pada kondisi-kondisi tertentu misalnya menjelang hari-hari besar keagamaan dan musim paceklik sering terjadi lonjakan harga pangan pokok yang mempengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap pangan. Untuk itu telah dilakukan langkah-langkah yang terkait dengan stabilitasi harga, antara lain melalui penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat, dan pengembangan sistem informasi harga, pasokan dan akses pangan. Hasil analisis Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) Tahun 2009 Sulawesi Utara mempunyai 42 kecamatan yang beresiko tinggi rawan pangan dan Tahun 2010 terjadi penurunan menjadi 38 kecamatan (turun 28%).

Selain ketersediaan pangan maka keamanan pangan (*food and bio security*) juga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, karena keamanan pangan merupakan syarat penting yang harus melekat pada pangan yang hendak dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu industri pangan yang berperan sebagai pengedar pangan ke konsumen harus memenuhi standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa tahun terakhir ini keamanan pangan selalu menjadi pertimbangan pokok dalam perdagangan, baik perdagangan nasional maupun perdagangan internasional. Di seluruh dunia kesadaran dalam hal keamanan pangan semakin meningkat. Pangan semakin penting dan vital peranannya dalam perdagangan dunia. Berkaitan dengan keamanan pangan sampai saat ini belum ada sinergitas yang mantap antara pemerintah daerah dengan lembaga-lembaga internasional (*Coral Triangel Initiative*), regional, sub regional, dan antar daerah guna memperkuat ketahanan pangan serta masih terbatasnya pusat-pusat riset untuk mendukung *food and bio-security*.

2.3.1.16. Komunikasi dan Informatika

Database perekonomian dan pusat informasi bisnis merupakan prasyarat pengembangan ekonomi di Sulawesi Utara namun kebanyakan database tersebut masih bersifat parsial dan tersebar pada satuan kerja pemerintah daerah dan instansi-instansi lainnya. Sampai saat ini Sulawesi Utara belum memiliki pusat informasi bisnis yang representatif untuk menyediakan data secara lengkap, akurat dan terbaru.

Pada saat ini sebagian besar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah membangun situs web internet, namun belum menunjukkan arah pengembangan situs web sebagai aplikasi *E-Government*. Pembangunan situs web masih bersifat statis, dimana belum tersedianya fasilitas transaksi pelayanan publik, belum adanya jaringan interaktif dengan dunia usaha, serta masih terbatasnya fasilitas dialog publik.

2.3.1.17. Perpustakaan

Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kepribadian melalui penyediaan bahan pustaka yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan telah terjadi peningkatan jumlah buku dan judul buku dari Tahun 2005-2010, hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26.
Jumlah Buku dan Judul Buku di Provinsi Sulawesi Utara, 2005-2010

Nomor	Tahun	Jumlah Buku(Eksemplar)	Judul Buku
1.	2005	162.723	52.588
2.	2006	165.374	53.256
3.	2007	166.211	53.889
4.	2008	167.731	54.270
5.	2009	177.311	56.463
6.	2010	183.879	57.605

Sumber: Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Utara, 2011.

Jumlah pengunjung perpustakaan selama lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Tahun 2005, jumlah pengunjung mencapai 255 orang, angka tersebut naik menjadi 453 orang Tahun 2010. Kenaikan jumlah pengunjung selang Tahun 2005-2010 dapat dilihat pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27.

Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Provinsi Sulawesi Utara, 2005-2010

Nomor	Tahun	Jumlah Pengunjung
1	2005	255
2	2006	301
3	2007	327
4	2008	371
5	2009	412
6	2010	453

Sumber: Badan Perpustakaan, Arsip, Dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Utara, 2011.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Sejak Tahun 2007 telah dibentuk Kantor Pelayanan Satu Pintu di provinsi maupun kabupaten/kota. Tahun 2010 dari 15 kabupaten/kota, sudah 13 (tigabelas) kabupaten/kota yang telah membentuk kantor/badan pelayanan satu pintu yaitu: Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, dan Kota Kotamobagu. Namun sampai saat ini tugas dan fungsi kantor/badan belum optimal karena peran dan kewenangannya belum sepenuhnya diberikan, seperti pelimpahan ijin-ijin serta masih diberlakukannya beberapa peraturan daerah yang menghambat investasi di daerah serta masih terbatasnya peraturan daerah yang mendorong akselerasi perekonomian di daerah.

Ada beberapa peraturan daerah yang telah dihapus di bidang retribusi daerah yaitu: Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan; Perda Nomor 2 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengawasan Mutu dan Pengembangan Produksi Cengkeh, dan Pala dalam Provinsi Sulawesi Utara; Perda Nomor 2 Tahun 2003 tentang Ijin Pengoperasian Mobil Barang Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara; Perda Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Perda Provinsi Sulawesi Utara Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Penimbangan. Selanjutnya, jumlah proyek yang terealisasi di Sulawesi Utara selang Tahun 2006-2010 yang bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA) berjumlah 13 proyek dan yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berjumlah 5 proyek.

2.3.2.2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman Modal Asing (PMA) menunjukkan perkembangan dari Tahun 2006-2010. Nilai investasi Tahun 2006 sebesar 46.326.606 USD dan Tahun 2010 menjadi 196.854.320 USD

dengan jumlah proyek 13 Tahun 2006 dan Tahun 2010 menjadi 48 proyek. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada periode Tahun 2006-2010 menunjukkan terjadinya perkembangan nilai investasi yaitu dari Rp.330.153.892.260 dengan jumlah proyek 5 (lima) Tahun 2006 menjadi Rp.1.002.342.080.469 dengan jumlah proyek 19 (sembilan belas) Tahun 2010.

2.3.2.3. Pengembangan Kawasan Strategis

Salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan investasi adalah dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari segi kepentingan pertumbuhan ekonomi. Lokasi KEK di Sulawesi Utara terletak di Kota Bitung, dipilihnya Bitung sebagai lokasi pengembangan KEK dikarenakan posisinya yang dekat dengan jalur perdagangan internasional di Indonesia (Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI II dan III), dan terletak pada wilayah dengan potensi sumberdaya unggulan. Salah satu keunggulan Bitung adalah memiliki pelabuhan alam dengan kedalaman s/d 70m sehingga mudah untuk dilabui oleh kapal-kapal berukuran besar, dan saat ini untuk hubungan kapal penumpang antar negara tetangga telah ada pelayanan kapal RO-RO (rol in-rol out) dari Bitung ke General Zantos Davao pp. Untuk menunjang KEK Bitung, maka pemerintah telah mengembangkan beberapa kawasan pendukung KEK yaitu Kawasan Lirung-Melonguane (Perikanan dan Wisata Bahari), Kawasan Tahuna-Petta (Perikanan dan Wisata Bahari), Kawasan Lolak-Labuhan Uki (Perikanan); Kawasan Ratatotok-Lakban (Perikanan dan Wisata Bahari); Kawasan Amurang (Perikanan dan Kelapa); Kawasan Tomohon (Florikultur dan Agrowisata) dan Kawasan Likupang (Perikanan dan Wisata Bahari).

2.3.2.4. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun

Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja pada kurun waktu lima tahun terakhir ini cenderung mengalami peningkatan, walaupun Tahun 2006 dan Tahun 2008 terjadi penurunan sebesar 1 (satu) angka. Pada Tahun 2005 Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja sebesar 9 (Sembilan) kasus, Tahun 2006 mengalami penurunan menjadi 5 (lima) kasus, namun Tahun 2007 kembali mengalami kenaikan yaitu mencapai 15 (lima belas) kasus. Tahun 2008 kembali menurun menjadi 14 (empat belas) kasus, dan Tahun 2009 meningkat jauh mencapai 32 (tiga puluh dua) kasus. Perkembangan Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja dapat dilihat pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28.

Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Provinsi Sulawesi Utara, 2005-2009

Indikator/Tahun	2005	2006	2007	2008	2009
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja	9 kasus	5 kasus	15 kasus	14 kasus	32 kasus

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2010.

2.3.2.5. Pertanian

Sulawesi Utara memiliki potensi lahan sawah yang ditanami padi seluas ± 61.134Ha yang terdiri dari sawah irigasi ± 50.130Ha dan sawah non irigasi seluas 11.004Ha. Selain itu terdapat lahan bukan sawah seluas 205.543Ha, ladang/huma 114.04Ha, lahan yang

sementara tidak digunakan 48.195Ha, lainnya perkebunan, hutan rakyat, tambak, kolam/ltebat/empang, dan lain-lain seluas 541.152Ha.

Indeks pertanaman padi sawah belum mencapai 200, sehingga masih memiliki potensi untuk meningkatkan produksi padi sawah bilamana dalam satu tahun lahan sawah dapat ditanami lebih dari dua kali (IP>200). Demikian halnya dengan lahan yang sementara tidak diusahakan seluas 48.195Ha dapat dimanfaatkan untuk pengembangan padi ladang maupun komoditi pertanian lainnya. Disamping itu pada lahan perkebunan kelapa dapat dimanfaatkan untuk pengembangan komoditi tanaman pangan seperti jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian.

Tabel 2.29.

Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Utara, 2005-2009

Komoditas	Luas Panen (Ha)					Produksi (Ton)				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Padi Sawah	88,795	89,159	93,819	98,416	103,887	401,231	441,574	473,940	492,177	522,532
Padi Ladang	4,615	5,558	8,666	11,535	10,858	11,050	13,325	21,011	28,012	26,528
Jagung	68,465	82,189	115,664	131,791	126,349	207,070	242,713	406,759	466,041	450,961
Kedele	4,317	3,321	2,662	5,227	5,652	5,326	4,902	4,572	7,217	7,666
K. Tanah	5,571	5,821	5,755	6,573	6,450	6,195	7,206	7,554	8,639	8,495
K. Hijau	1,421	1,506	1,614	1,791	2,123	1,542	2,079	2,151	2,383	2,631
Ubi Kayu	5,711	6,058	5,709	6,388	5,907	58,803	82,919	74,407	83,654	77,241
Ubi Jalar	3,851	3,755	3,618	4,273	5,430	33,519	37,345	35,485	42,017	53,118

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Sulawesi Utara, 2010.

Tabel 2.29 menunjukkan bahwa produksi padi sawah meningkat dari 401.231Ton Tahun 2005 menjadi 522.532Ton Tahun 2009 atau meningkat 30,23%; padi ladang meningkat dari 11.050Ton Tahun 2005 menjadi 26.528Ton Tahun 2009 atau meningkat 140,07%; jagung meningkat dari 207.070Ton Tahun 2005 menjadi 450.961Ton Tahun 2009 atau meningkat 117,78%; kedele meningkat dari 5.326Ton Tahun 2005 menjadi 7.666Ton Tahun 2009 atau meningkat 43,93%, demikian juga dengan komoditi kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar juga mengalami peningkatan produksi selang periode Tahun 2005-2009.

Komoditi tanaman perkebunan yang potensial adalah kelapa, cengkeh, pala, kopi, coklat, vanili, dan aren. Tanaman kelapa yang dulunya merupakan komoditi unggulan masyarakat dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan yang signifikan, baik dari segi luas tanam

maupun produksi. Penyebab terjadinya penurunan produksi tanaman kelapa adalah sebagian besar tanaman kelapa yang ada sudah tidak produktif lagi (sudah tua) sehingga perlu peremajaan, selain itu sejak Tahun 2009 tanaman kelapa terkena penyakit busuk pucuk. Produksi cengkeh juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Khusus untuk tanaman ini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga jual, baik ditingkat petani maupun pedagang. Banyak petani menebang tanaman ini dan mengantinya dengan tanaman lain dikarenakan hasil panen hanya cukup untuk menutupi biaya produksi dan panen.

Keberhasilan sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan tidak lepas dari peran penyuluh sebagai fasilitator bagi petani, peternak, dan nelayan. Jumlah penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan yang ada di Sulawesi Utara saat ini berjumlah 1.022 orang yang tersebar diseluruh kabupaten/kota, yang terdiri dari 825 orang penyuluh pertanian, perkebunan, dan peternakan; 121 orang penyuluh perikanan dan 76 orang penyuluh kehutanan. Dilihat dari jumlah desa yang ada di Sulawesi Utara maka jumlah penyuluh masih kurang, karena sesuai dengan kebutuhan setiap desa seharusnya dilayani oleh satu orang penyuluh. Selanjutnya untuk meningkatkan produktivitas, mutu, dan nilai tambah produk-produk pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan maka perlu adanya pembangunan pusat-pusat riset dan pengembangan di daerah bekerjasama dengan perguruan tinggi.

2.3.2.6. Perikanan

Tingkat kesejahteraan petani dan nelayan sampai saat ini masih rendah, hal ini disebabkan rendahnya tingkat pendapatan petani dan nelayan. Di era globalisasi seperti sekarang ini, petani dituntut untuk menguasai teknologi inovatif dalam bercocok tanam sampai pemasaran hasil-hasil pertanian. Salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan adalah dengan pengembangan klaster komoditas unggulan, namun sampai saat ini belum optimal karena adanya kendala permodalan, teknologi, fasilitas, infrastruktur, dan informasi pasar yang belum memadai.

Tabel 2.30.
Produksi Perikanan di Provinsi Sulawesi Utara, 2006-2010

Tahun	Perikanan Tangkap (dalam Ton)			Perikanan Budidaya (dalam Ton)		
	Target	Realisasi	$\frac{\Sigma \text{Produksi Ikan}}{\text{Target Daerah}} \times 100\%$	Target	Realisasi	$\frac{\Sigma \text{Produkdi Ikan}}{\text{Target Daerah}} \times 100\%$
2006	205,081	190,789.6	93,03	38,117	21,627.8	57.74
2007	211,166	192,629.9	91,22	43,129	20,907.1	48,48
2008	217,536	207,491.8	95,38	48,089	24,544.0	51,04
2009	224,045	215,531.8	96,20	53,193	31,172.1	58,60

2010	230,7 49	222,22 0.5	96,30	62,52 8	98,502. 7	157,53
------	-------------	---------------	-------	------------	--------------	--------

Sumber: Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, 2011.

Tingkat konsumsi masyarakat Sulawesi Utara terhadap bahan pangan perikanan cukup tinggi yaitu mencapai 40,4 kg/kapita/tahun Tahun 2010. Ditinjau dari angka kebutuhan konsumsi minimum yang dianjurkan yaitu 26 kg/kapita/tahun, maka konsumsi masyarakat secara rata-rata cukup tinggi. Sejalan dengan tingginya kebutuhan konsumsi ikan masyarakat Sulawesi Utara maka produksi perikanan perlu ditingkatkan. Seperti terlihat pada Tabel 2.30, produksi perikanan Sulawesi Utara secara rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 2.9% sejak Tahun 2005-2010. Produksi perikanan budidaya mengalami pertumbuhan sebesar 9,2% sedangkan perikanan tangkap pertumbuhannya sebesar 2,2%.

Tabel 2.31.
Konsumsi Ikan Provinsi Sulawesi Utara, 2006-2010
(Satuan: Kg/Kapita/Thn).

Tahun	Target	Realisasi	$\frac{\Sigma \text{Produksi Ikan Target Daerah}}{\text{Target}} \times 100\%$
2006	38.3	38.14	99,58
2007	38.84	38.42	98,92
2008	39.38	38.84	98,63
2009	39.93	39.58	99,12
2010	40.4	41.29	102,20

Sumber: Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, 2011.

Kenaikan harga bahan bakar minyak sangat berdampak bagi nelayan dan pembudidaya ikan karena biaya produksi semakin bertambah sedangkan harga ikan di pasar tetap. Terlihat pada Tabel 2.32 bahwa sampai saat ini nelayan di Sulawesi Utara masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan BBM terutama di daerah-daerah perbatasan dan harganya sudah naik beberapa kali lipat.

Tabel 2.32.
Jumlah Kelompok Nelayan dan Pembudidaya yang Mendapatkan Bantuan
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2006-2010.

Tahun	Jumlah Kelompok
2006	112
2007	115
2008	124
2009	130
2010	192

Sumber: Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, 2011.

Untuk meningkatkan keterampilan nelayan maka telah dilakukan pelatihan-pelatihan agar nelayan menguasai teknologi penangkapan ikan, teknologi budidaya termasuk teknologi pengolahan hasil-hasil laut sehingga memiliki kualitas yang lebih baik bahkan memenuhi kualitas ekspor serta dapat dipasarkan sampai ke luar negeri, dapat dilihat pada Tabel 2.33.

Tabel 2.33.
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan dan Pembudidaya
Provinsi Sulawesi Utara, 2006-2010

Tahun	Jumlah Produksi Ikan Kelompok Nelayan dan Pembudidaya (Ton)	Jumlah Produksi Perikanan Sulawesi Utara (Ton)	$\frac{\Sigma \text{Produksi Ikan Kelompok Nelayan}}{\Sigma \text{Produksi Ikan Suliut}} \times 100\%$
2006	18,905.1	212,417.4	8,90
2007	21,567.2	213,537.0	10,10
2008	24,827.8	232,035.8	10,70
2009	30,097.9	246,703.9	12,20
2010	41,052.6	320,723.2	12,80

Sumber: Dinas Perikanan, 2011.

2.3.2.7. Energi Dan Sumberdaya Mineral

Beberapa tahun terakhir masyarakat mengalami krisis listrik yang disebabkan kebutuhan listrik yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Untuk mengatasi masalah kekurangan energi listrik tersebut maka sesuai dengan arah kebijakan energi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral yaitu meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (diversifikasi energi) yang sesuai visi 25/25 yaitu Tahun 2025 penggunaan energi baru terbarukan menjadi 25% dengan memaksimalkan penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk menghindari biaya penggunaan bahan bakar fosil (*avoided fossil energy cost*).

Potensi sumberdaya energi baru terbarukan Sulawesi Utara cukup besar diantaranya panas bumi, air, matahari, angin, dan arus laut, yang jika dimanfaatkan secara optimal dapat memenuhi kebutuhan energi seluruh masyarakat. Sumberdaya energi panas bumi tersebar di 6 (enam) kabupaten/kota dengan total sumberdaya 150 (MWe), cadangan terduga 540 (MWe), cadangan mungkin 150 (MWe), dan cadangan terbukti 78 (MWe). Dari cadangan tersebut telah terpasang 3x20 (MWe). Potensi sumberdaya air di Sulawesi Utara adalah sebesar 140,34 MW yang tersebar di 31 lokasi. Dari jumlah potensi tersebut telah dimanfaatkan sebesar 59.80 MW atau hanya sekitar 42.61% dari potensi sumberdaya air yang ada.

Mengingat kondisi ketenagalistrikan saat ini dimana daya terpasang 247.73MW, daya mampu: 204.89MW, beban puncak: 193.63MW, jumlah pelanggan: 426.592 pelanggan, daftar tunggu: 11.134 pelanggan (11.134MW), Desa berlistrik 93.41%, ratio elektrifikasi:

73.47%. Guna memenuhi kebutuhan akan energi listrik maka rencana pengembangan pembangkit listrik dilaksanakan Tahun 2010–2019.

Selain Panas Bumi, air, masyarakat Sulawesi utara juga telah memanfaatkan energi matahari (*solar home system*) baik yang dilaksanakan secara terpadu maupun partial, terutama di pulau-pulau. Untuk pemanfaatan energi angin sudah dicoba di Kabupaten Sangihe namun hasilnya belum maksimal, sementara biomassa dan arus laut belum dikembangkan (masih dalam taraf percobaan).

Sumberdaya energi baru terbarukan yang telah dimanfaatkan adalah panas bumi yang tersebar di 6 (enam) lokasi yaitu: Airmadidi (Kabupaten Minahasa Utara) sebesar 25 megawatt ekuivalen; Gunung dua sudara (Kabupaten Minahasa Utara) sebesar 125 megawatt ekuivalen; Lahendong (Kota Tomohon) sebesar 130 megawatt ekuivalen; Tompaso sebesar 125 megawatt ekuivalen; Gunung Ambang (Kabupaten Bolaang Mongondow Timur) sebesar 225 megawatt ekuivalen dan Kotamobagu (Kota Kotamobagu) sebesar 185 megawatt ekuivalen, sehingga total potensi geothermal Sulawesi Utara adalah 815 (delapan ratus lima belas) megawatt ekuivalen. Pengembang panas bumi di lokasi Lahendong, Tompaso dan Kotamobagu adalah PT. Pertamina Geothermal Energi.

Disamping itu, Sulawesi Utara juga memiliki beberapa sumberdaya mineral yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, yaitu logam, non logam dan batuan. Bahan mineral logam terdiri dari emas, pasir besi, biji besi dan mangan dan bahan mineral non logam terdiri dari bahan-bahan untuk industri semen seperti batu gamping, *clay* dan pasir kuarsa.

Pengendalian pemanfaatan sumberdaya mineral lebih dititikberatkan pada tertib administrasi perijinan serta pengelolaan mineral secara *sustainable* dan berwawasan lingkungan.

Saat ini jumlah ijin usaha pertambangan di Sulawesi Utara adalah sebanyak 74 buah, terdiri dari Kontrak Karya 7 buah, KP/IUP 62 buah dan WPR 5 buah. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya mineral lebih dititikberatkan pada tertib administrasi perijinan serta pengelolaan.

2.3.2.8. Kehutanan

Masyarakat Sulawesi Utara masih banyak yang menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Keberlangsungan ketiga sektor tersebut sangat bergantung pada kondisi hutan sebagai penyedia air dan penyangga kehidupan dalam mencegah bencana di masa depan. Isu kehutanan yang masih dihadapi saat ini adalah masih luasnya lahan kritis dalam kawasan, pemanfaatan/penggunaan lahan untuk kepentingan non kehutanan secara illegal dalam kawasan hutan, perambahan dan pencurian kayu (illegal logging), alih fungsi kawasan hutan terkait tata ruang serta isu perubahan iklim terkait hutan. Luas lahan kritis Sulawesi Utara saat ini adalah 245.206Ha (sudah 31% kawasan hutan yang dalam kondisi kritis).

Luas kawasan hutan adalah 788.693Ha yang sesuai dengan fungsinya terbagi atas Hutan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (HSA/KPA) seluas 320.543Ha (40,64%), Hutan Lindung (HL) seluas 175.959Ha (22,31%), Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 210.124Ha (26,46%), Hutan Produksi (HP) seluas 67.424Ha (8,55%) dan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 14.643Ha (1,86%). Luas kawasan hutan menurut kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34.

Luas Kawasan Hutan menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara, 2010

No	Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Hutan (Ha)
1	Manado	16.192
2	Bitung	15.643
3	Tomohon	2.895
4	Minahasa	23.348
5	Minahasa Utara	72.276
6	Minahasa Selatan (termasuk Minahasa Tenggara)	88.353
7	Talaud	42.351
8	Sangihe (termasuk Sitaro)	13.820
9	Bolaang Mongondow (termasuk Bolmut, Bolsel dan Boltim)	513.816
	Luas Keseluruhan	788.692,88

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Utara, 2011.

Berkaitan dengan hal tersebut maka pemerintah harus terus melakukan upaya-upaya pelestarian dan pemanfaatan hutan secara lestari diantaranya melalui penyadartahuan masyarakat yang berada disekitar hutan untuk terus menjaga kelestarian hutan sebagai penyangga ekonomi dan kehidupan mereka serta generasi dimasa yang akan datang. Seiring itu pula Pemerintah melakukan upaya penegakan hukum bagi para perusak atau pelaku pelanggaran kehutanan, memberikan akses masyarakat untuk mengelola hutan secara lestari, melakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan dengan melibatkan masyarakat serta mendorong upaya-upaya mengantisipasi perubahan iklim global dengan kerjasama di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

2.3.2.9. Pariwisata

Pembangunan kepariwisataan ditujukan pada peningkatan kemampuan untuk menggalakkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Sulawesi Utara sebagai destinasi wisata dunia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja utamanya disektor *community based ecotourism*. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman wisata bahari sebagai potensi ekowisata berbasis *marine tourism*, *edutainment*, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan kesenian dan budaya daerah yang melibatkan berbagai sektor. Kegiatan pariwisata diharapkan mampu membuka lapangan kerja, peningkatan

pendapatan bagi pemerintah dan masyarakat di daerah wisata serta penerimaan devisa bagi Negara.

Indikator kegiatan kepariwisataan di Sulawesi Utara tercermin dari jumlah wisatawan baik asing maupun nusantara. Jumlah wisatawan asing Tahun 2007 tercatat 25.141 orang, meningkat menjadi 32.760 orang Tahun 2008, dan memuncak menjadi 51.977 orang Tahun 2009. Patut dicatat lonjakan kunjungan wisatawan asing terjadi bersamaan dengan penyelenggaraan *World Ocean Conference* dan *Sail Bunaken* di Sulawesi Utara. Situs BPS Sulawesi Utara melaporkan hingga bulan juni Tahun 2010 jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Sulawesi Utara telah mencapai 10.213 orang seperti pada tabel 2.35.

Tabel 2.35.
Data Perkembangan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Utara, 2006-2009

No	Data	Tahun			
		2006	2007	2008	2009
1	Wisatawan Mancanegara	22.328	25.141	32.760	51.977
2	Wisatawan Nusantara	316.542	324.587	409.065	1.529.973
3	Objek Wisata	394	423	545	547
4	Travel Biro Perjalanan	62	63	81	81
5	Restoran/ Rumah Makan	440	453	453	453
6	Diving Centre	34	34	40	40
7	Hotel Bintang	17	28	29	28
8	Kamar Hotel Bintang	1.151	1.402	2.313	2.250
9	Tingkat Hunian Kamar Hotel Bintang	48,9%	49,23%	55,0%	65,0%
10	Hotel Melati	167	205	227	237
11	Kamar Hotel Melati	3.057	3.158	3.136	3.362
12	Rata-Rata Lama Menginap Tamu	3 hari	3 hari	3 hari	4 hari
13	Benda Cagar Budaya				
	Benda Bergerak	2.810	2.810	2.810	2.810
	Benda Tidak Bergerak	57	57	57	57
14	Juru Pelihara	57	57	57	57
15	Museum	1	1	1	1
16	Organisasi Kesenian	105	120	120	120
17	Seniman	232	310	310	310
18	Jenis Kesenian	14	20	20	149

Sumber: BPS Sulawesi Utara, 2010.

Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan sarana penunjang ke objek wisata perlu adanya koordinasi dan dukungan anggaran dari SKPD terkait bersama Pemerintah Kabupaten Kota serta kerja sama dengan berbagai stakeholder kepariwisataan termasuk investor untuk pembangunan infrastruktur kepariwisataan. Akses pariwisata

internasional dan nasional ke Sulawesi Utara saat ini melalui 2 jalur utama yaitu Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado dan Pelabuhan Internasional Bitung. Untuk Bandara Internasional Sam Ratulangi direncanakan akan ditingkatkan fasilitas dan pelayanannya. Selain itu sedang dirintis pembukaan dan pembukaan kembali jalur-jalur penerbangan internasional yang baru, seperti Manado-Goan Zhou, Manado-Kuala Lumpur, Manado-Davao dan Manado-General Santos. Demikian pula, peningkatan frekuensi penerbangan baik penerbangan domestik maupun penerbangan internasional. Penting untuk dikaji dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata di Sulawesi Utara, di perlukan pengembangan paket pariwisata kewilayahan dengan memperhatikan potensi objek wisata yang ada misalkan *Bunaken Marine Park*, Bunaken-Lembah-Likupang-Makelehi.

Pelabuhan Internasional Bitung, meningkat statusnya sebagai *International Hub Port*. Demikian pula, akan ditingkatkan fasilitas dan infrastruktur pelabuhan, seperti pembangunan terminal kapal pesiar internasional untuk memperluas akses/jalur kapal pesiar internasional, pengembangan dermaga kapal, dan peningkatan jumlah fasilitas-fasilitas lainnya seperti *crane*.

Dilihat dari segi keamanan, pengawasan, dan kewaspadaan di Bandara Internasional Sam Ratulangi dan Pelabuhan Internasional Bitung, telah tercipta situasi yang kondusif atas dukungan aparat keamanan. Hal ini ditunjukkan dengan pemberdayaan Polisi Pariwisata dalam bentuk kerjasama antara Kepolisian Daerah dengan manajemen Bandara Internasional Sam Ratulangi dan Pelabuhan Internasional Bitung yang berlangsung dengan baik.

a. Objek wisata

Sulawesi utara telah ditetapkan sebagai satu dari lima daerah tujuan wisata dan satu dari 10 daerah yang dapat menyelenggarakan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE)*. Objek-objek wisata yang cukup menarik diantaranya:

1. Wisata Bahari antara lain Taman Laut Bunaken, Pulau Siladen, Mantehage, dan Hamparan Taman Laut Di Sangihe Talaud, dan Bolaang Mongondow.
2. Wisata alam antara lain Taman Nasional Dumoga Bone di Bolaang Mongondow, Cagar Alam Tangkoko Batu Angus di Bitung, Danau Tondok, Gunung Ambang di Bolaang Mongondow, dan Sumaru Endo di Danau Tondano.
3. Wisata Peninggalan Sejarah Budaya Berupa Kuburan Tua/Waruga Di Sawangan, dan Gua Peninggalan Jepang Di Kawangkoan.
4. Wisata religi antara lain Bukit Kasih Kanonang, Jalan Salib Tomohon, dan Bukit Doa Pinaling.
5. Wisata Pantai antara lain Pantai Tasik Ria, Pantai Kalasei, Pantai Hais, Pantai Kora-Kora, Pantai Tanjung Merah Di Minahasa, Pantai Molas Di Manado, Pantai Molosing dan Labuan Uki Di Bolaang Mongondow.
6. Wisata pemandian air panas banyak tersebar di Kabupaten Minahasa bagian tengah seperti di Tondano, Remboken, Passo, dan Langowan.

7. Wisata Tirta, untuk jenis wisata ini dapat dinikmati pada hampir semua Sungai dan Danau yang ada di daerah ini, seperti Danau Tondano dan Danau Moat di Kabupaten Minahasa.

Tidak terdapat badan promosi pariwisata, sehingga peran dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus dimantapkan untuk bisa melaksanakan promosi pariwisata baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Promosi pariwisata akan berhasil jika ditunjang dengan peningkatan dan pelaksanaan kualitas pelayanan industri pariwisata melalui penambahan akses penerbangan internasional, pembangunan terminal kapal pesiar internasional, pusat senidan kebudayaan, pusat souvenir khas, pembenahan museum-museum dan pusat informasi pariwisata. Kerjasama promosi pariwisata dengan provinsi-provinsi sekitar serta ke manca Negara sangat berguna untuk pengembangan Provinsi Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia bagian Timur.

Menjaga kenyamanan pengunjung objek-objek wisata perlu dilakukan melalui pembenahan sarana dan prasarana seperti tempat peristirahatan, wc umum, jalan menuju lokasi wisata, sarana dan prasarana. Ruang terbuka umum untuk publik perlu adanya peningkatan pemeliharaan demi kenyamanan bagi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas ruang terbuka untuk umum.

b. Taman rekreasi

Pelayanan untuk kepentingan umum yang *representative* sangat dibutuhkan saat ini, untuk itu perlu peningkatan taman-taman rekreasi yang ada dan penambahan tempat-tempat rekreasi yang baru. Taman rekreasi yang ada saat ini (antara lain Bukit Kasih Kanonang, Golden Lake di Pomorow, dan Taman Kesatuan Bangsa), belum memadai dan belum memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat-tempat rekreasi.

Upaya pemerintah Sulawesi Utara melakukan pembinaan kebudayaan asli diarahkan untuk mempertahankan dan melestarikan kebudayaan asli warisan leluhur dengan berbagai cara diantaranya dengan melakukan berbagai kegiatan seperti pesta budaya, festival seni, festival seni, lomba-lomba, karnaval, pameran, dan pertunjukan budaya, penyuluhan kebudayaan, pelatihan kebudayaan, temukarya kebudayaan, penampilan nuansa budaya Kabupaten Minahasa, Kabupaten Sangihe, dan Kabupaten Bolaang Mongondow pada fasilitas umum milik pemerintah, swasta dan masyarakat, pemuatan materi kebudayaan lokal dalam kurikulum muatan lokal pada semua jenjang pendidikan dan kegiatan upaya pembinaan lainnya. Pada saat ini Pemerintah Daerah Sulawesi Utara melakukan pengembangan kebudayaan asli secara selektif melalui peningkatan kapasitas pusat-pusat kebudayaan, sanggar-sanggar kebudayaan.

c. Ketersediaan Restoran

Mendukung daya saing daerah, salah satu indikatornya yaitu ketersediaan restoran. Sampai Tahun 2010, restaurant atau rumah makan di Kota Manado dan sekitarnya berjumlah 453 (empat ratus lima puluh tiga) buah, dengan perincian Rumah makan berjumlah 253 buah yang terdiri dari klasifikasi A: 33 buah, klasifikasi B: 25 buah dan klasifikasi C: 195 buah.

Sedangkan Restaurant berjumlah 200 buah yang terdiri dari klasifikasi A: 30 buah, klasifikasi B: 170 buah.

d. Ketersediaan Penginapan

Mendukung aspek daya saing ketersediaan penginapan/hotel di Kota Manado dan sekitarnya berjumlah 258 buah. Rincian penginapan dan hotel terlihat pada Tabel 2.36.

Tabel 2.36
Jumlah Hotel/Penginapan Provinsi Sulawesi Utara, 2010.

No.	Indikator	Jumlah (Buah)	Jumlah (Kamar)
1.	Hotel Melati	230	3.221
2.	Hotel Berbintang:	28	2.250
a.	Bintang 5	2	
b.	Bintang 4	7	
c.	Bintang 3	6	
d.	Bintang 2	5	
e.	Bintang 1	8	

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, 2011.

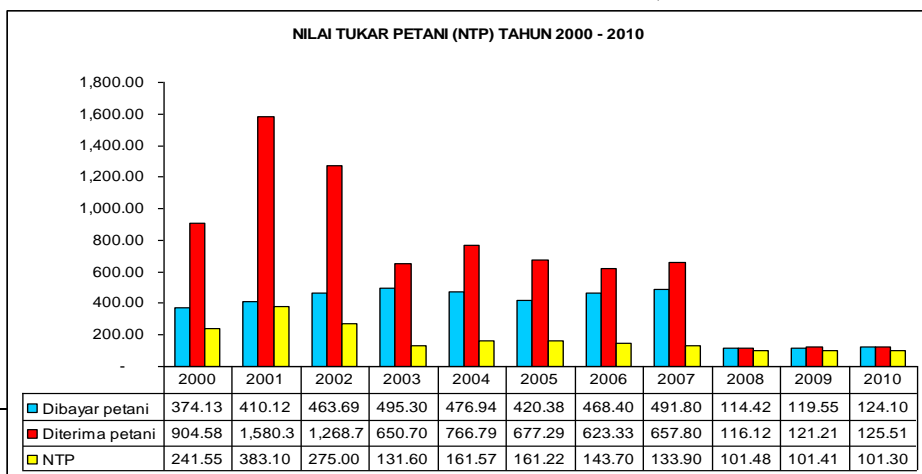
2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Nilai Tukar Petani (NTP)

Kecenderungan rendahnya NTP akan dapat mengurangi insentif petani meningkatkan produktivitas pertanian secara optimal dalam jangka panjang. Kondisi demikian dapat mengurangi laju peningkatan produksi relatif terhadap laju peningkatan konsumsi dalam negeri, sehingga swasembada pangan terutama beras yang telah tercapai selama ini bisa terancam kelestariannya.

Gambar 2.15
Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Utara, 2000–2010.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2011.

Ket: Tahun 2000-2007 menggunakan tahun dasar 1993

Tahun 2008-2010 menggunakan tahun dasar 2007

Nilai Tukar Petani (dengan tahun dasar 2000) di Sulawesi Utara dari Tahun 2000-2010 terlihat bahwa NTP paling tinggi yaitu 383,10 terjadi Tahun 2001 dan sejak Tahun 2005-2010 terus mengalami penurunan (101,30 pada 2010). Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun nilai yang dibayarkan petani dalam rangka melaksanakan kegiatan produksinya dengan nilai yang diterima petani semakin menurun, berarti tingkat kesejahteraan petani Sulawesi Utara mengalami penurunan. Terjadinya penurunan nilai tukar petani sejak Tahun 2005 disebabkan tingkat perubahan harga produk-produk non pertanian lebih cepat atau lebih tinggi dibandingkan dengan perubahan harga-harga produk pertanian khususnya tanaman pangan.

Dibandingkan dengan sub sektor lainnya, petani sub sektor tanaman perkebunan memiliki NTP terbesar Tahun 2010 yaitu sebesar 109.02. Selanjutnya diikuti oleh sub sektor hortikultura sebesar 100.88 (seperti pada tabel 2.37). Namun demikian walaupun memiliki NTP tertinggi bukan berarti bahwa petani sub sektor perkebunan sudah sejahtera sehingga masih perlu adanya intervensi pemerintah untuk menaikkan NTP untuk meningkatkan kesejahteraan hidup petani.

Tabel 2.37
Nilai Tukar Petani Menurut Sub Sektor Bulan Januari-Desember, 2010

Bulan	Tanaman Pangan	Hortikultura	Tanaman Perkebunan	Peternakan	Perikanan
Januari	97.04	101.46	112.38	99.15	96.84
Februari	96.20	100.44	110.25	99.48	96.81
Maret	96.16	100.20	111.06	99.31	96.88
April	95.34	101.17	110.32	99.62	97.22
Mei	97.43	101.63	110.46	99.28	96.83
Juni	97.68	99.46	111.25	99.56	97.23
Juli	97.98	101.43	109.58	99.47	95.57
Agustus	98.12	102.26	106.93	99.56	96.41
September	98.10	101.97	106.61	100.04	95.78
Oktober	98.96	101.01	106.00	100.45	96.74
November	98.84	100.52	106.98	101.31	97.89
Desember	98.86	98.97	106.39	101.12	96.97
Rata-Rata 2010	97.56	100.88	109.02	99.86	96.76

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2011.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

a. Ketaatan terhadap RTRW

Realisasi luas wilayah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 1.547.877Ha, dengan luas masing-masing kawasan sebagai berikut:

- Luas Rencana Ruang Kawasan Lindung 883.426Ha, dan
- Luas Rencana Ruang Kawasan Budidaya 664.451Ha.

Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya. Kawasan lindung merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, Lokasinya tersebar di Bintauna, Kaidipang, sekitar Teluk Boroko (termasuk Pulau Lampu) dan sebagian Pulau Damar (Kabupaten Bolmong Utara), Desa Tanamon, Boyongpante, dan Blongko (Kabupaten Minahasa Selatan).

b. Luas Kawasan Lindung

Kawasan Lindung di Sulawesi Utara meliputi: hutan lindung, kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau, kawasan sekitar mata air, kawasan terbuka hijau kota, suaka alam laut, suaka margasatwa, cagar alam, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan banjir, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan yang terletak di zona patahan aktif, kawasan rawan tsunami, dan abrasi.

c. Luas Wilayah Produktif

Pertambahan dan perkembangan tata ruang wilayah mengalami perubahan yang pesat dalam dasawarsa terakhir ini. Perkembangan kota, perkembangan desa, dan hubungan kota desa berlangsung secara interaktif dan saling menguntungkan. Kota-kota yang cepat perkembangannya, antara lain Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu, dan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selain itu, ibukota kabupaten yang baru, antara lain seperti Amurang, Airmadidi, dan Melonguane juga semakin cepat ditata karena merupakan pusat-pusat pemerintahan. Lengkapnya infrastruktur yang tersedia merupakan pendorong utama perkembangan daerah.

Perkembangan situasi dan kondisi selama 15 tahun sejak disusunnya Rencana Struktur Tata Ruang Provinsi (RSTRP) Daerah Tingkat I Sulawesi Utara sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 1991 Tanggal 5 Desember Tahun 1991, telah memberikan perubahan yang signifikan terhadap kondisi pemanfaatan ruang saat ini. Perubahan tersebut terutama disebabkan oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pemekaran

Provinsi Sulawesi Utara sebagai provinsi induk, dan Provinsi Gorontalo sebagai provinsi hasil pemekaran. Pada saat ini, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara sedang dalam proses penetapan di Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional.

Adanya perubahan struktur tata ruang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap struktur fungsi jaringan jalan pendukungnya. Perubahan ini selanjutnya berpengaruh terhadap pengelolaan/pembinaan jalan. Pasca pemekaran, jaringan jalan yang sebelumnya berperan sebagai jalan kolektor primer berubah menjadi jalan arteri primer. Begitu juga halnya jaringan jalan yang berfungsi sebagai jalan lokal primer menjadi jalan kolektor primer. Perubahan wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Utara sebagai hasil pemekaran secara langsung akan mengubah luasan dari pola pemanfaatan ruang bagi setiap unsur pemanfaatan ruang. Salah satu perubahan pemanfaatan ruang yang paling mencolok adalah luasan pemanfaatan ruang untuk hutan lindung. Perubahan luasan ini terjadi sangat signifikan, mengingat rona daratan yang masuk ke wilayah Gorontalo pasca pemekaran didominasi oleh peruntukan hutan lindung.

Berkurangnya lahan peruntukan hutan lindung ini selain akibat pemekaran, juga disebabkan oleh belum efektifnya RSTRP sebagai pengendali pemanfaatan ruang di mana beberapa lokasi telah mengalami alih fungsi lahan dari hutan lindung menjadi hutan produksi atau hutan konversi, dan bahkan berubah menjadi kegiatan bermukim atau permukiman. Dengan demikian, RSTRP Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Utara Tahun 1991 telah ditinjau kembali dengan mengacu kepada Surat Edaran Menteri PU Nomor 19/SE/M/2008 dan Surat Edaran Dirjen PR Nomor 47/SE/Dr/2008 tentang Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan sekaligus sebagai upaya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1. Angka Kriminalitas

Jika dilihat dari faktor keamanan dan ketentraman masyarakat Sulawesi Utara pada dasarnya daerah ini merupakan daerah yang aman dan nyaman dengan kondisi masyarakat yang beragam baik dari faktor suku, agama dan ras. Organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Undang-Undang Ormas Nomor 8 Tahun 1985, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1986, sampai Tahun 2010 tercatat sebanyak 40 (empatpuluh) organisasi masyarakat, 34 Lembaga Swadaya Masyarakat, 6 organisasi keagamaan meskipun yang aktif tercatat hanya 20 organisasi masyarakat yang aktif, 12 lembaga swadaya masyarakat dan 6 organisasi keagamaan. Untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sulawesi Utara, dibentuk berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Utara Nomor 317 Tahun 2007, sebagai penjabaran dari Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.

Beberapa daerah rawan konflik, yaitu:

1. Kota Manado; Kecamatan Tikala, dan Kecamatan Taas.
2. Kota Bitung; Desa Manembo-Nembo Tengah, Desa Pinasungkulan, dan Kelurahan Tendeki.
3. Kota Kotamobagu; Kecamatan Kotamobagu Selatan, dan Desa Kopandakan.
4. Kabupaten Bolang Mongondow; Kecamatan. Dumoga Barat, dan Kecamatan Dumoga Timur.
5. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; Kecamatan Pinogaluman (Pulau Bongkil).
6. Kabupaten Minahasa; Desa Tikela Kecamatan Tombuluan, dan Desa Pineleng, Kecamatan Pineleng.
7. Kabupaten Minahasa Utara; Kecamatan Likupang, dan Kecamatan Dimembe.
8. Kabupaten Minahasa Tenggara; Kecamatan Ratahan, dan Kecamatan Ratatotok.
9. Kabupaten Minahasa Selatan; Kecamatan Tompaso Baru
10. Kabupaten Kepulauan Sangihe; Kecamatan Nusa Tabukan.

Dalam upaya membangun kerjasama antara masyarakat, aparat keamanan dan pemerintah maka dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 dan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 34 Tahun 2008. Komunitas Intelegen Daerah (Kominda) Sulawesi Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 dan Surat Keputusan Gubernur Nomor 283 Tahun 2008, sementara Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Daerah Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 dan Surat Keputusan Bupati/Walikota setempat, untuk mewujudkan kedaulatan wilayah nasional yang ditandai dengan kejelasan dan ketegasan batas-batas wilayah negara, menurunnya kegiatan ilegal dan terpeliharanya lingkungan hidup di kawasan perbatasan, serta memperkecil keterisolasian daerah perbatasan dengan meningkatkan aspek sarana dan prasarana terutama transportasi darat, laut, udara, dan infrastruktur telekomunikasi dan energi.

Kasus peredaran minuman keras dan narkoba sepanjang Tahun 2010 terjadi 46 kasus di Kota Manado, 53 kasus di Kota Bitung, 28 Kasus di Kota Tomohon, 71 kasus di Kabupaten Minahasa, 50 kasus di Kabupaten Minahasa Tenggara, 51 kasus di Kabupaten Minahasa Selatan, 58 kasus di Kabupaten Minahasa Utara, 15 Kasus di Kabupaten Kepulauan Sangihe, 16 kasus di Kabupaten Kepulauan Siau-Tagulandang-Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud sebanyak 3 kasus, dan Kabupaten Bolaang Mongondow sebanyak 113 kasus. Sementara itu untuk kasus praktek prostitusi yang tertangani sebanyak 2 (dua) kasus di Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak 1 kasus.

Angka kriminalitas yang tertangani sepanjang Tahun 2010 untuk kasus premanisme di Kota Manado sebanyak 55 kasus, di Kota Bitung sebanyak 11 kasus, Kabupaten Minahasa sebanyak 3 kasus, Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak 4 kasus, Kabupaten Minahasa Utara sebanyak 3 kasus, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Siau-Tagulandang-Biaro sebanyak 4 kasus, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Raya sebanyak 11 kasus.

Masalah yang cukup signifikan menjadi pemicu berbagai kasus kriminalitas adalah persoalan dan kekisruhan menyangkut ganti rugi tanah; pencurian dengan kekerasan; aksi *trafficking*; belum seimbang antara lapangan kerja dengan tenaga kerja; pengangguran dan kemiskinan; miss interpretasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; berbagai penyakit masyarakat (minuman keras, narkoba, perkosaan, pencurian, dll) disamping adanya peningkatan suhu politik masyarakat yang terpengaruh terhadap kegiatan LSM tertentu mengekspresikan melalui aksi unjuk rasa/demonstrasi, dengan dalih memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, ketentraman, dan supremasi hukum.

Tabel 2.38.
Jumlah Kriminalitas Provinsi Sulawesi Utara, 2006-2010

No	Jenis Kriminalitas	2006	2007	2008	2009	2010
1	Kasus narkoba	25	64	531	501	400
2	Kasus pembunuhan	21	45	7	62	49
3	Kejahatan seksual (Cabul,zinah,kasa,sopan).	29	387	391	635	612
4	Kasus penganiyaan	2189	2375	2152	3886	2668
5	Kasus pencurian	1066	1169	1174	2287	2466
6	Kasus penipuan	976	989	793	1102	1217
7	Kasus pemalsuan uang	0	0	0	4	5
8	Tindak kriminal selama 1 tahun	10682	11238	9524	15265	11174

Sumber: Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2011.

Sepanjang Tahun 2010 terjadi 27 kasus unjuk rasa. Perkelahian antar kampung terjadi 4 kali di Kabupaten Bolaang Mongondow (Lokasi Pertambangan Toraut Dumoga Barat; Perbatasan Desa Toruakat dan Desa Pusian (2 Kali); perbatasan Desa Pontodon dan Desa Pongian).

Tabel 2.39.
Angka Demonstrasi Provinsi Sulawesi Utara, 2005-2010

NO	Penyebab	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Kasus demo per tahun	127	151	135	115	148	82
2	Konflik dengan isu SARA	1	1	0	2	2	1
3	Kasus konflik antar wilayah	0	0	0	1	0	1
4	Perselisihan batas wilayah (antar kabupaten/antar kecamatan/antar desa)	2	1	3	6	5	2

Sumber: Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara, 2011.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka partisipasi sekolah menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan menunjukkan bahwa Tahun 2005, anak didik pada tingkat sekolah dasar yang menamatkan pendidikan dasarnya adalah sebanyak 99,66% yang kemudian meningkat Tahun 2009 menjadi sebanyak 99,77%. Artinya Tahun 2009 ada anak didik SD sebesar 0,23 yang putus sekolah atau tidak tamat SD. Di tingkat SMP, Tahun 2005 jumlah siswa yang menamatkan tingkat pendidikan SMP sebanyak 98,23% dan Tahun 2009 menjadi 99,43%. Artinya masih ada 0,57% siswa SMP yang tidak tamat SMP. Untuk tingkat SMA, Tahun 2005 tercatat sebanyak 97,96% yang menamatkan tingkat pendidikan SMA. Hal ini berarti masih ada 2,04% siswa yang tidak menamatkan pendidikan SMA sedangkan Tahun 2009 jumlah siswa yang mampu menamatkan pendidikan SMA sebanyak 98,99%, dan masih ada 1,01% yang tidak dapat menamatkan tingkat pendidikan SMA.

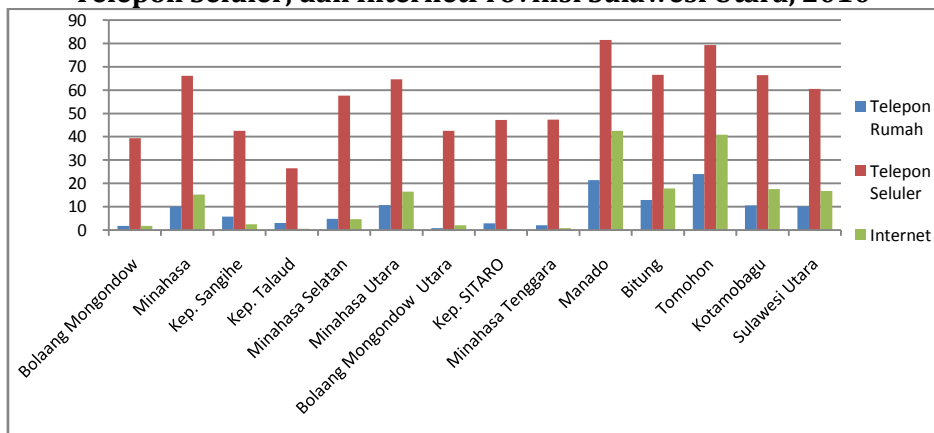
Peningkatan akses pendidikan tidak hanya dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal tetapi juga dilaksanakan melalui jalur pendidikan non formal. Wujud konkretnya adalah penuntasan buta aksara melalui jalur formal maupun informal. Selaras dengan kebijakan pendidikan nasional maka pemerintah Sulawesi Utara melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pemberian bantuan kepada siswa sekolah, pemberian beasiswa, pemberian dana bantuan operasional sekolah rintisan wajar 12 tahun, serta merehabilitasi gedung sekolah.

Selain peningkatan akses pendidikan maka diperlukan kerja keras untuk memperkuat kompetensi dan daya saing tenaga kerja lewat pendidikan dan pelatihan teknik kejuruan berbasis pada kebutuhan pasar kerja, baik dalam maupun luar negeri dengan cara menyiapkan dan membangun Pusat-pusat studi dan pelatihan tenaga-tenaga terampil sesuai skala prioritas dan kebutuhan (misalnya di bidang *geo sciences*, perkelapaan, kepariwisataan: *marine basis tourism*, etc).

2.4.4.2. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Telepon, Telepon Seluler, dan Internet

Merebut sebagian potensi pasar dan perdagangan dunia di Asia Timur dan Pacific, kualitas SDM dan penguasaan teknologi menjadi syarat mutlak harus dilakukan oleh pemerintah nasional dan daerah berkerjasama dengan perguruan tinggi yang berada di daerah. Infrastruktur listrik dan telekomunikasi harus ditetapkan menjadi prioritas strategis nasional untuk mendapatkan sebagian potensi pasar global.

Gambar 2.16.
**Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Telepon,
Telepon Seluler, dan Internet Provinsi Sulawesi Utara, 2010**



Sumber: *Public Expenditure Analysis*, 2010.

Penggunaan alat komunikasi, seperti telepon rumah, telepon seluler, dan akses internet di masing-masing kabupaten dan kota cukup bervariasi. Sebagian besar masyarakat memiliki dan menggunakan telepon seluler dibandingkan telepon rumah. Untuk penggunaan internet baru sebagian pada masyarakat Kota Manado dan Kota Tomohon.

Tabel 2.40.
**Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Provinsi Sulawesi Utara, 2005-2009**

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indik ator Kinerja Pembangunan Daerah	Capain Kinerja					Standar	Inter preta si belu m terca pai (<); sesua i (=); mela mpau i (>)
		2005	2006	2007	2008	2009		

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA 2010-2015**

1	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.1.1	PDRB(HK)	13.079.032,67	13.886.734,82	14.784.667,83	15.902.073,26	17.149.624,49	bertumbuh	Terca pai
1.1.1.2	PDRB (HB)	19.318.198,67	21.867.829,47	24.820.416,07	28.697.756,23	33.033.609,80	Bertumbuh	Terca pai
1.1.1.3	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,90	6,18	6,47	7,56	7,85	>7	Mela mpau
1.1.1.4	Laju Inflasi (%)	18,73	5,09	10,13	9,71	2,31	< 2 Digit	Terca pai
1.1.1.5	PDRB Per Kapita (Rp)	8.589.986	9.709.482	11.011.991	12.609.979	14.379.469		
1.1.1.6	Indeks Gini	0,32	0,32	0,32	0,35	0,35	< 0,50	Mela mpau
1.1.1.7	Jumlah Penduduk Miskin	201.500	232.600	250.100	223.500	219.570		
1.1.1.8	Tingkat Kemiskinan	9,34	10,76	11,42	10,10	9,79	< 2	Terca pai
1.1.1.9	Tingkat Pengangguran terbuka	14,40	14,62	12,35	10,65	10,63	< 2	Belum Terca pai
1.1.1.10	Tingkat Partisipasi	60,19	59,20	61,97	63,12	61,16	65	Belum Terca

10	Angkatan Kerja (TPAK)							pai
1.1. 1.1. 11	APBD	465.353 .219.94 1	649.75 8.172.4 61	774.65 1.376.3 65	913.98 2.714.3 36	1.034. 427.8 81.78 2	Meningka t	Terca pai
1.1. 1.1. 12	PMTB	4,12	5,52	7,46	8,69	9,45	Meningka t	Terca pai
1.2	Kesejahteraan Sosial							
1.2. 1	Pendidikan							
1.2. 1.1	Angka Melek Huruf	99,30	99,30	99,30	99,31	99,41	99	Terca pai
1.2. 1.2	Angka rata-rata sekolah	8,80	8,80	8,80	8,80	8,82	9	Belum Terca pai
1.2. 1.3	IPM	74,20	74,40	74,68	74,16	75,68	Meningka t	Terca pai
2	PELAYANAN UMUM							
2.1	Pelayanan Urusan Wajib							
2.1. 1	Pendidikan							
2.1. 1.1	pendidikan dasar (SD,SMP)							
2.1. 1.1. 1	Angka Partisipasi Sekolah (SD)	105,60	106,98	108,80	110,25	116,5 0	>100	Terca pai
	Angka Partisipasi Sekolah (SMP)	93,73	93,75	94,80	95,00	98,70	>95	Sesuai
	Angka Partisipasi Murni (SD)	89,18	89,20	89,48	89,52	95,67	>95	Sesuai
	Angka Partisipasi Murni (SMP)	68,33	72,00	81,00	85,00	91,01	>95	Belum Terca pai

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA 2010-2015**

2.1. 1.1. 2	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk usia sekolah (SD)	1/109	1/113	1/112	1/111	1/91	1/240	Terca pai
	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk usia sekolah (SMP)	1/223	1/219	1/194	1/179	1/175	1/200	Terca pai
2.1. 1.2	Pendidikan Menengah							
2.1. 1.1. 3	Angka Partisipasi Sekolah	59,96	60,00	63,10	65,23	70,16	>70	Belum Terca pai
	Angka Partisipasi Murni	44,00	44,20	44,22	44,25	44,59	>70	Belum Terca pai
2.1. 1.2. 2	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (SMA)	1/491	1/449	1/434	1/413	1/356	1/400	Sesuai
2.1. 2	Kesehatan							
2.1. 2.1	Rasio balita terhadap Posyandu	1/64	1/68	1/72	1/77	1/87	1/70	Sesuai
2.1. 2.2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk	5,7	6,0	6,4	6,7	7,1	7	Sesuai
2.1. 2.3	Usia Harapan Hidup	70,9	70,0	71,0	72,0	74,4	> 70	Sesuai
2.1. 2.4	Angka Kematian Ibu	232	232	182	174	150	<102	Belum Terca pai
2.1. 2.5	Angka Kematian Bayi	25	25	35	35	28	23	Belum Terca

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA 2010-2015**

								pai
2.2	Pelayanan Urutan Pilihan							
2.2.1	Pertanian							
2.2.1.1	Produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar							
	a. Padi Sawah	401.231	441.57 4	473.94 0	492.17 7	522.5 32	Meningka t	Terca pai
	b. Padi Ladang	11.050	13.325	21.011	28.012	26.52 8	Meningka t	Terca pai
	c. Jagung	207.070	242.71 3	406.75 9	466.04 1	450.9 61	Meningka t	Terca pai
	d. Kedele	5.326	4.902	4.572	7.217	7.666	Meningka t	Terca pai
	e. Kacang Tanah	6.195	7.206	7.554	8.639	8.495	Meningka t	Terca pai
	f. Kacang Hijau	1.542	2.079	2.151	2.383	2.631	Meningka t	Terca pai
	g. Ubi Kayu	58.803	82.919	74.407	83.654	77.24 1	Meningka t	Terca pai
	h. Ubi Jalar	33.519	37.345	35.485	42.017	53.11 8	Meningka t	Terca pai
2.2.1.2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (ADHB) %	20,53	20,40	19,83	19,77	18,87	Menurun	Terca pai
2.2.2.2	Kerusakan Kawasan Hutan. (Ha)	275.963				258.2 94	Menurun	Sesuai
2.2.2.3	Kunjungan Wisatawan Mancanegara(org)		22.328	25.141	32.760	51.97 7	Meningka t	Terca pai
2.2.2.4	Kunjungan Wisatawan Nusantara(org)		316.54 2	324.58 7	409.60 5	1.529. 973	Meningka t	Terca pai
3	DAYA SAING							

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA 2010-2015**

	DAERAH							
3.1	Kemampuan Ekonomi							
3.1.2	Pertanian							
3.1.2.1	Nilai Tukar Petani	161,22	143,70	133,90	101,48	101,41	> 100	Terca pai
3.2	Fasilitas Wilayah/infrastruktur							
3.2.1.	Perhubungan							
3.2.1.1	Kondisi Jalan Baik (km)	408.347	366.640	292.740	263.460	237.120	Meningkat	Terca pai
3.2.1.2	Kondisi Jalan sedang (km)	141.390	155.120	174.370	168.820	163.820	Tetap	Terca pai
3.2.1.3	Kondisi Jalan Rusak Ringan (km)	236.558	279.070	272.830	281.040	274.940	Menurun	Terca pai
3.2.1.4	Kondisi Jalan Rusak Berat (km)	154.035	139.500	57.050	64.120	70.480	Menurun	Terca pai
3.2.1.5	Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	Meningkat	Terca pai
3.2.1.6	jumlah Kendaraan Bermotor	185.203	189.289	219.258	266.437	275.265	Tetap	Belum Terca pai
3.2.1.7	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum							
3.2.2	Penataan ruang							
3.2.2.1	ketaatan terhadap RTRW							
3.2.2.2	Luas Wilayah Produktif	894.941	897.625	978.100	960.361	987.566	Meningkat	Terca pai